



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS FUNGSI LKM-A “SURI INDAH” GAPOKTAN SINAMAR
DALAM MENGELOLA DANA PROGRAM BLM-PUAP NAGARI
SUNGAI RIMBANG KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

SKRIPSI



**SYAHRUL WADI
06914014**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**ANALISIS FUNGSI LKM-A "SURI INDAH"
GAPOKTAN SINAMAR DALAM MENGELOLA DANA
PROGRAM BLM-PUAP NAGARI SUNGAI RIMBANG
KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OLEH

SYAHRUL WADI
06 914 014



**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**ANALISIS FUNGSI LKM-A "SURI INDAH"
GAPOKTAN SINAMAR DALAM MENGELOLA DANA
PROGRAM BLM-PUAP NAGARI SUNGAI RIMBANG
KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OLEH

**SYAHRUL WADI
06 914 014**

SKRIPSI

**SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA PERTANIAN**

**FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

**ANALISIS FUNGSI LKM-A "SURI INDAH"
GAPOKTAN SINAMAR DALAM MENGELOLA DANA
PROGRAM BLM-PUAP NAGARI SUNGAI RIMBANG
KECAMATAN SULIKI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

OLEH

SYAHRUL WADI
06 914 014

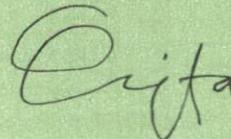
MENYETUJUI:

Dosen Pembimbing I



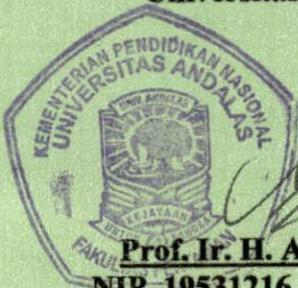
Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc.
NIP. 19591031 198403 1 005

Dosen Pembimbing II



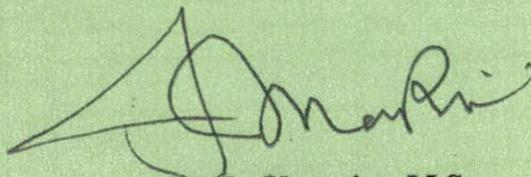
Cipta Budiman, S.Si, M.M.
NIP. 132 315 389

**Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Andalas**



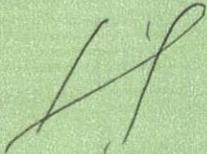
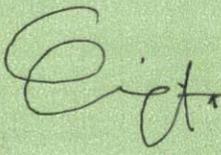
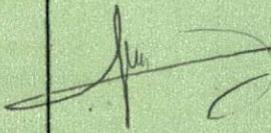
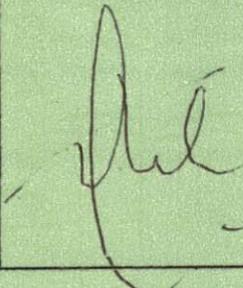
Prof. Ir. H. Ardi, M. Sc.
NIP. 19531216 198003 1 004

**Ketua Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian Univ. Andalas**



Dr. Ir. Yonariza, M.Sc.
NIP. 19650505 199103 1 003

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Pertanian Universitas Andalas, pada tanggal 26 Agustus 2010.

No.	Nama	Tanda Tangan	Jabatan
1.	Ir. M. Refdinal, M.Si.		Ketua
2.	Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc.		Sekretaris
3.	Cipta Budiman, S.Si, M.M.		Anggota
4.	Ir. Syahyana Raesi, M.Sc.		Anggota
5.	Ferdhinal Asful, S.P, M.Si.		Anggota



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perjuangan itu pada akhirnya selesai juga, perjuangan yang diiringi dengan ketabahan dan kesabaran orang-orang tercintaku. **Titin Oktavia dan Najmila Fitri Syartio**, motivasi terbesarku, kubertahan untuk kalian. Orang tuaku: **Ayahanda Basri Mu'is DT. Mongguang dan Zulidar (Alm)**, **Ibunda Zuraida dan Yulinar** serta seluruh keluargaku tercinta, semoga hasil semua ini membuat kalian bangga. Teriring do'a semoga **Allah SWT** membalasnya dengan limpahan berkah dan rahmat-Nya.

Teruntuk keluarga besar **Shimaboerha**: Uwo Dainah, Etek Nelih/Pak Etek Ajo, Mak Jan/Tek Eni dan keluarga, Mak Hen/Tante Ety dan keluarga, Mak Ucan/Tante Wit dan keluarga, Mak Jin, terima kasih atas do'a dan spiritnya. Untuk adik-adikku: Maizon Putra, S.Pd/Rusyda Aulia, S.Si beserta ananda Adzani semoga kalian rukun, damai dan sejahtera di rantau (Bengkulu). Uni Mul dan keluarga di Solok: salam rindu dari kami. Joep, Gen, Rani, Ojha, Puji, dan Rio, terima kasih atas bantuan kalian yang telah menjaga Uni dan Lala, serta sudah menjadi ojek Parit-Sp.Salak. Keluargaku di Padang Rantang: Uni Liani dan keluarga, Ni Ta dan keluarga, Ni El dan keluarga, maaf, belum bisa mengabdikan di Padang Rantang, InsyaAllah suatu saat nanti. Untuk *My New Family* di Pampangan: Ibu Osmizar, Bapak Galib, *OGA Brothers*: Vebi, Akhir, Ikhsan, Havizh, terima kasih telah menjadi keluarga baruku, semoga silaturahmi ini tetap terjalin, dan terima kasih juga untuk segalanya, semoga Allah SWT membalasnya.

Buat saudara dan sahabat seperjuangan: Tifa, Chika, Ibet, Yora, Mimi, Dory dan Rudi (*Funtastic 8*), tetap kompak, dan jaga persaudaraan kita sampai kapanpun. Fidel, Edo, Aris, Arfan, Syaikul, Asep, Farid, Jhon, Dory, Rudi, Ari (*6 Σ Brothers*), semangat kalian telah membuatku tegar, kalian juga bisa, dan ingat tanggal perjanjian kita! Buat seluruh teman-teman **angkatan 2006 NR/R: Keep spirit and Let's make a big change for Agriculture future with our hand**. Senioriku: **angkatan 2005, 2004, 2003**, (Werry,SP, Ade,SP, Wulan,SP, Riska,SP, Dedek,SP, Heru,SP, Adit,SP, Wandri/Winda,SP (terima kasih pembimbing tigaku!), Ajo, Adek, SP, Mamak, SP, Ardhi CK,SP, Venno, dan semua yang telah jadi SP), dan Junioriku: **angkatan 2007, 2008, 2009, 2010**, mari kita buat bangga almamater kita! Teman-teman di **POPMASEPI, HIMASEKTA, UKS, PIKA, Andalaswara**, terima kasih atas pembelajaran dan kebersamaan ini, semoga tetap jaya!

Terima kasih buat **One Yarma** yang telah menampung kami selama 4 tahun ini, semoga Kost One selalu ramai dan damai. Anggota **Kost PK Yose**, Rian C.S.Si, Beny, Derry, Albert, Bai, Ef, C.S.Pt, Doris, C.ST, dr. Budi, Edo, Iqhfal, juga **alumni Kost PK**: Bripda Zuyu, S.Pt, Doni, S.IP, Divo, SE, Hardi, S.Si, Asrul, S.Pt, Nanda S, Pt, Adon, S.Pt, dan Ari, S.Si, terima kasih atas kebersamaan ini dan maaf atas kesalahan yang mungkin telah membuat kita menjauh, semoga kekeluargaan ini dapat kita pertahankan. Saudara-saudaraku **anggota KKN Cinta Maju Durti**: Wandu,SH, Cece,SE, Angga,C.SS dr. Silfi, Neni,C.SP, dan Yogi,C.ST, terima kasih atas segala yang tak terucap (40 hari menjadi keluarga).

Buat Dila,SP, (saudara kandung), Yanti,SP, Ija,SP, Tika,SP, Ryka,SP, Ari,SP dan **anak-anak bimbingan Pak Endry dan Pak Cipta** yang lain, mari kita buat papi kita tercinta bangga, do'akan beliau selalu dalam lindungan Allah SWT serta dimudahkan segala urusan beliau, amien. Buat Popy, Icha Thessia, Dhian, Yuni, Ibet, Pebri, Ria, Cindy, SP, Ami Sukma, SP, Megi, Desy, Fani, dll, perjuangan harus dengan semangat, terima kasih atas semangat kalian selama ini.

BIODATA

Penulis dilahirkan di Payakumbuh, Sumatera Barat pada tanggal 4 Juni 1976 sebagai anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan **Bapak Basri Mu'is** dan **Ibu Zuraida**. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di SD Negeri 01 Lampasi Payakumbuh (1983-1989). Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ditempuh di SLTP Swasta MTI Koto Panjang Lampasi Payakumbuh, lulus pada tahun 1992. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ditempuh di MAN 1 Payakumbuh, lulus pada tahun 1996. Pada tahun 2006 penulis diterima di Fakultas Pertanian Universitas Andalas Program Studi Agribisnis Reguler Mandiri Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian atas biaya dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selama duduk di bangku perkuliahan, penulis aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan, diantaranya: Sekretaris Umum DPW I Sumatera Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (POPMASEPI) dari tahun 2009 sampai sekarang, Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (HIMASEKTA) periode 2008/2009, Ketua Bidang Syarhil Qur'an Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengembangan Ilmu Kandungan Al Qur'an (PIKA) periode 2009/2010, anggota bidang vokal Unit Kegiatan Seni Fakultas Pertanian (UKFP) periode 2007/2008, serta ikut dalam berbagai kepanitian di tingkat Fakultas maupun di tingkat Universitas

Tahun 1997 hingga tahun 2003, penulis bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap bagian Tata Usaha bidang Kesiswaan di MAN.1 Payakumbuh, kemudian pada tahun 2003 penulis diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Lima Puluh Kota. Saat ini penulis masih tercatat sebagai salah seorang staf (PNS) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tanggal 9 Maret 2001, penulis menikah dengan **Titin Oktavia** dan dikarunia seorang putri yang diberi nama **Najmila Fitri Syartio** (8 tahun).

Padang, Agustus 2010

Syahrul Wadi

KATA PENGANTAR



Kalimat puji dan rasa syukur penulis serahkan hanya kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada ummat-Nya, sehingga dengan izin-Nya penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: **“Analisis Fungsi LKM-A ”Suri Indah” Gapoktan Sinamar dalam Mengelola Dana Program BLM-PUAP Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota”**.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak DR. Ir. Endry Martius, M.Sc. dan Bapak Cipta Budiman, S.Si, M.M. sebagai dosen pembimbing penulis, yang telah banyak memberi bimbingan bagi penulis dalam pembuatan skripsi ini. Selanjutnya terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Pertanian, Pembantu Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Sosial Ekonomi, seluruh Dosen Pengasuh mata kuliah di Jurusan Sosial Ekonomi dan Fakultas Pertanian, seluruh karyawan serta rekan-rekan penulis di Fakultas Pertanian. Penghargaan dan rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Ir. M. Refdinal, M.Si, Ibu Dr. Ir. Nurnayetti, M.Si, Ibu Ir. Syahyana Raesi, M.Sc, Bapak Ferdhinal Asful, M.Si, selaku dosen penguji dan dosen undangan atas masukan, saran dan penilaian yang telah diberikan dalam ujian dan seminar yang telah penulis laksanakan.

Buat Bapak Hafrizal Har, selaku Ketua Pengurus Gapoktan Sinamar, Ibu Wiwid Defrianti, Malpinas, Sri Gustia dan Nova Silvia sebagai pengelola LKM-A Suri Indah, Bapak Syaiful Hadi, A.Md. dan Ibu Henni Karmila, S.TP, sebagai petugas PMT, terima kasih yang tak terhingga penulis rangkai dalam kalimat ini, kerjasama dan bantuan Bapak/Ibu menjadikan penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih juga buat Bupati Lima Puluh Kota, Bapak Kepala Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan studi ini. Untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian dan pembuatan skripsi ini, semoga Allah SWT menjadikannya suatu amal ibadah disisi-Nya.

Selayaknya karya manusia biasa, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan masukan, kritikan, dan saran dari semua pihak agar kekurangan tersebut dapat diperbaiki dimasa mendatang. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memenuhi fungsinya dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengannya.

Padang, Agustus 2010

S.W

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian ..	8
1.4. Manfaat Penelitian..	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Lembaga Keuangan Mikro dan Fungsinya	9
2.2. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)..	12
2.2.1. Karakteristik LKM-A	14
2.3. Sistem Pengelolaan Dana di LKM-A.....	15
2.3.1. Pengelola LKM-A	15
2.3.2. Syarat menjadi pengelola LKM-A	18
2.3.3. Keanggotaan	19
2.3.4. Pembinaan LKM-A	21
2.4. Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP).....	22
2.5. Kedudukan dan Fungsi LKM-A dalam Lembaga Gapoktan.....	25
2.6. Tinjauan Tentang Kredit Pertanian	27
2.7. Dinamika Kelompok dan Pendekatan Partisipatif	29
2.8. Penelitian Terdahulu	30

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	32
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.2. Metode Penelitian	32
3.3. Teknik Pengambilan Responden	34
3.4. Metode Pengumpulan Data	37
3.5. Variabel yang Diamati	38
3.6. Analisa Data	41
3.7. Definisi Operasional	42
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	47
4.1. Gambaran umum wilayah kerja LKM-A Suri Indah	47
4.1.1. Kondisi Geografis Nagari Sungai Rimbang	47
4.1.2. Penduduk dan potensi Nagari Sungai Rimbang	48
4.2. Profil LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar	49
4.2.1. Sejarah dan Tujuan Pendirian LKM-A Suri Indah	49
4.2.2. Organisasi	50
4.2.3. Permodalan	52
4.2.4. Keanggotaan	54
4.2.5. Usaha, Produk dan Perkembangannya	55
4.3. Deskripsi Pengelolaan Dana Program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar	57
4.3.1. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan dana BLM-PUAP	57
4.3.2. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan oleh LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar	61
4.3.3. Proses Dana Bergulir dalam Kelompok	63
4.4. Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor Keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam Mengelola dana Program BLM - PUAP secara Partisipatif	65
4.5. Analisa Fungsi (Kinerja) LKM-A Suri Indah dalam Mengelola Dana Program BLM-PUAP	69
4.5.1. Permodalan	70
4.5.2. Kualitas Aktiva Produktif	73

4.5.3. Manajemen	75
4.5.4. Efisiensi	76
4.5.5. Likuiditas	77
4.5.6. Kemandirian dan Pertumbuhan	79
4.5.7. Jatidiri LKM-A	80
4.5.8. Tingkat Kesehatan (Kinerja) LKM-A Suri Indah	81
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1. Kesimpulan	86
5.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	94

DAFTAR GAMBAR

<u>Gambar</u>		<u>Halaman</u>
1	Kedudukan LKM-A dan usaha otonom lainnya dalam Gapoktan.....	26
2	Dokumentasi Pelaksanaan FGD	66

DAFTAR TABEL

<u>Tabel</u>		<u>Halaman</u>
1	Rincian Responden	34
2	Identitas dan Karakteristik Peserta FGD	35
3	Jenis data, teknik dan sumber data	37
4	Aspek dan bobot peniaian kinerja LKM-A	42
5	Gambaran umum wilayah penelitian	47
6	Lembaga-lembaga keuangan lainnya di Kec. Suliki dan Nagari Sungai Rimbang	48
7	Keadaan Modal LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009 ...	53
8	Jumlah Anggota LKM-A Suri Indah Menurut Jenis Usaha	54
9	Perkembangan Usaha Pembiayaan (dana PUAP) LKM-A Suri Indah sampai dengan bulan Desember 2009	56
10	Proses Pembuatan Rencana Usaha Gapoktan Sinamar	57
11	Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana PUAP	59
12	Pertimbangan, pelaksanaan dan kendala perguliran dana PUAP kepada anggota	64
13	Komponen dan Jumlah Modal Sendiri LKM-A Suri Indah	70
14	Perhitungan Modal Tertimbang	72
15	Perhitungan ATMR	72
16	Hasil Penilaian Aspek Manajemen	76
17	Dana yang Diterima LKM-A Suri Indah thn 2009	78
18	Hasil Penilaian Kesehatan LKM-A Suri Indah	82

DAFTAR LAMPIRAN

<u>Lampiran</u>	<u>Halaman</u>
1 Kuota lokasi penerima PUAP menurut propinsi tahun 2008.....	94
2 Sebaran lokasi penerima dana PUAP Provinsi Sumatera Barat tahun 2008	95
3 Jumlah LKM-A dan realisasi penyaluran dana PUAP Propinsi Sumatera Barat per-30 Juli 2009	96
4 Daftar nama dan jumlah anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sinamar	97
5 Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan Sinamar	98
6 Perkembangan Dana PUAP di LKM-A Suri Indah dari bulan Februari 2009 s/d Januari 2010	99
7 Daftar Hadir Peserta FGD	100
8 Struktur Organisasi LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar.....	101
9 Neraca LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009	102
10 Rincian Rencana dan Realisasi pencairan dan penggunaan dana PUAP di LKM-A Suri Indah	103
11 Panduan (<i>GuideLine</i>) <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	104
12 Proses Pelaksanaan FGD	106
13 Laporan Rugi/Laba	108
14 Posisi Kekayaan/Modal Bersih	109
15 Laporan SHU tahun 2009	110
16 Pedoman Penghitungan (Rumus Kinerja dan bobot)	111
17 Stándar Perhitungan Kinerja Aspek Permodalan	122
18 Stándar Perhitungan Kinerja Aspek Aktiva Produktif	123

19	Stándar Perhitungan Kinerja Aspek Manajemen	125
20	Stándar Perhitungan Kinerja Aspek Efisiensi	133
21	Stándar Perhitungan Kinerja Aspek Likuiditas	134
22	Stándar Perhitungan Kinerja Aspek Kemandirian	135
23	Stándar Perhitungan Kinerja Aspek Jatidiri LKM-A.....	136
24	Penggolongan Tingkat kesehatan LKM-A	137
25	Prosedur Permohonan dan Pencairan dana PUAP	138
26	Matriks Data Set Penelitian	139

**ANALISIS FUNGSI LKM-A "SURI INDAH" GAPOKTAN SINAMAR,
DALAM MENGELOLA DANA PROGRAM BLM-PUAP
NAGARI SUNGAI RIMBANG KECAMATAN SULIKI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fungsi yang dijalankan oleh LKM-A "Suri Indah" Gapoktan Sinamar dalam mengelola dana program BLM-PUAP Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah; (2) mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP secara partisipatif; dan (3) menganalisa kinerja LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*). Pengambilan data dilakukan melalui *key informan* yang terdiri dari: a) Penyelia Mitra Tani (PMT); b) Manajer Umum LKM-A Suri Indah; dan c) Pengurus Gapoktan Sinamar. Sedangkan peserta *Focus Group Discussion* (FGD) terdiri dari unsur: a) PMT; b) anggota Gapoktan Sinamar; c) perangkat nagari; d) masyarakat sekitar LKM-A; e) pengelola LKM-A; dan f) pengurus Gapoktan. Data yang dikumpulkan dari responden-responden tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder yang dianalisa secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian memaparkan bahwa pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar telah merujuk kepada aturan-aturan yang ditetapkan Kementerian Pertanian, dan juga menerapkan kebijakan-kebijakan lokal yaitu: a) pembentukan Badan Penyelamat Keuangan (BPK); dan b) adanya Studi Kelayakan Usaha oleh pengurus Gapoktan. Perbedaan antara rencana dan realisasi sebagai akibat dari keterlambatan pencairan dana ke rekening Gapoktan, pertimbangan terhadap usaha anggota, dan pertimbangan terhadap watak/karakter calon peminjam. Pelaksanaan FGD merumuskan 5 poin penting dalam pengelolaan bantuan modal, yaitu: 1) mudah diterima oleh masyarakat (*acceptable*); 2) dipertanggungjawabkan (*accountable*); 3) berorientasi ekonomis (*profitable*); 4) dapat dilestarikan (*sustainable*); dan 5) mudah digulirkan dalam masyarakat (*replicable*) dengan perhatian utama pada poin *accountable*. Kinerja LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP berprediket "**cukup sehat**" yang berarti LKM-A Suri Indah sudah cukup baik dalam pengelolaan dana bantuan modal, dengan kelemahan terdapat pada aspek likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri LKM-A.

LKM-A Suri Indah disarankan untuk memperluas wilayah kerja dan mempersiapkan diri menjadi Bank Tani, melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk pengembangan SDM dan usahanya serta perlu peningkatan partisipasi anggota untuk meningkatkan kinerja yang lemah. Dukungan berbagai pihak terutama pemerintah diperlukan, serta adanya pengawasan secara *bottom-Up* dan perbaikan kebijakan birokrasi pencairan dana bantuan modal.

**ANALYSIS THE FUNCTION OF SINAMAR FARMER GROUP
"SURI INDAH" MFI-A IN MANAGING THE BLM-PUAP FUND PROGRAM
SUNGAI RIMBANG VILLAGE SULIKI SUBDISTRICT
LIMA PULUH KOTA REGENCY**

ABSTRACT

This study investigated the function which is run by the Sinamar Farmer Group Union "Suri Indah" MFI-A, in managing the Sungai Rimbang village Suliki Subdistrict Lima Puluh Kota Regency's BLM-PUAP program funds at 2009. The purpose of this study are: (1) Describe the management of the Suri Indah MFI-A BLM-PUAP's funds program , (2) Identify and analyze the factors that affect the function of the Suri Indah's MFI-A in managing the BLM-PUAP's funds program in participatory manner; and (3) Analyze the performance of Suri Indah MFI-A in managing the BLM-PUAP funds program.

This research used descriptive method with case study design. Data collection was done by through key informants consisting of: 1) Mitra Tani Supervisor, 2) Suri Indah MFI-A's General Manager, 3) Sinamar Farmer Group Union's board. The participants of Focus Group Discussion (FGD) consisting from elements: a) PMT; b) Sinamar Farmer Group Union's members; c) Nagari device; d) The community around the MFI-A; e) The manager of the MFI-A; and f) Farmer Group Union's board. The data which was collected from the respondents above is composed of primary and secondary data that is analyzed in qualitative description and quantitative description.

The research's result presented that the management of BLM-PUAP program funds in Sinamar Farmer Group Union Suri Indah MFI-A has been referred to the rules established by the Ministry of Agriculture, and also implement the local policies, that is: a) Forming BPK, and b) The existance of Business Feasibility Study by the Farmer Group Union's board. The difference between plan and realization is as a result from the delays of funds disbursement to the Farmer Group Union's account, consideration to the members's business, and consideration to the nature / character of prospective borrowers. Implementation of FGDs formulate five essential points in managing capital assistance, which are: 1) Easy to be accepted by the community (acceptable); 2) Accountable; 3) Economically oriented (profitable); 4) can be preserved (sustainable), and 5) easy to be rotated in the society (replicable) with the points accountable as it's main focus. Suri Indah MFI-A performance in managing the BLM-PUAP funds program has "quite healthy" predicate, which means Suri Indah MFI-A is already good enough in managing the capital assistance fund, with weaknesses in aspects of liquidity, independence and growth, and MFI-A aspects of identity

Suri Indah MFI-A is advised to expand it's working area and prepare to be a Farm Bank, to joint venture with other financial institutions for human resource development and developing it's business, also need to increase the members's participation to improve the weak performance. Support from various parties, especially the government is required, and the existence of surveillance through bottom-up and improvement of bureaucratic policies of capital disbursement.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Pertanian semenjak dicanangkan pada Repelita I telah mencapai usia 40 tahunan, namun pencapaian peningkatan produksi, kemandirian, dan kesejahteraan petani masih jauh dari harapan. Pada tahun 1984, Indonesia pernah mencapai swasembada beras, namun status ini hanya sementara. Saat ini produksi pertanian sangat sulit ditingkatkan karena tidak mampu mengejar tingkat konsumsi, sehingga tidak dapat menghindarkan import berbagai komoditas pangan. Selain itu, perekonomian nasional menghadapi berbagai masalah, antara lain tekanan pasar bebas dunia, krisis ekonomi, perubahan iklim serta bencana alam (Mayrowani, 2008).

Menyikapi hal tersebut, saat ini pemerintah perlu membuat program-program pembangunan pertanian yang benar-benar efektif untuk menyelamatkan bangsa ini dari kelaparan, kemiskinan, pengangguran dan ketergantungan dari luar negeri. Sasaran tersebut telah diusahakan tercapai oleh pemerintah dengan menerbitkan beberapa kebijakan pembangunan pertanian dan mengimplementasikan berbagai program dengan anggaran yang terbatas (Departemen Pertanian, 2007).

Peran Pemerintah untuk mendukung pembangunan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan cara antara lain: (1) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana fisik yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan publik untuk mendukung sektor pertanian serta lingkungan usaha secara luas; (2) fasilitasi dalam rangka percepatan pembangunan wilayah; (3) fasilitasi untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan kreatifitas dan kegiatan ekonomi masyarakat serta merangsang tumbuhnya investasi masyarakat dan dunia usaha; (4) penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat pelaku pembangunan pertanian (Departemen Pertanian, 2007).

Semua peran pemerintah tersebut diatas sudah banyak diwujudkan dalam bentuk kebijakan pembangunan pertanian, dan pemberdayaan masyarakat miskin, khususnya dalam kebijakan pembiayaan pertanian dengan berbagai pola. Pembiayaan merupakan salah satu komponen strategis dalam revitalisasi

pertanian. Secara garis besar, kebijakan pembiayaan pembangunan pertanian mencakup dua hal, yaitu: (1) kebijakan pembiayaan pembangunan pertanian yang memprioritaskan anggaran disektor pertanian dan sektor pendukungnya; dan (2) kebijakan pembiayaan pertanian yang mudah diakses oleh masyarakat (Departemen Pertanian, 2005)

Kedua kebijakan diatas sebetulnya telah banyak dan sudah cukup lama dilakukan Departemen Pertanian melalui penerapan sejumlah program, seperti Kredit Usaha Tani (KUT), Proyek Peningkatan Pendapatan Petani-nelayan Kecil (P4K), Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Peralihan atau pergantian dari satu program/proyek ke program/proyek lainnya disamping memperkaya khasanah pembiayaan pertanian, beberapa diantaranya juga dimaksudkan sebagai kebijakan alternatif yang diharapkan implementasinya lebih efektif dibandingkan program sebelumnya (Iqbal dan Darwis, 2006).

Salah satu diantara kebijakan alternatif yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah untuk mempercepat tumbuh dan berkembangnya usahatani khususnya usaha agribisnis sekaligus mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan adalah Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP). Program ini terintegrasi dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) yang dicanangkan Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu Sulawesi Tengah (Departemen Pertanian, 2009).

Program PUAP ini tidak sama dengan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Sebagai ilustrasi, kalau BLT dengan memberikan ikannya, PUAP atau BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) memberikan kailnya sekaligus memberitahukan bagaimana caranya memancing. Tujuan digulirkannya Program PUAP ini adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah, melalui koordinasi Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) sebagai organisasi petani. Meningkatkan fungsi Gapoktan sebagai lembaga ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dan akses pasar. Meningkatkan

kinerja program-program Departemen Pertanian yang telah ada sebelumnya, utamanya dalam memfasilitasi akses permodalan petani untuk mendukung usaha agribisnis perdesaan dan serta mengurangi kemiskinan dan pengangguran di perdesaan (Departemen Pertanian, 2009).

Penyaluran dana program BLM-PUAP melalui Gapoktan tersebut dilakukan dengan berbagai pola dan pendekatan di berbagai daerah sasaran program. Namun sasaran yang utama adalah peningkatan kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola manajemen dan usaha ekonomi kelompok. Dengan adanya program PUAP, pengelola Gapoktan mendapat pelatihan dan pendampingan dari PMT, terutama dalam administrasi dan pembukuan. Sasarannya, pada tahun ke-2 mulai terbangun usaha simpan pinjam dan pada tahun ke-3 dapat ditumbuhkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) (Sinaraya, J.F dan Agustin, N.K, 2009).

Pengembangan dan pemberdayaan LKM-A sebagai lembaga yang mengakar di masyarakat perdesaan terutama dalam penyaluran dan pengelolaan dana program BLM-PUAP, seperti yang dikemukakan Krisnamurti (2005) dalam Ashari (2009), merupakan langkah yang tepat dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi rakyat. Keuntungan dari pola semacam ini adalah: 1) biaya relatif murah; 2) dana program akan utuh (bahkan bertambah); 3) mendidik masyarakat untuk lebih akses ke lembaga keuangan; serta 4) LKM yang bagus kinerjanya dan berlokasi di perdesaan dapat dijadikan mitra bagi pemerintah dalam pelaksanaan kredit program.

Penumbuhan dan pengembangan LKM-A di Provinsi Sumatera Barat, diterapkan dengan kebijakan pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di setiap Gapoktan penerima bantuan dana BLM-PUAP yang belum memiliki unit usaha LKM-A, kebijakan ini didukung oleh Surat Edaran dari gubernur bahwa pencairan dana PUAP harus melalui LKM-A. Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadikan dana PUAP sebagai penguatan modal atau dana awal untuk penumbuhan LKM-A pada Gapoktan di 204 nagari pada Tahun Anggaran 2008. LKM-A diharapkan menjadi lembaga pengelola dana PUAP agar menjadi produktif dan efektif untuk kepentingan usaha masyarakat tani, dan khususnya masyarakat miskin di nagari. LKM-A secara bertahap

diharapkan berkembang menuju lembaga keuangan mikro yang profesional, melalui pendampingan oleh Penyelia Mitra Tani (PMT) dan Penyuluh Pendamping. Sasaran akhirnya adalah LKM-A yang berada dibawah naungan Gapoktan menjadi lembaga keuangan yang mampu mendorong pembangunan ekonomi nagari dalam arti luas (BPTP Sumatera Barat, 2008).

Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2008 telah ditetapkan kuota sebanyak 208 Gapoktan oleh Departemen Pertanian (Lampiran 1) sebagai penerima dana program BLM-PUAP tersebut. Dari 19 Kabupaten dan Kota yang ada di provinsi ini, 12 (dua belas) diantaranya merupakan daerah-daerah yang masuk ke dalam rencana sebaran daerah penerima dana program BLM-PUAP tahun anggaran 2008 (Lampiran 2), namun dari 208 kuota Gapoktan yang telah direncanakan untuk tahun 2008 tersebut, hanya 204 Gapoktan/LKM-A yang menerima dana tersebut, sedangkan sisanya terkendala, terutama masalah administrasi dan diutamakannya daerah terpencil dan desa miskin untuk mendapatkan dana PUAP ini.

Demikian juga dengan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada awalnya hanya 30 Gapoktan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian sebagai penerima dana PUAP, karena 12 Gapoktan selebihnya terkendala masalah tersebut diatas, namun setelah dilakukan perbaikan dan verifikasi data, akhirnya 12 Gapoktan tersebut dapat memenuhi ketentuan persyaratan penerima dana PUAP. Sehingga Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penerima program BLM-PUAP di Provinsi Sumatera Barat yang jumlah Gapoktan-nya paling banyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, dimana untuk tahun anggaran 2008 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditetapkan sebanyak 42 Gapoktan penerima dana BLM-PUAP. Jumlah LKM-A yang terbentuk dan realisasi penyaluran dana PUAP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan 30 Juli 2009 telah mencapai 72,10%, dengan target dana Rp. 4.200.000.000,- (Lampiran 3).

Gapoktan Sinamar yang terletak di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki adalah salah satu Gapoktan penerima dana BLM PUAP tahap I bersama Gapoktan lain di Kabupaten Lima Puluh Kota. Menurut Penyelia Mitra Tani (PMT) Kabupaten Lima Puluh Kota, Gapoktan ini termasuk kategori baik dalam perkembangan Gapoktan dan pengelolaan dana BLM PUAP di Kabupaten Lima

Puluh Kota tahun 2009. Gapoktan Sinamar mengelola dana BLM PUAP ini melalui unit usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) "Suri Indah" sebagai salah satu usaha otonomnya disamping usaha-usaha lain.

1.2. Perumusan masalah

Pengalaman menunjukkan bahwa dana bantuan program pemerintah selama ini sulit digulirkan dan bahkan cenderung tidak produktif, karena tidak adanya lembaga pengelola keuangan. Sasaran dana bantuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat tani sulit berkembang dan bahkan tidak tercapai. Oleh karena itu kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana program BLM-PUAP melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) diyakini sebagai suatu alat pembangunan yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan. LKM-A memungkinkan orang kecil dan rumah tangga berpenghasilan rendah untuk memanfaatkan peluang ekonomi, membangun aset dan mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal (Hendayana dan Bustamam, 2008).

Penumbuhan LKM-A dilangsungkan setelah terbentuknya Gapoktan di nagari/kelurahan penerima dana program BLM-PUAP. LKM-A berperan sebagai lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan, dimiliki dan dikelola bersama warga masyarakat agribisnis dalam Gapoktan untuk mendukung permodalan usaha anggotanya. LKM-A harus menjalankan fungsinya sebagai: 1) Fungsi bisnis: melakukan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, antara lain dengan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya dan lebih lanjut kegiatan menabung; 2) Fungsi sosial: menggalang dana sosial yang ada di masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerima, terutama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Sebagai salah-satu wadah bagi para petani di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengakomodasi kepentingan secara bersama-sama, maka telah dibentuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dengan nama Gapoktan Sinamar. Wadah ini berdiri atas dasar kemauan dan kesepakatan kelompok-kelompok tani yang ada di kanagarian tersebut yang menjadi cermin solusi atas permasalahan-permasalahan yang

dihadapi para petani dengan tujuan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan mereka. Gapoktan Sinamar didirikan pada tanggal 25 Mei 2007 di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota yang diketuai oleh Hafrizal Har, dengan jumlah Kelompok Tani (Poktan) yang bergabung sebanyak 12 kelompok dan 314 orang anggota (Lampiran 4). Namun sesuai dengan persyaratan untuk memperoleh dana program PUAP, maka Gapoktan ini baru di SK-kan oleh Bupati Lima Puluh Kota bersama Gapoktan lain pada tanggal 7 Juli 2008.

Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) pemanfaatan dana PUAP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 dimana Gapoktan harus membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) sebagai unit Usaha Gapoktan yang mengelola dana PUAP tersebut, maka pada tanggal 28 Juli 2008 Gapoktan Sinamar membentuk LKM-A yang diberi nama LKM-A Suri Indah sebagai wujud pengembangan Unit Simpan Pinjam yang telah ada sebelumnya. Kemudian sebagai acuan dan pedoman bagi LKM-A Suri Indah dalam menjalankan fungsi dan usaha-usahanya, maka perlu dibentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan juga penyiapan administrasi untuk peminjaman dan pengembalian, seperti slip pinjaman, slip setoran, surat perjanjian dan lain-lain. Sehingga LKM-A ini baru mulai beroperasi secara resmi semenjak disyehkannya AD/ART pada tanggal 27 Januari 2009.

LKM-A Suri Indah difungsikan oleh Gapoktan Sinamar sebagai unit usaha yang mengelola khusus pembiayaan dan permodalan bagi anggota-anggotanya. Terkait dengan dana program BLM-PUAP, LKM-A Suri Indah adalah sebagai penyalur dana tersebut kepada anggota Gapoktan Sinamar sesuai dengan RUB (Lampiran 5), RUK dan RUA. Dana yang masuk ke rekening Gapoktan selanjutnya diserahkan kepada pengelola LKM-A Suri Indah, kemudian disalurkan kepada anggota sebagai pinjaman menurut ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh LKM-A dan Gapoktan.

Semenjak digulirkannya dana program BLM-PUAP kepada anggota oleh LKM-A Suri Indah, perkembangan dana tersebut menunjukkan perkembangan sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 6. Dimana, sampai dengan bulan

Januari 2010, jumlah dana sudah berkembang menjadi Rp. 257.700.000,-, termasuk didalamnya dana program BLM-PUAP sebesar Rp. 100.000.000,-.

Secara data, pengelolaan dana program BLM-PUAP yang dilakukan oleh LKM-A Suri Indah menunjukkan perkembangan yang baik, namun berdasarkan analisa data survey pendahuluan yang diperoleh, penulis menemukan masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pengelola LKM-A Suri Indah. Permasalahan tersebut menyangkut aspek organisasi, pembukuan, data pelaporan yang berbeda, dan kerancuan sistem pengelolaan antara AD/ART dengan kenyataan di lapangan serta adanya aturan-aturan tertentu (informal) yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya.

Idealnya, pengelolaan bantuan modal usaha ini pada intinya harus menciptakan surplus usaha dan dikelola dengan menggunakan prinsip; 1) mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran (*acceptable*); 2) dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); 3) memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); 4) hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri (*sustainable*); dan 5) pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*) (Sumodiningrat *et al.* 2003).

Uraian dan kondisi diatas mengundang persoalan sebagai berikut: (1) Bagaimana LKM-A Suri Indah menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana program BLM-PUAP di Gapoktan Sinamar? (2) Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah? Untuk menjawab persoalan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang **"Analisis Fungsi LKM-A "Suri Indah" Gapoktan Sinamar dalam Mengelola Dana Program BLM-PUAP Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota"**.

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi yang dijalankan LKM-A Suri Indah sebagai salah satu unit usaha otonom Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang dalam mengelola dana program BLM-PUAP.

Secara rinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar.
2. Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP secara partisipatif.
3. Menganalisa kinerja LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM PUAP

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat yang berguna bagi :

1. Pemerintah, sebagai bahan evaluasi terhadap program yang sedang dijalankan, juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat dan menetapkan program-program dimasa yang akan datang, khususnya program-program penguatan modal atau pembiayaan pertanian, serta penumbuhkembangan dan memberdayakan LKM-A.
2. LKM-A Suri Indah dan Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menjalankan usaha-usahanya, sehingga kelompok tersebut dapat lebih berkembang dan mandiri dengan adanya bantuan dari pemerintah.
3. Mahasiswa dan atau peneliti selanjutnya, penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan referensi dalam membahas lebih dalam tentang pembiayaan pertanian dan LKM-A.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan Mikro dan Fungsinya

Definisi lembaga keuangan menurut UU No. 14/1976 Pasal 1 tentang Pokok-pokok Perbankan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya kedalam masyarakat (Suyatno, T *et al.*, 2007).

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit Summit (1997) dalam Ashari (2006), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Asian Development Bank (ADB) dalam Ashari (2006) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment service*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.

Menurut Krishnamurti (2005) dalam Ashari (2006), walaupun terdapat banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga elemen penting dari berbagai definisi tersebut. *Pertama*, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito, maupun asuransi. *Kedua*, melayani masyarakat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada, sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. *Ketiga*, menggunakan prosedur dan

mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel.

Keuangan mikro kini dianggap sebagai terobosan institusional untuk melayani pembiayaan masyarakat perdesaan, perkotaan dan para pengusaha mikro. Keuangan mikro supaya terfokus, profesional dan efektif secara luas dalam melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang betul-betul membutuhkan, maka *Microcredit Summit dalam* Ismawan (2003) mensyaratkan 4 prinsip utama yang harus dipertimbangkan dalam merencanakan Lembaga Keuangan Mikro, yaitu:

1. *Reaching the poorest. The poorest* yang dimaksud adalah masyarakat yang paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (*economically active*). Secara internasional mereka dipahami merupakan separo bagian bawah dari garis kemiskinan nasional.
2. *Reaching and empowering women*. Wanita merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus utama. Disamping itu, dari pengalaman lapangan di berbagai negara menunjukkan bahwa wanita merupakan peminjam, pemakai dan pengembali kredit yang baik.
3. *Building financially sustainable institution*. Agar secara terus menerus dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka finansial kelembagaan tersebut harus terjamin berkelanjutan.
4. *Measurable impact*. Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan.

Secara spesifik dalam konteks pembangunan ekonomi perdesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian, potensi yang dapat diperankan oleh LKM dalam memacu pertumbuhan ekonomi sangat besar. Hal ini dikarenakan: (1) LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan perdesaan, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh petani/pelaku ekonomi di desa. (2) Petani/masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur. (3) Karakteristik usahatani umumnya membutuhkan *platfond* kredit yang tidak terlalu besar, sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM. (4) Dekatnya lokasi

LKM dan memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani, sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah; (5) Adanya keterkaitan *socio-cultural* serta hubungan yang bersifat personal emosional diharapkan dapat mengurangi sifat *moral hazard* dalam pengembalian kredit (Ashari, 2006).

Menurut Ismawan (2003), setidaknya terdapat beberapa hal yang diperankan LKM yaitu:

1. Mendukung pemerataan pertumbuhan

Pelayanan keuangan mikro secara luas, secara efektif akan terlayani berbagai kelompok usaha mikro, maka perkembangan usaha mikro yang kemudian berubah menjadi usaha kecil, hal ini akan memfasilitasi pemerataan pertumbuhan.

2. Mengatasi kesenjangan kota dan desa

Akibat jangkauan lembaga keuangan mikro yang luas, bisa meliputi desa dan kota, hal ini merupakan terobosan pembangunan. Harus diakui, pembangunan selama ini acap kali kurang adil pada masyarakat desa, sebab lebih condong mengembangkan kota. Salah satu indikatornya adalah dari derasnya arus urbanisasi dan pesatnya perkembangan keuangan mikro yang berkemampuan menjangkau desa, tentu saja akan mengurangi kesenjangan desa dan kota.

3. Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil

Sektor yang selama ini mendapat akses dan kemudahan dalam mengembangkan diri adalah usaha besar, akibatnya timbul jurang yang lebar antara perkembangan usaha besar dan semakin tak terkejar oleh usaha kecil. Dengan dukungan pembiayaan usaha kecil, tentunya hal ini akan mengurangi kesenjangan yang terjadi. Disamping itu, dengan semakin cepatnya perkembangan usaha kecil akan ikut mendukung perkembangan usaha besar, serta sebaliknya.

4. Mengurangi *capital outflow* dari desa-kota maupun daerah-pusat

Masyarakat desa mempunyai kemampuan menabung yang cukup tinggi, terbukti dari akumulasi tabungan yang mencapai 21,8 trilyun rupiah pada BRI Unit Desa. Meski demikian, kemampuan memanfaatkan kredit hanya 9,9 trilyun

pada bulan Januari 2002 atau kurang dari setengahnya (Bank Indonesia). Hal ini memperlihatkan bahwa akses faktor produksi dari masyarakat desa, telah diserap oleh masyarakat kota. Artinya akses pertumbuhan yang dibangun oleh masyarakat desa telah “disedot” oleh masyarakat kota, sehingga kota bisa menjadi lebih pesat sementara desa akan mengalami kemandekan. Sedangkan *capital outflow* dari daerah ke pusat diindikasikan kuat terjadi pula, hal ini dapat dilihat dari perkembangan kota-kota besar yang sedemikian pesat, semakin meninggalkan pertumbuhan daerah. Lembaga keuangan mikro, lebih berkemampuan memfasilitasi agar tabungan dari masyarakat desa atau daerah terkait, dapat memanfaatkan kembali tabungan yang telah mereka kumpulkan.

5. Meningkatkan kemandirian daerah

Dengan adanya faktor-faktor produksi (*capital*, tanah, SDM) yang merupakan kekuatan dimiliki oleh daerah, dimanfaatkan dan didayagunakan sepenuhnya untuk memanfaatkan berbagai peluang yang ada, maka ketergantungan terhadap investasi dari luar daerah (maupun luar negeri) akan berkurang, serta investasi ekonomi rakyat, dapat berkembang pesat. Kemandirian daerah tentu akan berdampak pada kemandirian nasional, sebab nasional terdiri dari daerah-daerah, sehingga dengan sendirinya ketergantungan terhadap utang luar negeri akan berkurang.

2.2. Penumbuhan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)

Menurut Departemen Pertanian (2005) Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) adalah lembaga keuangan mikro yang didirikan dan dimiliki oleh petani/ masyarakat tani di pedesaan guna memecahkan masalah/kendala akses terhadap pelayanan keuangan. LKM-A akan melaksanakan fungsi pelayanan dan simpanan di lingkungan petani dan pelaku usaha agribisnis.

Karakteristik LKM-A dalam memberikan pelayanan keuangan yaitu:

1. Tidak menggunakan pola keuangan perbankan konvensional
2. Mempersyaratkan adanya penjaminan non anggunan
3. Menerapkan proses administrasi yang sederhana dan bertanggung jawab

Agar LKM-A dapat berkembang, tumbuh menjadi kuat dan lestari dalam memberikan pelayanan keuangan kepada para anggota, maka lembaga keuangan

ini perlu memegang teguh dan melaksanakan prinsip-prinsip yang telah teruji sebagai berikut:

- a. Modal LKM-A haruslah bersumber dari anggotanya sendiri (swadaya), yang dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib (dapat ditambahkan dengan Simpanan Pokok Khusus atau "modal penyertaan" sebagai penguat modal, dengan perlakuan seperti investasi anggota pada lembaga keuangan). Selain itu LKM-A dapat membuka berbagai jenis tabungan (simpanan sukarela).
- b. Agar anggota LKM-A mempunyai rasa memiliki yang tinggi, anggota harus dimotivasi oleh pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A untuk mempunyai simpanan pokok khusus (penyertaan modal) di LKM-A. Simpanan pokok khusus ini sama halnya dengan penanaman saham pada lembaga keuangan formal seperti bank.
- c. Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela. Tidak ada paksaan untuk menjadi anggota, dapat menerima warga masyarakat di lingkungannya secara selektif untuk menjadi anggota tanpa membedakan suku, jenis kelamin, agama dan kedudukan sosialnya.
- d. Layanan kredit/pinjaman/pembiayaan hanya diberikan kepada anggota LKM-A saja, tidak boleh kepada bukan anggota.
- e. Mengembangkan pelayanan yang bermutu dan profesional, berorientasi pada fungsi bisnis dan sosial.
- f. Dapat menghargai jasa, kemampuan dan produktifitas orang secara layak dan rasional.
- g. Saling percaya. Setiap anggota harus mengembangkan sikap untuk dapat dipercaya, menepati janji dan dapat mempercayai orang lain.
- h. Kepemimpinan demokratis, ditandai oleh: (i) setiap anggota mempunyai kedudukan yang sama, satu orang anggota satu suara, (ii) anggota berhak mengajukan usul yang harus diperhatikan oleh pengurus, (iii) pengurus dan pengawas dipilih dari dan oleh anggota di dalam rapat anggota pendiri, (iv) manajemen diselenggarakan terbuka. Setiap anggota berhak mengetahui dan memperoleh informasi keuangan secara berkala.

- i. Berusaha untuk mencapai skala ekonomi atau volume usaha yang layak yang menjamin perolehan pendapatan, untuk membiayai pelayanan profesional kepada para anggota, pertumbuhan dan kelestarian.
- j. Mengalokasikan sumberdana yang diperoleh dari pendapatan untuk kegiatan pendidikan secara terus menerus bagi kemajuan anggota dan keluarganya.
- k. Membangun jaringan kerjasama antar LKM-A dan lembaga lain yang lebih luas atas dasar saling menghargai dan saling mengembangkan.
- l. Pembiayaan yang diberikan kepada anggota harus diikuti dengan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan
- m. Jaminan barang boleh diterapkan, namun pertimbangan yang terbaik tetap atas watak/karakter peminjam sendiri dan kelayakan usahanya.

2.2.1. Karakteristik LKM-A

- a. Mandiri: swadaya dan mampu membiayai usahanya sendiri (*cost recovery*)
- b. Profesional: (i) dikelola dengan penuh waktu (*full time*), bukan pekerjaan sampingan, (ii) adanya fasilitas pendampingan dan pelatihan berjenjang, dilengkapi dengan modul-modul aplikatif (*continuous training and technical assistance*), (iii) produk simpanan dan pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat (*demans driven*), (iv) menerapkan sistem, prosedur administrasi dan akuntansi standar lembaga keuangan yang dirancang sederhana, efisien dan efektif, (v) pengelolaan dan pelaporan keuangan secara terbuka.
- c. Mengakar di masyarakat, artinya diinisiasi, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggung jawab (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Pengembangan LKM-A merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat setempat melalui Dewan Pengurus dengan mengarahkan, memotivasi, memantau, mengawasi, dan membina pengelola manajemen LKM-A setempat, dibantu dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan Keuangan Mikro (LPKM), seperti PINBUK (BPTP Sumatera Barat, 2009).

Konsep pengembangan LKM-A diintroduksikan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) pada saat terjadi keterbatasan anggaran pemerintah pada tahun 2004/2005 (defisit). Di pihak lain, Direktorat Pembiayaan, Deptan pada tahun 2001 memformulasikan kebijakan untuk mengoptimalkan sumber dana yang berasal dari luar Deptan seperti lembaga perbankan dan non perbankan, pendanaan dari donor, dan juga pembiayaan yang dikelola oleh masyarakat. Pembentukan LKM-A ini merupakan langkah berikutnya dari program BLM/BPLM, dimana setelah kelompok tani yang mendapat dana BLM telah mampu memupuk modal, diharapkan dapat membentuk LKM. Selain dari penerima BLM, juga dilakukan dengan mengoptimalkan yang telah ada dengan penekanan agar memperluas cakupan pelayanan kepada petani/kegiatan agribisnis. Program yang dilakukan pemerintah pada dasarnya adalah peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penyuntikan modal kerja LKM-A (Ashari, 2009).

2.3. Sistem Pengelolaan Dana di LKM-A

2.3.1. Pengelola LKM-A

Menurut Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Barat (2009) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan PUAP di Sumatera Barat, dipaparkan bahwa sistem pengelolaan dana di LKM-A adalah sebagai berikut:

a. Manajer Umum

- a. Manajer umum bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktifitas operasional LKM-A guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- b. Tanggung jawab manajer umum juga menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus Gapoktan.
- c. Bertanggung jawab untuk operasional yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staf manajemen.

Tugas Utama dan Wewenang :

- a. Membuat dan menerapkan rencana-rencana serta sasaran dari bawahan langsung.
- b. Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi :
 - Rencana Pemasaran
 - Rencana Pembiayaan
 - Rencana Biaya Operasional
 - Rencana Keuangan
- c. Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana:
 - Menyetujui sasaran pemasaran jangka pendek dan jangka panjang.
 - Mengevaluasi pelaksanaan usaha dan melakukan perbaikan bila perlu.
 - Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut serta dalam pembiayaan dan penggalangan dana yang penting bila perlu.
- d. Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
- e. Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordinasi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang telah ditetapkan.
- f. Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara rekan sekerjanya secara fungsional di area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.
- g. Memberikan persetujuan atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, insentif, dengar pendapat dan penghargaan
- h. Mengarahkan persiapan dan penyetujuan anggaran biaya dan operasional pemasaran LKM-A.
- i. Membuat laporan secara periodik kepada pengurus Gapoktan/LKM-A, Badan Pengawas/Dewan Pendiri, berupa:
 - Laporan Pembiayaan Baru

- Laporan Perkembangan Pembiayaan
- Laporan Dana
- Laporan Keuangan

Hubungan Kerja Utama:

- 1) Bekerjasama dengan unit usaha otonom Gapoktan yang ada untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem informasi.
- 2) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.
- 3) Bekerjasama dengan administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dan lain-lain).
- 4) Bekerjasama dengan administrasi dan keuangan untuk membuat target-target finansial LKM-A.
- 5) Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

b. Bagian Keuangan dan Administrasi

Kewenangan bagian ini adalah menangani administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan keuangan.

Tugas-tugas:

1. Mengerjakan Jurnal Buku Besar
2. Menyusun Neraca dan Laporan Rugi/Laba secara periodik.
3. Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana
4. Membantu manajer dalam hal pembuatan arus kas dan budgeting.

c. Bagian Pembiayaan

Bagian ini berwenang dalam melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam, serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.

Tugas-tugas:

1. Menyusun rencana pembiayaan
2. Menerima analisa pembiayaan
3. Melakukan analisa pembiayaan
4. Mengajukan pembiayaan kepada komite
5. Melakukan pembinaan nasabah/anggota
6. Membuat laporan perkembangan pembiayaan

d. Penggalangan Dana

Kewenangan bagian ini adalah melakukan kegiatan pengerahan tabungan anggota/masyarakat sebagai pembangkit modal LKM-A.

Tugas-tugas:

1. Menyusun rencana pengerahan tabungan
2. Merencanakan produk-produk tabungan
3. Melakukan analisa data tabungan
4. Melakukan pembinaan nasabah/anggota
5. Membuat laporan perkembangan tabungan

e. Kasir

Kasir berwenang sebagai penerima dan juru bayar.

Tugas-tugas:

1. Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan.
2. Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer
3. Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
4. Membuat buku kas harian
5. Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer (BPTP Sumatera Barat, 2009).

2.3.2. Syarat untuk Menjadi Pengelola LKM-A

Pengelola LKM-A adalah mereka yang bekerja penuh (sepenuh waktu dan hati) untuk LKM-A. Syarat-syaratnya adalah:

- a. Memiliki landasan iman dan sikap keikhlasan, mampu bekerjasama dalam tim, khususnya dalam menumbuhkembangkan LKM-A;
- b. Memiliki semangat dan komitmen yang kuat membela kaum dhu'afa, orang yang lemah, yang diniatkannya sebagai ibadah;
- c. Amanah, jujur dan berpotensi bekerja secara profesional;
- d. Memiliki keahlian dalam bidang keuangan mikro (BPTP Sumatera Barat, 2009).

2.3.3. Keanggotaan

a. Anggota Biasa:

- i. Anggota LKM-A adalah anggota Gapoktan dan perorangan yang telah dewasa dan memiliki kemampuan hukum yang terdiri atas para anggota kelompok tani dan warga masyarakat umum di lingkungan pemersatunya secara selektif.
- ii. Agar kegiatan pelayanan keuangan dapat tumbuh menjadi besar dan mencapai skala ekonomi yang layak, maka potensi calon anggota harus cukup banyak (minimum 300 orang) terutama para pelaku usaha mikro dan kecil yang memerlukan layanan keuangan, baik tabungan maupun kredit untuk mengembangkan usahanya.
- iii. Keanggotaan seseorang telah dinyatakan syah apabila telah mengajukan permohonan secara tertulis, mendapat persetujuan dalam Rapat Pengurus, telah menyetor Simpanan Pokok dan Wajib sesuai ketentuan, serta memperoleh buku tabungan anggota. Untuk menjadi anggota baru perlu rekomendasi dan jaminan dari seseorang anggota Pengurus/Promotor atau dua orang anggota biasa.
- iv. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menyimpan, meminjam, memperoleh jaminan perlindungan, bagian SHU, hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas di dalam Rapat Anggota.
- v. Setiap anggota berkewajiban untuk mentaati aturan yang telah disepakati dan berdisiplin, baik dalam menabung maupun dalam pengembalian kredit sesuai perjanjian.

- vi. LKM-A yang anggotanya telah lebih dari 100 orang, perlu membentuk kelompok-kelompok anggota (swakarsa) atas dasar kedekatan lokasi usaha atau tempat dengan ikatan bathin yang kuat. Kelompok-kelompok tersebut beranggotakan sekitar 10 orang (rumah tangga), memilih sendiri secara musyawarah ketua dan sekretaris kelompoknya. Kelompok merencanakan sendiri secara musyawarah jadwal pertemuan dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anggotanya.
- vii. Kelompok menjadi media belajar, komunikasi dan partisipasi dalam pengembangan usaha dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan para anggota dan keluarganya.
- viii. Dalam rangka pendidikan dan praktek demokrasi, kelompok dapat digunakan sebagai media bagi anggota perorangan untuk memberikan suara dalam berbagai keputusan organisasi yang penting, seperti pemilihan pengurus baru, amandemen AD/ART dan lain-lain. Para anggota kelompok dapat memberikan mandat kepada seseorang anggota kelompok (ketua, sekretaris atau anggota biasa) untuk hadir mewakili kepentingan para anggota dalam rapat anggota LKM-A.
- ix. Keanggotaan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan pengurus. Apabila seseorang anggota meninggal dunia, salah seorang dari ahli warisnya dapat meneruskan keanggotaannya atas persetujuan pengurus.

b. Anggota Luar Biasa

Yang dimaksud dengan anggota luar biasa adalah:

- i. Perorangan dalam ikatan pemersatu yang hanya memanfaatkan layanan tabungan LKM-A
- ii. Anggota luar biasa hanya memiliki hak bicara, tidak hak suara.
- iii. Keanggotaan luar biasa telah dianggap syah apabila telah mengajukan permohonan secara tertulis, mendapat persetujuan dalam rapat pengurus, telah menyetor jenis tabungan yang diinginkannya (BPTP Sumatera Barat, 2009).

2.3.4. Pembinaan LKM-A

a. Ciri-ciri LKM yang Sehat (BPTP Sumatera Barat, 2009):

1. Jumlah kekayaan yang produktif minimal 80% terhadap seluruh kekayaan, dengan ketentuan: (i) maksimum kas berupa uang tunai tambah tabungan lancar di Bank tidak melebihi 5% dari seluruh kekayaan; (ii) maksimum harta tetap 15% dari seluruh kekayaan.
2. Jumlah modal sendiri tidak kurang dari 25% terhadap seluruh jumlah kekayaan.
3. Tingkat pertumbuhan kekayaan pertahun harus lebih besar dari tingkat inflasi.
4. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) untuk seorang anggota tidak melebihi 25% dari modal sendiri LKM-A.
5. Hutang kepada Bank atau pihak ketiga lainnya maksimum 75% terhadap jumlah kekayaan.
6. Jumlah kekayaan lancar minimum 120% terhadap kewajiban lancar yang harus dibayar.
7. Semua aspek dan fungsi manajemen (perencanaan, pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi) LKM-A berjalan baik.
8. Jangkauan layanan pinjaman merata. Minimal 65% dari jumlah seluruh anggota masih memiliki sisa pinjaman.
9. LKM-A memperoleh tingkat pendapatan lebih besar dibanding rata-rata bunga deposito Bank.
10. Biaya operasional maksimum 50% terhadap pendapatan operasional. Pendapatan operasional adalah penerimaan bunga kredit dikurangi beban biaya dana dari hutang pihak ketiga maupun anggota dalam setahun.
11. Tunggakan maksimum 5% terhadap sisa kredit anggota dan tidak lebih dari separohnya berada pada posisi diragukan dan macet.

b. Perubahan Sikap Anggota yang Diperlukan untuk Membangun LKM-A

1. Sikap meminta-meminta kepada sikap memberi. Perlunya penumbuhan budaya menabung di LKM-A dengan motif untuk membantu orang lain.

2. Cara berfikir jangka pendek menjadi cara berfikir jangka panjang. Perlunya kesadaran bahwa LKM-A perlu waktu untuk berfungsi secara efektif, keberhasilannya tergantung kepada kesabaran, ketekunan dan dukungan penuh semua anggota, tidak berfikiran begitu LKM-A berdiri harus langsung melayani kebutuhan semua anggota.
3. Cara berfikir tidak kritis menjadi cara berfikir kritis. Perlunya masukan dari semua anggota berupa usulan, saran dan pertimbangan dalam rangka perbaikan dan peningkatan pelayanan dan pengelolaan LKM-A
4. Cara berfikir tidak rasional menjadi berfikir rasional. Perlunya perencanaan yang matang dan sistem kerja yang tepat guna.
5. Cara berfikir feodal menjadi cara berfikir syura demokratis. Misalnya dalam rapat jangan hanya didominasi oleh orang tertentu saja. Pemilihan pengurus bukan hanya karena tokoh masyarakat, tapi karena pengetahuan, kemampuan dan waktunya (BPTP Sumatera Barat, 2009).

2.4. Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP)

Program Bantuan Langsung Masyarakat untuk Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) adalah bagian pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran (Departemen Pertanian, 2008).

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) bertujuan untuk: a) mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah; b) meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani; c) memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk mengembangkan kegiatan usaha agribisnis, dan d) meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan (Departemen Pertanian, 2009).

Dana program BLM-PUAP ini berasal dari APBN yang diberikan dalam bentuk hibah kepada Gapoktan. Sedangkan anggotanya yang akan menggunakan, harus meminjam, dan mengangsur pengembaliannya, dengan ketentuan yang dibuat oleh Gapoktan tersebut (Anwari Widodo, 2009). Namun dalam pelaksanaannya, dana tersebut dikelola dan dikembangkan oleh Gapoktan sebagai dana bergulir bagi anggota kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan penerima dana tersebut.

Sasaran pemberdayaan pertanian Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan ini yaitu:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin atau tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa
- b. Berkembangnya 10.000 Gapoktan atau Poktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani
- c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani atau peternak (pemilik atau penggarap) skala kecil, buruh tani; dan
- d. Berkembangnya usaha agribisnis yang mempunyai siklus usaha harian, mingguan, maupun musiman (Departemen Pertanian, 2009).

Indikator keberhasilan output pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan adalah:

- a. Tersalurkannya dana BLM PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota Gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan
- b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola Gapoktan, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani (Departemen Pertanian, 2009).

Indikator keberhasilan *outcome* pemberdayaan masyarakat melalui Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan antara lain:

- a. Meningkatnya kemampuan Gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga petani;
- b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;

- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
- d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah (Departemen Pertanian, 2009).

Sedangkan indikator *benefit* dan *impact* PUAP antara lain:

- a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP;
- b. Berfungsinya gapoktan sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani; dan
- c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan (Departemen Pertanian, 2009)

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada Gapoktan dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin. Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1) keberadaan Gapoktan; 2) keberadaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani ; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan,dll; dan 4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani (Departemen Pertanian, 2009).

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP.
2. Optimasi potensi Agribisnis di desa miskin dan tertinggal
3. Penguatan modal petani kecil, buruh tani, dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan
4. Pendampingan bagi Gapoktan (Departemen Pertanian, 2009).

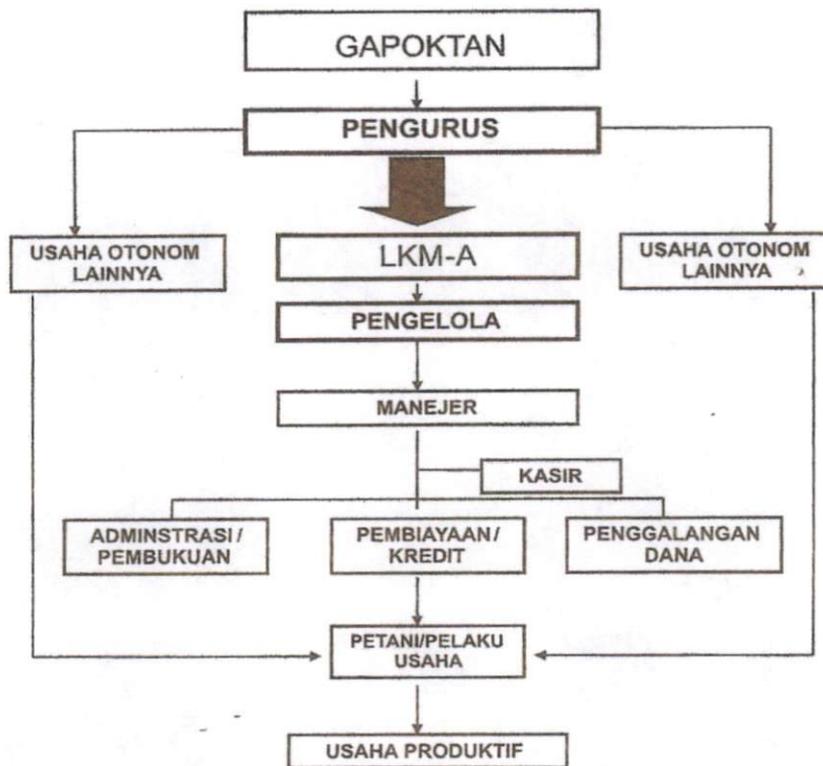
Strategi operasional dari Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui :
 - a. Pelatihan bagi petugas pembina dan pendamping PUAP;
 - b. Rekrutmen dan pelatihan bagi Penyelia Mitra Tani;

- c. Pelatihan bagi pengurus Gapoktan;
 - d. Pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping.
2. Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal, melalui:
 - a. Identifikasi potensi desa;
 - b. Penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan;
 - c. Penyusunan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
 3. Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan, melalui:
 - a. Penyaluran BLM PUAP kepada pelaku agribisnis melalui Gapoktan;
 - b. Fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
 4. Pendampingan gapoktan dillaksanakan melalui:
 - a. Penempatan dan pengurusan Penyuluh Pendamping di setiap Gapoktan;
 - b. Penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten atau kota (Departemen Pertanian, 2009).

2.5. Kedudukan dan Fungsi LKM-A dalam Lembaga Gapoktan

LKM-A adalah salah satu unit usaha otonom yang didirikan dan dimiliki oleh anggota Kelompok Tani yang tergabung dalam Gapoktan. LKM-A bergerak dalam bidang pembiayaan bagi para petani dalam wilayah Gapoktan. Sebagai unit usaha Gapoktan, kedudukan LKM-A sejajar dengan unit usaha lainnya yang ada pada Gapoktan tersebut. Pengurus unit usaha LKM-A adalah pengurus Gapoktan sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam AD/ART Gapoktan. Sedangkan yang mengelola LKM-A adalah beberapa orang yang ditunjuk oleh pengurus LKM-A (Gambar 1). Pengurus LKM-A mengeluarkan surat penunjukkan atau pengangkatan tenaga pengelola LKM-A sesuai struktur organisasi LKM-A tersebut (BPTP Sumatera Barat, 2009).



Gambar 1: Kedudukan LKM-A dan usaha otonom lainnya dalam Gapoktan

Terkait dengan kelancaran program BLM-PUAP, bagi Gapoktan yang baru tumbuh, LKM-A merupakan usaha otonom penting yang perlu dibentuk lebih awal. Tujuannya adalah agar dana program BLM-PUAP dapat dikelola dengan baik dengan memperhatikan penggunaan dana awal adalah untuk bantuan modal bagi para petani yang sudah direncanakan menurut RUA, RUK dan RUB, pengembangan usaha agribisnis di wilayah Gapoktan yang bersangkutan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengurus dan pengelola LKM-A terkait dengan kedudukannya dalam Gapoktan adalah:

1. Berdasarkan perencanaan usaha dan kebutuhan bantuan dana program BLM-PUAP yang dituangkan dalam RUB, sistem penyaluran dananya dari pusat (Deptan) adalah melalui rekening Gapoktan
2. Untuk lebih memfokuskan pengelolaan dana dalam lembaga Gapoktan, maka Gapoktan membentuk sebuah LKM-A yang mendukung pembiayaan usaha agribisnis petani kecil di wilayah kerja Gapoktan.

Secara bertahap LKM-A berkembang menuju lembaga keuangan mikro yang profesional dan berbadan hukum koperasi (Badan Hukum KSP) yang berada di nagari.

3. Kepengurusan Gapoktan (Ketua, Sekretaris dan Bendahara) bisa menjadi pengurus LKM-A, apabila mereka menjadi anggota pendiri LKM-A (memiliki simpanan khusus, simpanan pokok dan simpanan wajib) dan disepakati oleh anggota pendiri dalam forum musyawarah (Rapat Umum Anggota Pendiri).
4. Pengelola LKM-A terdiri dari: (i) manajer, (ii) bagian administrasi/pembukuan, (iii) kasir, (iv) bidang pembiayaan, (v) penggalangan dana;
5. Sistem rekrutmen tenaga pengelola ditentukan dan diangkat oleh pengurus Gapoktan dengan memperhatikan kriteria: (i) mempunyai motivasi kerja yang tinggi, (ii) tenaga pengangguran di nagari, (iii) pendidikan yang memadai;
6. LKM-A dapat lebih berfungsi dalam menggulirkan dana program BLM-PUAP, karena itu perlu dilakukan penguatan LKM-A menuju lembaga keuangan yang profesional (memenuhi persyaratan pendirian LKM);
7. Dana penguatan modal (BLM-PUAP) Rp. 100 juta per nagari/kelurahan dapat dijadikan sebagai modal dasar disamping sumber dana lainnya untuk menumbuhkembangkan sebuah lembaga keuangan mikro di nagari;
8. LKM-A diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga keuangan mikro nagari dengan tujuan mendukung pembangunan ekonomi nagari (BPTP Sumatera Barat, 2009).

2.6. Tinjauan Tentang Kredit Pertanian

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth of faith*). Oleh karena itu dasar dari pemberian kredit adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, dapat berupa barang, uang ataupun jasa (Suyatno *et al*, 2003).

Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian biaya adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil

a. Unsur-unsur Kredit

Menurut Suyatno *et al*, (2003) terdapat beberapa unsur dalam kredit, antara lain:

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of Risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari.
4. Prestasi, atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang dan jasa.

b. Tujuan Kredit

Tujuan kredit yang diberikan adalah:

1. Mencari keuntungan
2. Membantu usaha nasabah
3. Membantu pemerintah (keuntungan bagi pemerintah: 1) penerimaan pajak; 2) membuka kesempatan kerja.

c. Fungsi Kredit

1. Meningkatkan daya guna uang;
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
3. Meningkatkan daya guna barang;
4. Meningkatkan peredaran barang;
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi;
6. Meningkatkan kegairahan berusaha;
7. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
8. Meningkatkan hubungan internasional (Suyatno *et al*, 2003).

2.7. Dinamika Kelompok dan Pendekatan Partisipatif

Menurut Soebiyanto (1998) setiap kelompok pada dasarnya mempunyai dinamika yang berbeda tingkatannya, dan merupakan cara pendekatan yang efektif dalam upaya pemberdayaan petani kearah kemandirian dan ketangguhan berusahatani. Beal *et al.* (1962), dan Cartwright dan Zender (1968) dalam Soebiyanto (1998) menjelaskan bahwa dinamika kelompok sebagai pengetahuan yang mengkaji kehidupan kelompok, yakni menganalisis cara-cara mengorganisir, mengelola, serta pengambilan keputusan dalam kelompok.

Banyak konsep-konsep yang membicarakan tentang dinamika kelompok selain yang dijelaskan diatas, namun kesimpulannya adalah bahwa kelompok akan menjadi dinamis apabila mereka yang menempati posisi dengan peranan tertentu dalam suatu struktur kelompok melaksanakan berbagai fungsinya dalam pencapaian tujuan. Menilai dinamika kelompok berarti menilai kekuatan atau gerak yang terdapat di dalam kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan anggotanya dalam pencapaian tujuan. Kekuatan-kekuatan tersebut berasal dari unsur-unsur: (1) tujuan kelompok; (2) struktur kelompok; (3) fungsi tugas; (4) pembinaan kelompok; (5) kekompakan kelompok; (6) suasana kelompok; (7) tekanan pada kelompok; dan (8) keefektifan kelompok (Beal *et al.* (1962), Cartwright dan Zender (1968), dan Margono Slamet (1978) dalam Soebiyanto (1998).

Terkait dengan dinamika kehidupan kelompok, partisipasi anggota merupakan salah satu dari aspek yang dapat dijadikan tolok ukur kekuatan suatu

kelompok, dengan adanya partisipasi anggota maupun masyarakat sekitar, dapat menjadikan tujuan kelompok dapat tercapai dengan baik. Partisipasi anggota dan masyarakat disini bukan hanya dalam beberapa aspek saja, namun partisipasi yang diharapkan adalah mulai dari tahap perencanaan sampai tahap menikmati hasil dari tujuan yang diperolehnya, termasuk kedalamnya partisipasi dalam mengevaluasi.

Selama ini perencanaan yang cenderung sentralis, berakibat pada tidak munculnya inisiatif di tingkat lokal untuk berpartisipasi dalam pembangunan (Asful, 2007). Menurut Saleh (1989) dalam Asful (2007), partisipatif diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang disepakati kepentingan bersama, dimana kegiatan itu bermanfaat bagi individu atau kelompok. Keterlibatan tersebut mengandung 4 unsur, yaitu kepentingan bersama, dilakukan dengan kesadaran, identifikasi individu dalam kelompok, dan tanggung jawab bersama.

Konsep partisipasi yang diterapkan di Indonesia adalah partisipasi semu, karena potensi yang ada pada masyarakat kurang menjadi rujukan bagi berbagai kebijakan pembangunan, akibatnya proses pembangunan menyimpang dari keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat (Najib 2003 cit Asful 2007).

Perencanaan partisipatif (*participatory planning*) adalah model pendekatan perencanaan yang pada prinsipnya berusaha mengedepankan masyarakat sebagai subjek pembangunan, dimana masyarakat terlibat dalam rangkaian proses perencanaan pembangunan sejak proses identifikasi kebutuhan pembangunan hingga implementasi dan pengawasan serta pengendalian pembangunan (Asful, 2007).

2.8. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Silalahi, Herlina. Erawati (2008) dengan judul "*Analisis Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usahatani Anggota (Studi Kasus : KSU LKM-A Sukma Karsa Jorong Sariak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*" menjelaskan bahwa KSU LKM-A Sukma Karsa merupakan lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi yang khusus mengelola

keuangan simpan pinjam. KSU LKM-A Sukma Karsa menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada anggota. Fungsi KSU LKM-A Sukma Karsa dalam menghimpun dana dalam bentuk kredit memberikan penilaian yang baik. Sedangkan berdasarkan fungsi KSU LKM-A Sukma Karsa sebagai penyalur dana kepada anggota, ternyata kredit KSU LKM-A Sukma Karsa memberikan pengaruh positif terhadap produksi usaha tani anggota, dimana pendapatan anggota meningkat setelah menggunakan kredit.

Hasil penelitian Wijono (2005), yang berjudul "*Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*" menjelaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM ternyata mampu memberikan berbagai jenis pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, sehingga dapat menjadi alternatif pembiayaan yang cukup potensial mengingat sebagian besar pelaku UKM belum memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan. Potensi yang cukup besar tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal, karena LKM masih menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan antara lain aspek kelembagaan yang tumpang tindih, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan LKM dan kecukupan modal. Upaya untuk menguatkan dan mengembangkan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional, diantaranya yang mendesak adalah menuntaskan RUU tentang LKM agar terdapat kejelasan dalam pengembangan LKM. Serta komitmen pemerintah dalam memperkuat UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pengembangan LKM.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada LKM-A Suri Indah yang merupakan salah satu unit usaha Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Sinamar. LKM-A ini terletak di Jorong Tanah Tingkah Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemilihan tempat ini dilakukan secara sengaja (*Purposive*), berdasarkan pertimbangan bahwa Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang merupakan salah satu dari 30 Gapoktan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menerima bantuan dana program BLM PUAP tahap I Tahun Anggaran 2008 sesuai Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 374 tahun 2008, tanggal 7 Juli 2008 tentang Penetapan Penyuluh Pertanian Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani Penerima Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan / Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2008.

Pemilihan LKM-A ini sebagai tempat penelitian juga dikarenakan kemudahan dalam memperoleh data-data, dimana Gapoktan penerima dana program BLM PUAP tahap I Tahun 2008 ini telah membentuk LKM-A dan sudah beroperasi setelah cairnya dana program BLM-PUAP. Kemudian LKM-A sudah mempunyai data-data dan laporan yang lebih baik dibandingkan penerima tahap II tahun 2009. Disamping itu, menurut penilaian PMT Kabupaten Lima Puluh Kota, Gapoktan Sinamar dalam pengelolaan dana program BLM PUAP tahun 2009 terbaik untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana sampai dengan bulan Januari 2010 perkembangan dana yang dikelola oleh LKM-A Suri Indah sudah mencapai Rp. 257.700.000,-.

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung setelah dikeluarkannya surat rekomendasi penelitian dari Fakultas Pertanian Universitas Andalas, yaitu bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun 2010.

3.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif (kualitatif dan kuantitatif). Sedangkan jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus (*case study*). Penelitian studi

kasus ini adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Menurut Tim Teknis Provinsi Sumatera Barat, pengelolaan dana program BLM-PUAP di Sumatera Barat dilakukan secara khusus dan berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, dimana setiap Gapoktan penerima dana PUAP harus membentuk dan mengfungsikan LKM-A sebagai pengelola dana program BLM-PUAP yang dikucurkan kepada Gapoktan tersebut. Gapoktan Sinamar merupakan salah satu Gapoktan penerima dana program BLM-PUAP tahun 2008. Untuk pengelolaan dana tersebut, Gapoktan Sinamar membentuk dan mengfungsikan unit usaha otonomnya yaitu LKM-A Suri Indah. Dalam pengelolaan dana program BLM-PUAP ini, LKM-A Suri Indah telah mampu mengelola dana program BLM-PUAP dengan baik, walaupun masih terbilang baru. Sehingga pada tahun 2009 LKM-A Suri Indah memperoleh prediket LKM-A dengan pengelolaan dana PUAP terbaik di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat (Tim Teknis Provinsi Sumatera Barat, 2010).

Selain itu, menurut pengurus Gapoktan Sinamar, LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP memakai sistem bank konvensional terutama bunga/jasa pinjaman. Namun berdasarkan AD/ART LKM-A Suri Indah yang penulis peroleh dari pengelola LKM-A, pengelolaan LKM-A ini berdasarkan prinsip syari'ah dan juga menggunakan prinsip-prinsip koperasi.

Metode deskriptif ini merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidik. Sedangkan tujuan digunakannya metode deskriptif jenis studi kasus (*case study*) ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu, yang kemudian dari sifat-sifat khas di atas akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Penelitian studi kasus juga ditujukan untuk mendapatkan keterangan yang terperinci dan mendapatkan informasi mengenai variabel – variabel yang diamati (Nazir, 2003).

Hal-hal yang dideskripsikan diantaranya adalah gambaran umum dan profil LKM-A Suri Indah, pengelolaan dana PUAP yang dilakukan oleh LKM-A Suri Indah, fungsi-fungsi yang dijalankan oleh LKM-A Suri Indah yang diperoleh melalui pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD), dan kinerja LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP.

3.3. Teknik Pengambilan Responden

Pemilihan responden dalam penelitian didasari atas keterlibatan dan pengetahuan masing-masing responden terhadap pengelolaan dana PUAP yang dijalankan oleh LKM-A Suri Indah. Responden—responden inilah yang penulis jadikan sebagai *key informan* dan peserta FGD. Rincian *key Informan* dan peserta FGD tersebut terlihat sebagaimana tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rincian Responden

<i>Key Informan</i>	Peserta FGD
1. PMT 2. Pengelola LKM-A Suri Indah 3. Pengurus Gapoktan Sinamar	1) PMT 2) PPL 3) Anggota Gapoktan Sinamat 4) Perangkat Nagari 5) Masyarakat sekitar LKM-A Suri Indah 6) Pengelola LKM-A 7) Pengurus Gapoktan

Penyelia Mitra Tani (PMT) yang dijadikan *key Informan* adalah PMT Kabupaten Lima Puluh Kota yang wilayah kerjanya termasuk Kecamatan Suliki. Berhubung pada tahun 2008 dan tahun 2009 PMT untuk Kecamatan Suliki dipegang oleh orang yang berbeda, maka penulis menjadikan kedua PMT tersebut sebagai *key informan*. Sedangkan Pengurus Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang yang dijadikan responden adalah Ketua Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang, responden ini diambil secara sengaja karena ketua dapat memberikan informasi tentang profil (internal) Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang secara umum, khususnya mengenai program kegiatan, keanggotaan, keuangan, hubungan dengan pihak eksternal dan dalam pengambilan keputusan.

Pengelola LKM-A Suri Indah yang dijadikan responden (*key Infoeman*) adalah Manajer Umum dan Manajer Bagian Pembiayaan, karena informasi tentang pengelolaan keuangan Gapoktan Sinamar secara umum dan pengelolaan dana program BLM PUAP dapat diperoleh dari kedua manajer tersebut.

Tujuan kedua diperoleh dari pelaksanaan FGD, dimana peserta FGD berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri dari unsur-unsur seperti terlihat pada Tabel 1 diatas. Identitas dan karakteristik peserta FGD tersebut sebagaimana dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Identitas dan Karakteristik Peserta FGD.

No	Uraian	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Umur (tahun)		
	a. ≤ 14	0	0
	b. 15-64	11	100
	c. ≥ 65	0	0
2	Pendidikan		
	a. Tidak Sekolah	0	0
	b. SD	0	0
	c. SLTP	1	9,09
	d. SLTA	6	54,55
	e. D.II/D.III	2	18,18
	f. S.1	2	18,18
3	Keterwakilan unsur		
	a. PMT	2	18,18
	b. Pengurus Gapoktan	1	9,09
	c. Pengelola LKM-A	1	9,09
	d. Perangkat Nagari	1	9,09
	e. Anggota LKM-A	3	27,28
	f. Mitra/Masyarakat Non Anggota	1	9,09
	h. Fasilitator	1	9,09
	i. Notulen	1	9,09

Peneliti mengumpulkan informasi dari peserta FGD seputar indikator keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana PUAP yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan, dan kemudian indikator-indikator tersebut dianalisis sejauh mana fungsi-fungsi tersebut dijalankan oleh LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana PUAP.

Responden FGD dipilih dengan kriteria target peserta yang mengetahui keberadaan LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar beserta dana PUAP yang dikucurkan kepada Gapoktan Sinamar tersebut. Setiap peserta FGD memiliki pengetahuan yang baik tentang kondisi lokal. Kriteria-kriteria tersebut juga memperhatikan umur, tingkat pendidikan, kekuasaan politik, jenis kelamin, status ekonomi dan kelompok etnis. Pengelompokan umur kedalam 3 (tiga) kategori diatas, berdasarkan kelompok umur yang dikeluarkan oleh BPS (2008) yang menjelaskan bahwa: 1) kelompok umur pertama (kecil atau sama dengan 14 tahun) merupakan umur yang belum produktif, jadi belum bisa memberikan pemikiran yang baik terhadap suatu persoalan, 2) kelompok umur kedua (15 – 64) merupakan umur produktif dan cukup dewasa dalam pemikiran, sehingga diharapkan mampu memberikan ide-ide atau masukan terhadap suatu persoalan yang dibahas, 3) kelompok umur ketiga (sama atau lebih besar dari 65 tahun) kelompok ini tidak produktif lagi atau kelompok jenuh, sehingga pemikiran dan ide-ide yang diberikan cenderung tidak subjektif.

Perbedaan dalam berbagai karakteristik ini akan tercermin dalam persepsi mereka terhadap permasalahan yang dijadikan topik dalam pelaksanaan FGD ini. Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2 diatas, dari unsur-unsur atau pihak-pihak yang diundang, hanya PPL saja yang berhalangan hadir (Lampiran 10), namun ketidakhadiran PPL tersebut tidak mengurangi dan mengganggu pelaksanaan FGD tersebut.

Petani anggota yang dilibatkan adalah anggota Gapoktan Sinamar yang meminjam dan tidak/belum meminjam dana di LKM-A Suri Indah. Selain itu penulis juga mengundang anggota yang tidak/belum masuk sebagai anggota LKM-A Suri Indah. Selain petani, responden FGD juga terdiri dari unsur PMT (penyelia Mitra Tani) yaitu petugas yang ditugaskan oleh Departemen Pertanian untuk mendampingi dan membina pengelola LKM-A dalam mengelola dana PUAP tersebut. Peserta lainnya terdiri dari unsur perangkat nagari, pengurus gapoktan, pengelola LKM-A, mitra usaha LKM-A dan anggota masyarakat disekitar lokasi LKM-A Suri Indah. Keberagaman unsur yang terlibat dalam FGD akan mempengaruhi informasi tentang indikator keberfungsian LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar dalam mengelola dana program BLM-PUAP. Seluruh

peserta FGD berada dalam usia produktif dimana mereka aktif berusaha dalam bidangnya masing-masing. Demikian juga tingkat pendidikan peserta FGD dimulai dari SLTP hingga sarjana. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi pola pikir peserta FGD dalam mengembangkan informasi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Rincian data-data yang dikumpulkan beserta sumbernya dapat dilihat sebagaimana tabel 3 berikut:

Tabel 3. Jenis Data, Teknik dan Sumber Data.

No.	Kriteria	Teknik Pengumpulan Data	Sumber Data
1.	Data Primer	Wawancara langsung dan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan melalui pelaksanaan FGD.	Pengurus Gapoktan, Pengelola LKM-A, PMT, Penyuluh Pendamping, petani anggota Gapoktan, dan peserta FGD
2.	Data Sekunder	Studi Kepustakaan terhadap: laporan-laporan kegiatan dan keuangan serta dokumen-dokumen lain.	Sekretariat PUAP, Gapoktan Sinamar, LKM-A Suri Indah, PMT, Penyuluh Pendamping Internet dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci (*key Informan*) dan melalui FGD. *Key Informan* tersebut adalah: pengurus Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang, pengelola LKM-A Suri Indah, Penyelia Mitra Tani (PMT) Kabupaten Lima Puluh Kota, Petugas Penyuluh Pendamping Kecamatan Suliki, anggota Gapoktan Sinamar, perangkat nagari dan masyarakat umum non anggota Gapoktan Sinamar yang mempunyai pengetahuan tentang LKM-A maupun dana PUAP. Disamping itu, data primer ini juga dikumpulkan melalui pelaksanaan FGD yang dipandu dengan *guideline* pelaksanaan FGD.

Pelaksanaan FGD untuk menemukan indikator keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP secara partisipatif, berlangsung selama \pm 2 jam pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2010, pukul 14.00 sampai dengan 16.00 WIB di Ruang Pertemuan Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang. Pemilihan waktu dan tempat FGD sesuai dengan kesepakatan peneliti dengan peserta FGD. Peserta FGD berjumlah 11 orang berdasarkan keterwakilan unsur yang telah penulis tentukan sebelumnya (Lampiran 7). Dalam pelaksanaan FGD ini peneliti berperan sebagai fasilitator untuk mengarahkan pendapat peserta FGD sehingga disepakati rumusan indikator keberfungsian LKM-A Suri Indah secara partisipatif.

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder yang dikumpulkan berupa laporan-laporan kegiatan, laporan-laporan mengenai keuangan maupun dokumen-dokumen lain. Data-data sekunder ini diperoleh dari Sekretariat Tim PUAP Sumatera Barat, Sekretariat Tim PUAP Kabupaten Lima Puluh Kota, Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang, LKM-A Suri Indah, PMT, Penyuluh Pendamping, BPS, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan penelitian. Data-data primer dan sekunder yang dikumpulkan tersebut adalah data dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Khusus untuk data-data yang berhubungan dengan penilaian kinerja LKM-A Suri Indah, penulis mengambil data tahun buku 2009 saja.

3.5. Variabel yang Diamati

Berdasarkan tujuan penelitian ini maka variabel-variabel yang diamati penulis rinci sebagai berikut:

3.5.1. Pada tujuan pertama yaitu untuk mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar, maka variabel yang diamati adalah:

1. Profil LKM-A Suri Indah, mencakup data tentang:
 - a. Gambaran umum wilayah kerja LKM-A Suri Indah
 - b. Sejarah dan Tujuan berdiri
 - c. Organisasi

- d. Permodalan
 - e. Keanggotaan
 - f. Usaha, produk dan perkembangannya.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah
- a. Rencana dan realisasi pencairan dana BLM-PUAP kepada anggota
 - b. Rencana dan realisasi penggunaan dana BLM-PUAP oleh anggota penerima
 - c. Pencatatan dan pelaporan keuangan oleh LKM-A Suri Indah
 - d. Proses dana bergulir dalam kelompok

3.5.2. Pada tujuan kedua, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP secara partisipatif, maka hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam bahan diskusi adalah:

1. Fungsi LKM-A Suri Indah dalam menyalurkan dana program BLM PUAP kepada anggota, yang meliputi data tentang :
 - a. Penetapan prosedur dan persyaratan pinjaman
 - b. Proses pencairan dan pemanfaatan pinjaman
 - c. Penetapan jasa pinjaman
 - d. Penetapan sistem pengembalian pinjaman
 - e. Sanksi bagi anggota yang menunggak
2. Fungsi LKM-A Suri Indah dalam menghimpun modal/dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, meliputi:
 - a. Pelayanan LKM-A Suri Indah
 - b. Penyediaan variasi jenis tabungan
 - c. Penetapan prosedur dan persyaratan tabungan
 - d. Lokasi LKM-A Suri Indah (Silalahi, 2008).
3. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk mengkaji fungsi tugas kelompok yakni:
 - a. Kepuasan anggota
 - b. Penyebaran informasi kepada anggota

- c. Koordinasi yang baik
 - d. Partisipasi dan motivasi anggota
 - e. Komunikasi dalam kelompok
 - f. Klarifikasi kepada anggota pada situasi tertentu
4. Pengelolaan bantuan modal usaha yang ideal, yaitu:
- a. Mudah diterima dan didayagunakan (*acceptable*)
 - b. Dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*)
 - c. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*)
 - d. Dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri (*sustainable*)
 - e. Mudah digulirkan dan dikembangkan (*replicable*)

Selain variabel tersebut diatas, fasilitator FGD juga mengamati variabel lain yang menentukan keberfungsian LKM-A Suri Indah menurut masyarakat lokal. Indikator ini berkembang dari pengamatan masyarakat lokal dan pihak-pihak yang terkait dengan LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana PUAP.

3.5.3. Menganalisa Kinerja (internal manajemen) yang dijalankan LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana BLM-PUAP

Menganalisa kinerja (internal manajemen) LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP dengan alat ukur pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi (Permeneg KUKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008), yang meliputi:

- a. Permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kemandirian dan pertumbuhan
- g. Jatidiri koperasi/LKM

3.6. Analisa Data.

Analisis dilakukan berdasarkan kepada tujuan yang ingin dicapai yaitu:

- 3.6.1. Pada tujuan pertama yaitu untuk mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah.

Data-data yang diperoleh untuk pencapaian tujuan pertama dianalisa secara deskriptif kualitatif. Hal ini ditujukan untuk mengetahui dan memaparkan tentang profil LKM-A Suri Indah, dan selanjutnya fungsi-fungsi yang dijalankan oleh LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program PUAP diinterpretasikan sesuai data yang diperoleh. Analisa dan pemaparan tentang profil LKM-A Suri Indah ditujukan untuk memberikan gambaran umum tentang LKM-A Suri Indah, terutama terkait dengan Gapoktan Sinamar dan program BLM-PUAP. Selanjutnya, deskripsi pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah, dimaksudkan untuk memaparkan proses pengelolaan dana program BLM-PUAP yang dilakukan oleh LKM-A Suri Indah, terutama pada tahap rencana dan realisasi pencairan dan penggunaan dana tersebut. Hasil pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah ini selanjutnya dibandingkan dengan beberapa petunjuk, pedoman dan panduan pengelolaan dana di LKM-A.

- 3.6.2. Pada tujuan kedua, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP secara partisipatif

Pencapaian tujuan kedua diperoleh dengan melakukan FGD. Data yang diperoleh dari hasil FGD berupa faktor-faktor yang mempengaruhi LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana PUAP menurut masyarakat lokal dan peserta FGD. Data ini selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dengan jelas pengembangan indikator keberfungsian LKM-A secara partisipatif.

- 3.6.3. Menganalisa kinerja yang dijalankan LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana BLM-PUAP

Untuk menganalisa kinerja (internal manajemen) LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP dengan alat ukur pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi (Permeneg KUKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008, data-data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data-data yang dianalisa adalah berupa data-data laporan keuangan dan data-data manajemen LKM-A Suri Indah, sehingga dari analisa data dengan alat tersebut diatas, diperoleh kriteria LKM-A yang Sehat atau tidak sehat, yang mencerminkan pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar dengan aspek-aspek dan skor sebagaimana dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4. Aspek dan Bobot Penilaian Kinerja LKM-A

No.	Aspek Yang dinilai	Bobot Penilaian
1.	Permodalan	15
2.	Kualitas Aktiva Produktif	25
3.	Manajemen	15
4.	Efisiensi	10
5.	Likuiditas	15
6.	Kemandirian dan pertumbuhan	10
7.	Jati diri LKMA	10
	TOTAL	100

Sumber: Permeneg KUKM, 2008.

Penghitungan penilaian kinerja LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar ini juga menggunakan beberapa panduan dan rumus penghitungan (Lampiran 16 – 24).

3.7. Definisi Operasional

1. Fungsi yang dimaksud disini adalah fungsi lembaga keuangan mikro sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro, baik dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya (Ashari, 2006). Sedangkan Soedijanto (1981) *dalam*

Soebiyanto (1998) menjelaskan bahwa fungsi tugas adalah segala hal yang harus dilakukan kelompok yang berorientasi pada pencapaian tujuan.

2. Analisis Kinerja adalah penilaian secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1993 *dalam* Suib, 2007). Kinerja yang dimaksud disini adalah pengelolaan LKM-A dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal (Hendayana dan Bustamam, 2008).
- 3 FGD (*Focus Group Discussion*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah atas suatu isu atau masalah tertentu. Meski sebuah diskusi, FGD tidaklah sama dengan pembicaraan beberapa orang di kedai kopi. FGD bukan kumpul-kumpul beberapa orang untuk membicarakan suatu hal. Meski terlihat sederhana, menyelenggarakan suatu FGD butuh kemampuan dan keahlian. Ada prosedur dan standar tertentu yang harus diikuti agar hasilnya benar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. (Lingkaran Survey Indonesia, 2006).
- 4 Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 5 Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal LKM-A yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
- 6 ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva LKM-A yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
- 7 Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan LKM-A dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.
- 8 Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) adalah mengukur kemampuan LKM-A memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

- 9 Pinjaman Yang Diragukan. Pinjaman digolongkan diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa : 1) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya, 2) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.
- 10 Pinjaman Macet. Pinjaman digolongkan macet apabila: 1) Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan, 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan, 3) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.
- 11 Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola GAPOKTAN dalam pengembangan PUAP.
- 12 Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa (Departemen Pertanian, 2009)
- 13 Kelompok adalah kumpulan orang-orang yang saling mengenal, bersatu karena ingin bekerjasama dan saling membutuhkan satu sama lain. Jadi bukan hanya kumpulan modal, karena modal hanyalah sebagai sarana untuk meningkatkan rasa setia kawan anggota dalam mengatasi persoalan.
- 14 Kredit atau pinjaman adalah kepercayaan seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan, dapat berupa barang, uang ataupun jasa (Suyatno *et al*, 2003). Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu

dengan pemberian bunga. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

- 15 Kesehatan LKM-A adalah kondisi atau keadaan LKM-A yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.
- 16 Modal Sendiri LKM-A adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha dan dalam kaitannya dengan penilaian kesehatan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.
- 17 Pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa pinjaman dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam.
- 18 Pinjaman yang diberikan berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh LKM-A kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai.
- 19 Aktiva Produktif adalah kekayaan LKM-A yang mendatangkan penghasilan bagi LKM-A yang bersangkutan.
- 20 Risiko pinjaman bermasalah adalah perkiraan risiko atas pinjaman yang kemungkinan macet atau tidak tertagih.
- 21 Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP) adalah plafon pinjaman baik untuk anggota, calon anggota, LKM lain dan anggotanya maupun pengurus dalam rangka meminimalisasi terjadinya pinjaman bermasalah.
- 22 Cadangan adalah dana yang disisihkan dari SHU yang terdiri atas cadangan umum dan cadangan risiko.
- 23 Cadangan Umum adalah cadangan yang dimaksudkan untuk pemupukan modal dan pengembangan usaha.

- 24 Cadangan Tujuan Risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.
- 25 Likuiditas adalah kemampuan LKM-A untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
- 26 Rentabilitas adalah kemampuan LKM-A untuk memperoleh sisa hasil usaha (SHU).
- 27 Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dinilai dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan LKM-A dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
- 28 Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan (MEPPP) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan LKM-A.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran umum wilayah kerja LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar

4.1.1. Kondisi Geografis Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki

Nagari Sungai Rimbang merupakan salah satu dari kenagarian yang berada di Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Propinsi Sumatera Barat, dengan luas daerah 20,00 Km², terdiri dari 8 jorong yaitu Jorong Sialang, Batu Bauk, Damar Tinggi, Tanah Tingkah, Asam Panjang, Ateh Koto, Lombah dan Jorong Tanah Longih. Kenagarian ini berjarak 1 Km ke ibukota kecamatan, dan 26 Km ke ibukota kabupaten/kota. Daerah ini memiliki batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Barisan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Guguk dan Kabupaten Agam, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Guguk dan Kecamatan Bukit Barisan (BPS Kab. Lima Puluh Kota, 2009). Gambaran umum wilayah penelitian dan wilayah kerja LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang dapat dilihat dalam tabel 5 berikut:

Tabel 5. Gambaran Umum Wilayah Penelitian dan Wilayah Kerja LKM-A.

Uraian	Jumlah/Keterangan
1. Luas Daerah	20,00 km ²
2. Jumlah Jorong	8 Jorong
3. Jarak dari ibukota kecamatan	1 km
4. Jarak dari ibukota kabupaten	26 km
5. Topografi	Daerah dataran dan berbukit
6. Mata pencaharian penduduk	Pertanian (perkebunan dan tanaman pangan) dan Perdagangan

Sumber: Kantor Camat Suliki, 2010.

Secara umum Kecamatan Suliki memiliki luas daerah 136,94 Km² dan berada pada 500 – 700 meter dari permukaan laut (mdpl). Topografi Kecamatan Suliki terdiri dari daerah dataran dan daerah berbukit. Khusus Kenagarian Sungai Rimbang berada pada daerah yang berbukit, hanya sebagian kecil saja yang berada di daerah datar. Sehingga di Kenagarian Sungai Rimbang ini mata

pencaharian penduduknya banyak didominasi oleh pertanian bidang perkebunan dan pertanian pangan.

4.1.2. Penduduk dan Potensi Nagari Sungai Rimbang.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2008 jumlah penduduk Nagari Sungai Rimbang adalah sebanyak 2.177 jiwa atau sekitar 15,34% dari keseluruhan jumlah penduduk Kecamatan Suliki (14.194 jiwa), dengan kepadatan penduduk 109 per Km². Jumlah penduduk Nagari Sungai Rimbang ini terdiri dari 1.047 jiwa laki-laki dan 1.130 jiwa perempuan (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, 2009).

Sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Suliki ini dapat dikatakan memadai, seperti adanya jalan raya nagari, jalan raya kecamatan dan jalan raya kabupaten. Untuk menunjang kelancaran hubungan tersebut didukung oleh sarana transportasi darat seperti mobil angkutan desa, mobil angkutan ke pusat Kota Payakumbuh dan bus angkutan umum menuju Kota Padang, dan ojek. Disamping itu, di Kecamatan Suliki ini terdapat beberapa lembaga keuangan mikro lainnya sejenis LKM-A, sebagaimana dalam tabel 6 berikut:

Tabel 6. Nama dan Jumlah Lembaga Keuangan lainnya di Kecamatan Suliki dan Nagari Sungai Rimbang.

No.	Nama Lembaga Keuangan	Jumlah (unit) di Kec. Suliki	Jumlah (unit) di Nagari Sungai Rimbang
1.	Bank Umum (BRI unit)	2	1
2.	BPR	1	1
3.	KUD	2	1
4.	Koperasi Simpan Pinjam	33	6
5.	Koperasi lainnya	33	10
	JUMLAH	71	19

Sumber : Kantor Camat Suliki, 2010.

Keberadaan lembaga-lembaga keuangan ini ditujukan untuk membantu masyarakat Kecamatan Suliki dalam hal pembiayaan dan menyimpan dana mereka. Namun sejauh ini, lembaga-lembaga keuangan yang ada tersebut belum mendapat sambutan baik dari masyarakat di daerah tersebut, hal ini disebabkan oleh prosedur peminjaman dan menabung yang dianggap masyarakat masih berat.

Sebagai contoh, adanya persyaratan agunan pada BRI dan BPR. Kemudian, untuk meminjam modal di KUD atau koperasi lainnya, membutuhkan waktu yang lama, hal ini disebabkan karena kebanyakan petani di Kenagarian Sungai Rimbang ini sudah banyak yang menjadi anggota koperasi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan modal usahatani anggotanya tidak optimal.

Potensi LKM-A Suri Indah yang cukup baik dengan peluang bantuan modal yang lebih terpenuhi, membuat 314 orang petani yang ada di Kenagarian Sungai Rimbang mau bergabung dalam Gapoktan Sinamar. Petani-petani anggota inilah nantinya yang berhak mengajukan permohonan untuk memperoleh bantuan modal dari LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar.

Usaha ekonomi yang diusahakan oleh anggota LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar adalah sektor pertanian dan perdagangan. Hal ini sesuai dengan tujuan digulirkannya dana PUAP, yaitu untuk membantu petani diperdesaan yang kurang mampu terhadap akses modal untuk usahataniannya. Usaha-usaha itu mencakup usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, industri rumah tangga pertanian dan pemasaran hasil pertanian.

4.2. Profil LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar

4.2.1. Sejarah dan Tujuan Pendirian LKM-A Suri Indah

Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang terbentuk atas dasar keinginan masyarakat Nagari Sungai Rimbang yang tergabung dalam beberapa kelompok tani yang ada pada daerah tersebut untuk mengatasi masalah permodalan. Dasar pembentukan Gapoktan ini merujuk kepada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tentang Kelembagaan Tani. Pembentukan Gapoktan ini juga didasari oleh kebijakan pemerintah agar penyaluran dana program BLM-PUAP yang dimulai pada tahun anggaran 2008 dapat disalurkan melalui Gapoktan, sehingga penyaluran dana BLM-PUAP tepat sasaran dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu peningkatan usaha produktif anggota.

Gapoktan Sinamar didirikan secara resmi pada tanggal 25 Mei 2007 setelah diadakannya musyawarah antara kelompok-kelompok tani yang ada di Kenagarian Sungai Rimbang dan kemudian ditetapkan dengan surat keputusan

Wali Nagari Sungai Rimbang nomor: 15/WN/KP/V-2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang pengukuhan pengurus Gapoktan Sinamar Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki. Wadah ini berdiri atas dasar kemauan dan kesepakatan mereka dan merupakan cermin solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi para petani dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan usaha dan kesejahteraan anggotanya.

Sebagai wujud nyata untuk mencapai tujuan tersebut, maka Gapoktan Sinamar juga membentuk dan mengaktifkan beberapa unit usaha otonomnya, yaitu unit usaha UPJA, Saprodi, unit pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, unit usaha perbenihan dan unit usaha simpan pinjam. Unit usaha simpan pinjam inilah yang kemudian ditransformasikan menjadi unit usaha LKM-A (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) yang diberi nama dengan LKM-A "Suri Indah".

4.2.2. Organisasi

Kementerian Pertanian Indonesia (2010), menjelaskan bahwa Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan organisasi petani diperdesaan yang dibentuk secara musyawarah dan mufakat untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha anggotanya. Untuk membangun Gapoktan yang ideal sesuai dengan tuntutan organisasi masa depan, diperlukan dukungan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembinaan yang berkelanjutan. Proses penumbuhan dan pengembangan Gapoktan yang kuat dan mandiri diharapkan secara langsung dapat menyelesaikan permasalahan petani dalam pembiayaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani, pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran serta petani dan anggota masyarakat perdesaan. Sehingga dalam mengukur kapasitas dan aspek tatakelola organisasi dalam sebuah Gapoktan PUAP atau LKM-A, harus memperhatikan variabel-variabel berikut ini:

- a. Aturan yang dimiliki. Aturan yang harus dimiliki oleh LKM-A adalah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), yang disusun oleh petani anggota Gapoktan untuk menentukan arah dan kebijakan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

- b. Pengelola LKM-A. Pengelola dan pengurus dalam suatu organisasi lembaga keuangan yang sehat sebaiknya terpisah. Secara umum pengurus mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan organisasi, pengawasan, melaporkan perkembangan dan kemajuan organisasi kepada pihak internal dan eksternal. Sedangkan pengelola merupakan pelaksana operasional bisnis keuangan organisasi LKM-A sesuai dengan AD/ART.
- c. Rencana Kerja. Rencana Kerja organisasi merupakan rencana bisnis yang telah diputuskan melalui rapat anggota dan merupakan dasar bagi pengelola LKM-A dalam pengembangan usaha dan bisnis LKM-A. Pembentukan rencana yang ideal sebaiknya dilakukan secara partisipatif.
- d. Rapat Anggota Secara Berkala. Pertemuan atau rapat anggota yang dilaksanakan secara berkala dan terjadwal merupakan alat ukur kedinamisan pengelolaan LKM-A sebagai organisasi ekonomi.
- e. Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT). RAT dan jadwal pelaksanaannya merupakan ukuran keberhasilan pengelola dalam mencapai tujuan dan mengorganisasikan LKM-A sebagai lembaga ekonomi.
- f. Badan Hukum. Badan Hukum merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh LKM-A sebagai lembaga keuangan mikro yang mengelola dana petani dan masyarakat. LKM-A disarankan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Koperasi Nomor 25 tahun 1992 dan dalam operasionalnya menggunakan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Disamping itu, Gapoktan juga dapat menggunakan badan hukum melalui peraturan daerah (perda) walaupun secara teknis belum/tidak dapat dipakai sebagai dasar program linkage dengan lembaga keuangan lainnya (Kementerian Pertanian, 2010).

Organisasi dan manajemen yang baik merupakan tulang punggung keberhasilan suatu kelompok, demikian pula halnya dengan LKM-A. Penyusunan struktur organisasi dan manajemen LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh LKM-A ini.

Berdasarkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2009, struktur organisasi LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar terdiri atas, RAT, Pembina, PMT, Pengurus Gapoktan, BPK, Pengelola LKM-A serta anggota. Pengurus Gapoktan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Pengelola LKM-A terdiri dari Manajer Umum, Penggalangan Dana, Pembukuan, Pembiayaan dan Teller/Kasir (Lampiran 8).

Berdasarkan struktur organisasi pada Lampiran 8, terlihat bahwa ada beberapa struktur organisasi tambahan, atau sedikit berbeda dari pedoman struktur organisasi LKM-A yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Struktur tambahan tersebut adalah BPK (Badan Penyelamatan Keuangan). BPK ini merupakan bentukan dari Gapoktan Sinamar untuk menekan tingkat kemacetan pembiayaan di LKM-A Suri Indah. BPK ini difungsikan untuk memberikan pembinaan kepada anggota yang mengalami kesulitan dalam membayar cicilan pinjamannya di LKM-A Suri Indah.

Selain itu, ada satu jabatan yang kosong yaitu bidang penggalangan dana. Kekosongan fungsi ini disebabkan oleh keluarnya salah seorang pengelola LKM-A tersebut pada tahun yang sedang berjalan ini, sehingga untuk penunjukkan pengisian jabatan ini harus melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun berikutnya. Untuk menjalankan fungsi ini, manajer umum bersama pengelola lainnya bekerjasama dengan pengurus Gapoktan Sinamar menggantikan tugas bidang penggalangan dana, sehingga kekosongan jabatan ini tidak berakibat buruk terhadap pelaksanaan usaha-usaha di LKM-A Suri Indah.

4.2.3. Permodalan

Anggaran Rumah Tangga (ART) LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar menjelaskan bahwa modal LKM-A terdiri dari modal sendiri, modal pinjaman dan modal penyertaan. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari pinjaman anggota, pinjaman dari lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta dari sumber-sumber lainnya yang sah.

Selain dari yang disebutkan diatas, modal LKM-A juga dapat berasal dari pihak ketiga yang ingin bekerjasama dengan LKM-A Suri Indah dalam hal

permodalan, dimana pihak ketiga tersebut nantinya akan memperoleh pembagian hasil usaha dari usaha yang modalnya diikutsertakan di dalamnya, sesuai dengan jumlah modal yang ditanamkannya dan kesepakatan kerjasama yang telah dibuat.

Berdasarkan neraca LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009 (Lampiran 9), dapat dilihat bahwa modal yang dimiliki oleh LKM-A Suri Indah sebagaimana dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7. Keadaan Modal LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009

No.	Sumber Modal	Jumlah (Rp.)	Porsentase (%) dari keseluruhan Modal
1.	Modal Saham	1.100.000,-	0,97 %
2.	Simpanan Pokok	1.080.000,-	0,95 %
3.	Simpanan Wajib	12.054.000,-	10,61 %
4.	Modal PUAP	99.400.000,-	87,47 %
	JUMLAH	113.634.000,-	100 %

Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Suri Indah, 2010

Dari Tabel 7 diatas terlihat bahwa permodalan LKM-A Suri Indah yang berasal dari anggota sendiri hanya 12,53% dan selebihnya adalah modal yang berasal dari dana program BLM-PUAP. Keadaan ini disebabkan karena berdirinya LKM-A ini adalah untuk mengelola dana PUAP yang diperuntukkan kepada Gapoktan Sinamar, sehingga modal awalnya sebenarnya berasal dari dana PUAP. Namun untuk menunjang permodalan di LKM-A Suri Indah, pengelola juga mengumpulkan modal yang berasal dari simpanan anggota.

Pemupukan modal yang berasal dari penjualan saham baru mulai dilakukan semenjak bulan Juni 2009, dengan modal saham yang terkumpul baru Rp. 300.000,-. Pengumpulan modal dengan cara ini dilakukan dengan menjual lembaran surat saham kepada anggota yang ingin menanamkan modalnya di LKM-A Suri Indah, namun karena kurang mendapat respon, metode ini kemudian dirubah. Dimana setiap anggota yang meminjam dengan kelipatan Rp. 1.000.000,- harus membeli 1 (satu) lembar saham seharga Rp. 100.000,-. Sehingga dengan cara ini permodalan di LKM-A Suri Indah semakin meningkat. Tujuan lain dari pemupukan modal ini adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak

kepada anggota untuk mengajukan pembiayaan, sehingga tujuan untuk membantu permodalan anggota dalam berusaha tani juga dapat diwujudkan.

4.2.4. Keanggotaan

Berdasarkan data bulan Januari 2010 yang penulis peroleh pada saat melakukan survey pendahuluan, jumlah anggota Gapoktan Sinamar yang telah memanfaatkan dan tergabung dalam keanggotaan LKM-A Suri Indah sampai dengan bulan Januari 2010 adalah sebanyak 118 orang, yang berasal dari berbagai jenis usaha produktif yang mereka usahakan, jumlah anggota tersebut dapat dirinci sebagaimana dalam tabel 8 berikut:

Tabel 8. Jumlah anggota LKM-A Suri Indah Menurut Jenis Usaha Keadaan Januari 2010.

No.	Jenis Usaha	Jumlah Anggota (orang)	Porsentase (%)
1.	Tanaman Pangan	15	12,71%
2.	Tanaman Hortikultura	31	26,27%
3.	Peternakan	27	22,88%
4.	Pemasaran	45	38,14%
	JUMLAH	118	100%

Sumber: LKM-A Suri Indah, 2010 (data diolah)

Dari Tabel 8 diatas dapat dilihat bahwa jenis usaha produktif yang paling banyak anggota peminjamnya adalah bidang usaha pemasaran hasil-hasil pertanian. Jenis usaha ini secara umum memang menjadi prioritas bagi LKM-A Suri Indah dalam memberikan pinjaman (pembiayaan), karena jenis usaha ini lebih terjamin kelancarannya dalam membayar cicilan pinjaman. Jenis usaha bidang pemasaran ini dilakukan setiap hari atau paling tidak sekali seminggu. Sehingga dana yang dipinjamkan kepada anggota dengan jenis usaha ini lebih cepat perputaran dan pengembaliannya kepada anggota tersebut.

Sedangkan jenis usaha tanaman pangan adalah jenis usaha yang anggotanya paling sedikit memanfaatkan pelayanan pembiayaan di LKM-A Suri Indah. Melalui wawancara langsung dengan Ketua Gapoktan dan Manajer Umum LKM-A Suri Indah diketahui bahwa hal ini disebabkan karena usaha tanaman pangan terutama padi, hanya dimanfaatkan oleh anggota sebagai pemenuhan

kebutuhan pokok mereka saja. Pada umumnya seluruh anggota mempunyai sawah untuk usahatani padi. Jadi mereka lebih cenderung memanfaatkan dana pinjaman dari LKM-A untuk usaha lain yang telah disyaratkan oleh LKM-A.

Menurut petunjuk teknis pelaksanaan PUAP Sumatera Barat, keanggotaan LKM-A dibagi atas tiga pengelompokkan, yaitu 1) anggota biasa, anggota ini adalah anggota LKM-A yang berasal dari anggota Gapoktan penerima dana PUAP, perorangan, dewasa dan memiliki hak dan kewajiban yang telah diatur oleh LKM-A, 2) anggota luar biasa, yaitu perorangan yang memanfaatkan layanan tabungan LKM-A dan hanya memiliki hak bicara saja, 3) calon anggota, yaitu perorangan dewasa yang telah mengajukan permohonan menjadi anggota LKM-A serta telah memenuhi kewajiban yang telah disyaratkan, memiliki hak bicara tidak hak suara, dan berhak atas pelayanan pinjaman dari LKM-A.

Agar kegiatan pelayanan keuangan dapat tumbuh menjadi besar dan mencapai skala ekonomi yang layak, maka potensi calon anggota harus banyak terdiri dari pelaku utama dan pelaku usaha yang memerlukan layanan keuangan. Keanggotaan dinyatakan sah bila telah mengajukan permohonan tertulis, mendapat persetujuan dalam rapat pengurus, telah menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib serta memperoleh buku anggota. Setiap anggota punya hak dan kewajiban yang sama. Setiap anggota wajib mentaati aturan yang telah disepakati dan berdisiplin. Keanggota tidak dapat dipindahkan kepada orang lain tanpa persetujuan pengurus (BPTP Sumatera Barat, 2009).

4.2.5. Usaha, Produk dan Perkembangannya

Dalam pengembangan usahanya, LKM-A Suri Indah juga menciptakan berbagai bentuk produk tabungan. Produk ini bertujuan untuk menggalang dana swadaya disamping dana PUAP. Produk-produk simpanan tersebut adalah 1) Simpanan Masyarakat (Simas); 2) Simpanan Idul Fitri (Sidufi); 3) Simpanan Ibu Hamil (Sibumil); 4) Simpanan Qurban (Siaqur); dan 5) Simpanan Pendidikan (Simpen). Menurut manajer umum LKM-A Suri Indah, pelaksanaan usaha ini dilakukan dengan cara jemput bola agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Namun karena keterbatasan tenaga, produk-produk simpanan ini belum terlaksana sesuai harapan. Selayaknya, untuk pelaksanaan usaha ini membutuhkan tenaga

tambahan untuk memasarkan produk dan mengumpulkan simpanan dari nasabah. Sehingga saat ini pengelola lebih memfokuskan kegiatan dalam pemupukan modal melalui berbagai usaha, seperti penjualan saham, menjalin kemitraan dengan pihak lain dan usaha penambahan modal dari pemerintah.

Usaha inti dari LKM-A Suri Indah saat ini adalah bidang pembiayaan. Perkembangan usaha ini tak terlepas dari kontribusi dana PUAP yang dikucurkan kepada Gapoktan Sinamar. Disamping dana tersebut, pengelola juga berusaha untuk melakukan pemupukan modal dari sumber-sumber lain. Hal inilah yang menjadikan LKM-A Suri Indah mampu memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggotanya. Perkembangan usaha pembiayaan dengan modal awalnya adalah dana PUAP ini dapat dilihat pada tabel 9 berikut:

Tabel 9. Perkembangan Usaha Pembiayaan (dana PUAP) LKM-A Suri Indah sampai dengan Desember 2009.

No.	Bulan	Jumlah Dana (Rp.)	Keterangan
1.	Pebruari 2009	37.500.000	-
2.	Maret	62.500.000	Naik 66,67%
3.	April	95.500.000	Naik 52,8%
4.	Mei	108.500.000	Naik 13,61%
5.	Juni	118.000.000	Naik 8,76%
6.	Juli	127.500.000	Naik 8,05%
7.	Agustus	152.500.000	Naik 19,61%
8.	September	165.500.000	Naik 8,52%
9.	Oktober	200.100.000	Naik 20,91%
10.	November	219.100.000	Naik 9,49%
11.	Desember	231.900.000	Naik 5,84%

Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Suri Indah, 2010 (data diolah)

Walaupun LKM-A Suri Indah belum berbadan hukum, namun berkat komitmen dan keoptimisan pengelola bersama pengurus Gapoktan yang terus aktif bekerjasama dalam perkembangan usaha ini, maka jumlah aset LKM-A Suri Indah terus meningkat. Perkembangan aset ini berasal dari usaha pembiayaan dengan modal awal dari dana PUAP. Pada Tabel 9 diatas terlihat bahwa pada awal dimulai beroperasinya LKM-A Suri Indah, dana yang telah dijadikan usaha pembiayaan berjumlah Rp. 37.500.000,-, dalam artian bahwa dana PUAP yang sudah dipinjamkan kepada anggota telah mencapai jumlah tersebut diatas. Kemudian sampai dengan bulan Desember 2009 dana tersebut meningkat lebih

dari lima kali lipat (518,4 %), yaitu sebesar Rp. 231.900.000,-. Peningkatan itu tersebut menjadi motivasi bagi pengelola LKM-A Suri Indah untuk terus mengembangkan usahanya dengan dukungan semua pihak.

Berdasarkan hasil yang telah diperoleh pada tahun 2009 tersebut, Ketua Gapoktan Sinamar menyatakan dalam wawancara langsung dengan penulis bahwa dengan adanya kerjasama LKM-A, Gapoktan, pihak swasta, serta dengan adanya pembinaan yang berkelanjutan dari PPL (penyuluh Pertanian Lapangan) dan PMT (Penyelia Mitra Tani), tahun 2011 diharapkan LKM-A Suri Indah akan berbentuk Bank Tani yang lebih besar dan dapat melayani masyarakat tani yang berada di Kenagarian Sungai Rimbang khususnya, dan dapat juga melayani daerah-daerah lain.

4.3. Deskripsi Pengelolaan Dana Program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar

4.3.1. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan Dana BLM-PUAP

Proses pencairan dana BLM-PUAP di Gapoktan Sinamar hingga dikelola oleh LKM-A Suri Indah, dilakukan dengan mengacu kepada beberapa tahap yang telah ditetapkan oleh petunjuk dan pedoman pencairan dana BLM-PUAP yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Proses-proses tersebut meliputi pembuatan Rencana Usaha Anggota (RUA), pembuatan Rencana Usaha Kelompok (RUK), dan pembuatan Rencana Usaha Bersama (RUB). Proses pembuatan rencana-rencana tersebut sebagaimana dalam Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Proses Pembuatan Rencana Usaha Gapoktan Sinamar

No.	Jenis Rencana	Waktu Pembuatan	Rincian Isi Rencana	Pelaksana/pembuat
1	2	3	4	5
1.	Rencana Usaha Anggota (RUA)	Juli s/d Agustus 2008	Dokumen rencana usaha per-anggota yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Data Anggota - Jenis Usaha - Volume Usaha - Kebutuhan Biaya - Jadwal Pemanfaatan 	RUA ini dibuat oleh anggota masing-masing kelompok tani dan diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani yang bersangkutan.
2.	Rencana Usaha Kelompok (RUK)	Agustus 2008	Rekapitulasi RUA, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Data base Keltan - Nama, tanda tangan dan jenis usaha anggota. - Volume dan Nilai Usaha - Jadwal Pemanfaatan 	RUK ini dibuat oleh Ketua Kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Sinamar dan diperiksa dan disahkan oleh PPL.

Tabel 10. (Lanjutan)

1	2	3	4	5
3.	Rencana Usaha Bersama (RUB)	Agustus 2008	Rekapitulasi RUK dengan batasan dana PUAP, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Data base Gapoktan - Pengurus Gapoktan - Nomor Rekening Gapoktan - Nama dan Alamat Bank - Rincian Jenis Usaha Produktif - Satuan Volume - Nilai/total dana PUAP. 	RUB ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Gapoktan Sinamar, dan selanjutnya di setujui oleh Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: Profil Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang, 2009.

Sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disusun oleh Gapoktan Sinamar sebelum pencairan dana PUAP ke rekening Gapoktan (Lampiran 5), dapat dilihat bahwa dana program BLM-PUAP direncanakan penggunaannya untuk enam jenis usaha produktif. Penyusunan RUB ini berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA) dan Rencana Usaha Kelompok.

Petani anggota membuat sendiri RUA berdasarkan tujuan penggunaan dana PUAP yang ditetapkan oleh gapoktan, dan apabila ada keraguan atau kekeliruan, petani bertanya langsung kepada Penyuluh Pendamping. Setelah RUA selesai dibuat, Penyuluh Pendamping memeriksa kembali RUA yang dibuat petani, untuk koreksi akhir sebelum dijadikan bahan untuk pembuatan RUK.

RUK disusun berdasarkan RUA yang telah dibuat oleh petani anggota gapoktan yang mengajukan pinjaman. RUK merupakan gambaran biaya yang diperlukan oleh keseluruhan anggota masing-masing kelompok yang selanjutnya direkap untuk dijadikan Rencana Usaha Kelompok. Rincian RUK diajukan oleh kelompok tani kepada pengurus Gapoktan meliputi rincian nama petani, usaha produktif, volume usaha dan biaya, nilai biaya. Penyusunan RUK dibuat oleh ketua kelompok lalu di periksa oleh Penyuluh Pendamping dan ditandatangani oleh ketua kelompok dan Penyuluh Pendamping. Dari hasil keseluruhan RUK, Ketua Gapoktan bisa membuat RUB yang merupakan syarat Gapoktan untuk mendapatkan BLM-PUAP.

Berdasarkan data laporan LKM-A Suri Indah tahun 2009 dan Profil Gapoktan Sinamar yang penulis olah (Lampiran 10), rencana pencairan dan

penggunaan dana BLM-PUAP tersebut dapat dilihat dalam tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 11. Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan dana PUAP

No.	Uraian	Rencana	Realisasi
1.	Jadwal Pencairan	Agustus s/d Nopember 2008	Pebruari 2009
2.	Penerima	64 orang	113 orang
3.	Jenis Usaha (penggunaan)	6 jenis usaha: 1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Peternakan 4. Perkebunan 5. Industri RT 6. Pemasaran	4 jenis usaha: 1. Tanaman Pangan 2. Hortikultura 3. Peternakan 4. Pemasaran
4.	Jumlah Pencairan	Rp. 100.000.000,-	Rp. 231.900.000,-

Memperhatikan Tabel 11 diatas, terlihat bahwa rencana pencairan dana BLM-PUAP untuk anggota Gapoktan Sinamar berkisar dari bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan November 2008. Namun karena pencairan dana dari Departemen Pertanian baru masuk ke rekening Gapoktan pada bulan Pebruari 2009, maka realisasinya baru mulai dilaksanakan pada bulan tersebut. Ketidaksiuaian antara rencana dengan realisasi pencairan dan penggunaan dana sebagaimana terlihat diatas, merupakan konsekuensi dari berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh pengelola LKM-A Suri Indah dalam memberikan pinjaman kepada anggota. Pengelola LKM-A Suri Indah bersama pengurus Gapoktan Sinamar menerapkan studi kelayakan usaha terhadap anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada LKM-A Suri Indah.

Terkait dengan rencana dan realisasi jenis usaha, menurut pengurus Gapoktan Sinamar, penggunaan dana untuk usaha peternakan dan perkebunan tidak bisa direalisasikan, khusus di Nagari Sungai Rimbang saat ini kedua jenis usaha tersebut belum memberikan keuntungan yang memadai bagi usaha anggota. Disamping itu, jenis usaha tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar,

sedangkan dana yang tersedia di LKM-A Suri Indah belum mencukupi untuk kedua usaha tersebut. Sebagai solusi bagi anggota dengan jenis usaha tersebut, pengelola LKM-A Suri Indah bersama pengurus Gapoktan, membina dan mengarahkannya kepada jenis usaha lain yang lebih menguntungkan dan sesuai kemampuan LKM-A dalam memberikan bantuan modal.

Jenis usaha anggota yang saat ini mejadi perhatian bagi pengelola LKM-A Suri Indah adalah bidang pemasaran hasil-hasil pertanian. Berdasarkan telaah yang dilakukan selama tahun 2009, khusus jenis usaha ini memberikan kontribusi yang baik terhadap kelancaran usaha pembiayaan di LKM-A Suri Indah. Selain itu, anggota yang meminjam dana dengan jenis usaha pemasaran ini tidak ada yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pinjamannya, karena usaha ini dilakukan hampir tiap hari, sehingga perputaran dana juga sangat cepat.

Berdasarkan Rencana Usaha Anggota (RUA), jenis usaha tanaman pangan, dana dari LKM-A dimanfaatkan oleh anggota untuk usahatani padi sawah. Sedangkan jenis usaha tanaman hortikultura, dana tersebut dipergunakan untuk tanaman cabe. Selanjutnya untuk jenis usaha peternakan, anggota LKM-A Suri Indah memanfaatkan dana tersebut untuk modal ternak ayam arab dan ternak itik. Khusus untuk jenis usaha pemasaran, dana tersebut dipergunakan oleh anggota sebagai modal untuk menjual hasil-hasil pertanian di pasar-pasar tradisional yang ada di sekitar Nagari Sungai Rimbang, kemudian juga untuk modal warung-warung yang menjual sayur-sayuran, serta usaha-usaha pemasaran lain yang berbasis produk pertanian secara luas, seperti jualan telur ayam atau telur itik.

Menurut BPTP Sumatera Barat (2009), penggunaan dana PUAP adalah untuk mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh petani agar pendapatan mereka meningkat dan secara bertahap keluar dari garis kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan dana PUAP agar diprioritaskan pada usaha agribisnis yang mampu: 1) memberikan keuntungan relatif baik dan perolehan penerimaan dalam jangka pendek, dan 2) usaha yang memberikan nilai tambah. Usaha non budidaya seperti kegiatan pengolahan hasil (industri skala rumah tangga), pemasaran skala kecil dan usaha lain terkait sektor pertanian menjadi prioritas, karena usaha demikian bisa merupakan usaha tambahan dan

lapangan kerja baru. Usaha budidaya tanaman berumur pendek (musiman) juga dapat dilakukan, bila dengan bantuan modal akan memberikan peningkatan hasil atau mutu hasil, hingga pada akhirnya pendapatan petani akan bertambah.

Kementerian Pertanian (2010), dalam Modul Pengembangan LKM-A menggambarkan prosedur permohonan dan pencairan yang terperinci sebaiknya dilakukan oleh pengelola LKM-A sebagaimana terlihat pada lampiran 25. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh LKM-A Suri Indah, proses permohonan dan pencairan pinjaman oleh anggota sudah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Kementerian Pertanian tersebut. Memang ada beberapa point kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola, seperti tandatangan kolom persetujuan dan pemeriksaan keabsahan dokumen. Kegiatan ini dilakukan oleh manajer umum LKM-A bersama pengurus Gapoktan dengan disertai studi kelayakan usahanya. Jadi prosedur permohonan dan pencairan dana pinjaman di LKM-A Suri Indah ini juga melibatkan pengurus Gapoktan terutama ketua pengurus.

4.3.2. Pencatatan dan Pelaporan Keuangan oleh LKM-A Suri Indah

Secara konsep, sistem pencatatan dan pelaporan keuangan oleh LKM-A ataupun Gapoktan penerima dana program BLM-PUAP telah diatur oleh petunjuk teknis pelaksanaan program BLM-PUAP yang dikeluarkan oleh Departemen Pertanian maupun BPTP Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana Program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah, panduan pencatatan dan pelaporan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terwujud berkat adanya bimbingan dan pendampingan yang dilakukan oleh PMT dan PPL.

Laporan yang dibuat oleh LKM-A Suri Indah dibuat dan dikirimkan secara reguler kepada tim teknis tingkat kabupaten, yang kemudian diolah dan dilaporkan oleh PMT ke tim teknis tingkat provinsi dan tim teknis pusat. Secara umum, laporan-laporan tersebut meliputi :

1. Laporan Bulanan, yang berisi tentang laporan perkembangan dana PUAP tiap bulannya. Disamping itu, dalam laporan ini juga berisikan jumlah dan nama kelompok tani yang tergabung dalam gapoktan, jumlah simpanan/tabungan anggota dan data-data lain. Laporan ini ditandatangani

oleh ketua gapoktan dan diketahui oleh ketua tim teknis tingkat kecamatan bersama wali nagari.

2. Laporan Tahunan. Laporan ini berisi tentang akumulasi jumlah pembiayaan selama satu tahun bersama jumlah bunga pembiayaan yang diperoleh oleh LKM-A. Kemudian laporan ini juga berisi tabel pendapatan per bulan selama satu tahun serta akumulasi pendapatan dan pengeluaran selama tahun kegiatan yang dilaporkan, sehingga pada akhir laporan tersebut dilaporkan juga tentang sisa hasil usaha yang diperoleh pada tahun tersebut. Laporan ini ditandatangani oleh ketua gapoktan.
3. Buku Evaluasi (bulanan) Kegiatan Usaha Gapoktan tentang Jalannya Operasional LKM-A. Buku laporan ini berisi tentang evaluasi pembiayaan, tabungan, bunga yang diperoleh dari anggota, hasil evaluasi dan laporan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh LKM-A dalam mengelola dana BLM-PUAP. Buku evaluasi ini juga ditanda tangani oleh ketua gapoktan.
4. Laporan LKM-A untuk Rapat Anggota Tahunan (RAT). Laporan ini berisikan tentang laporan rugi laba LKM-A selama satu tahun pelaporan, neraca keuangan LKM-A selama satu periode, laporan posisi kekayaan/modal bersih selama setahun, laporan pembiayaan berdasarkan jumlah anggota yang meminjam dan mengembalikan pinjaman selama satu tahun laporan, dan laporan sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh LKM-A selama setahun. Laporan ini dibuat oleh bagian administrasi pembukuan LKM-A, diketahui oleh manajer LKM-A dan disetujui oleh ketua gapoktan.

Disamping laporan-laporan tersebut diatas, LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar juga membuat beberapa buah buku pencatatan dan pelaporan yang digunakan untuk membantu pengelola dalam memberikan informasi kepada anggota dan pihak-pihak yang membutuhkan. Pencatatan-pencatatan tersebut secara khusus diperuntukkan untuk mempermudah kerja pengelola LKM-A dalam mengelola keuangan dan juga untuk menghindari kesalahan dalam membuat laporan-laporan yang dibutuhkan. Pencatatan-pencatatan tersebut diantaranya:

1. Buku *data base* anggota;
2. Buku daftar anggota peminjam menurut jenis usaha;
3. Buku profil LKM-A dan Gapoktan;
4. Buku daftar anggota yang mengajukan pinjaman;
5. Buku daftar pemilik saham.

Pencatatan dan pelaporan ini merupakan hal yang sangat krusial dalam pengelolaan sebuah lembaga keuangan. Menurut Departemen Pertanian (2008), monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan proses manajemen. Hal ini diperlukan untuk mengetahui keberhasilan suatu kegiatan atau usaha, dan juga untuk mengetahui berbagai permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicarikan solusi pemecahannya. Khusus dalam pencatatan dan pelaporan dalam pengelolaan dana program BLM-PUAP digunakan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan, penyaluran dan pemanfaatan dana BLM-PUAP yang sistematis, berjenjang, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.3.3. Proses Dana Bergulir dalam Kelompok

Perguliran dana kepada anggota LKM-A Suri Indah sejauh ini dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah dana yang tersedia dan analisa kelayakan usaha anggota serta kapan mengajukan permohonan pinjaman. Selain itu, salah satu hal yang sangat penting yang menjadi pertimbangan LKM-A dalam memberikan pinjaman modal kepada anggota adalah watak/karakter calon peminjam. Secara umum LKM-A dapat memenuhi kebutuhan anggota akan dana tersebut jika dikaitkan dengan kemampuan permodalan LKM-A Suri Indah saat ini. Namun karena keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh LKM-A, saat ini belum semua permohonan yang diajukan oleh anggota dapat dikabulkan dalam waktu cepat. Berdasarkan pengamatan penulis pada saat penelitian, ditemukan ada anggota yang harus menunggu dana masuk dari anggota lain untuk mendapatkan pinjaman. Menurut pengelola LKM-A, hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia dan setiap dana yang masuk dari anggota telah ada anggota lain yang lebih dahulu mengajukan permohonan.

Berdasarkan laporan perkembangan dana PUAP yang dibuat oleh LKM-A Suri Indah, ditemukan bahwa hanya pada tiga bulan diawal ditemukan jumlah anggota yang memperoleh pinjaman yang berada kisaran antara 13 sampai dengan 20 orang. Namun pada bulan-bulan berikutnya, paling banyak hanya 11 orang dengan rata-rata pinjaman yang diberikan sebanyak Rp. 2.000.000,-. Jika dilihat tingkat pengembalian anggota, hanya pada bulan Agustus 2009 diperoleh jumlah pengembalian terbanyak, yaitu Rp. 15.000.000,-, dan jika dilihat kepada rata-rata pinjaman yang diberikan, maka LKM-A hanya mampu memberikan pinjaman kepada 7 orang anggota. Proses perguliran dana ini menurut pertimbangan dan kendala yang dihadapi terdapat dalam tabel 12 berikut:

Tabel 12. Pertimbangan, pelaksanaan dan kendala perguliran dana PUAP kepada anggota LKM-A Suri Indah.

Pertimbangan	Pelaksanaan	Kendala
Jumlah dana tersedia	Langsung digulirkan apabila ada dana	Ada pemohon yg harus menunggu dana tersedia
Analisa Kelayakan Usaha	Dilakukan oleh manajer dan ketua gapoktan	Tidak dilakukan dengan studi yg mendalam
Waktu permohonan	Diterima sesuai maksd pemohon	Pencairan tidak bisa cepat,terkendala dana tersedia
Watak/karakter	Selalu menjadi pertimbangan	Tidak ada kendala krn pengelola mengetahui kondisi lokal
Jumlah peminjam	7 s/d 20 orang perbulan	Jumlah dana tersedia
Prosedur	Ada tambahan prosedur (SKU)	Tidak ada kendala

Jika diakumulasikan selama tahun 2009, proses dana bergulir di LKM-A Suri Indah sudah mencapai 113 orang peminjam dengan total nilai dana yang telah bergulir sebesar Rp. 231.900.000,- (lihat Lampiran 10). Dana PUAP ini dikembalikan oleh anggota dengan sistem cicilan selama 10 bulan termasuk jasa sebesar 1% dari total pinjaman. Berdasarkan laporan akumulasi bulanan Gapoktan

Sinamar, diperoleh data bahwa pengembalian yang telah diterima oleh LKM-A selama tahun 2009 adalah sebanyak Rp. 78.050.000,-. Jika dibandingkan dengan dana yang telah bergulir, tingkat pengembalian baru mencapai 33,65%, selebihnya masih merupakan cicilan anggota yang belum dibayar karena dibayarkan perbulan secara bertahap.

Berdasarkan wawancara dengan pengelola LKM-A Suri Indah, dipaparkan bahwa setiap dana pengembalian pinjaman yang diterima oleh LKM-A, apabila telah memenuhi jumlah permohonan anggota yang akan meminjam, maka dana tersebut akan digulirkan kepada anggota tersebut, sehingga tidak ada istilah dana yang mengendap di kas LKM-A Suri Indah. Dana-dana tersebut seutuhnya dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan. Alasan inilah yang menyebabkan belum semua anggota yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan pinjaman bisa dengan cepat memperoleh pinjaman tersebut.

4.4. Identifikasi dan Analisis Faktor-faktor Keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam Mengelola Dana Program BLM-PUAP Secara Partisipatif

FGD ini diawali dengan ekspos tentang pengelolaan dana program BLM-PUAP oleh LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar yang disampaikan oleh Ketua Gapoktan Sinamar. Hal ini dapat memberikan masukan kepada peserta FGD tentang seluk-beluk pengelolaan dana BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah, sehingga peserta FGD lebih terfokus kepada topik yang dibahas. Selanjutnya penulis menjelaskan kepada peserta FGD tentang maksud dari pelaksanaan FGD tersebut sekaligus juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan FGD. Disamping itu, untuk memfokuskan peserta FGD tentang topik yang dibahas, penulis menempelkan sebuah kertas didinding ruangan yang bertuliskan topik FGD yang dilaksanakan, yaitu indikator keberfungsian LKM-A Suri Indah. Setiap peserta FGD penulis berikan panduan (*guideline*) FGD (Lampiran 11) yang berisikan tentang identitas peserta dan panduan pertanyaan tentang keberfungsian LKM-A berdasarkan teori-teori yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku petunjuk teknis pelaksanaan program BLM-PUAP tahun 2009. Secara ringkas, proses pelaksanaan FGD tersebut terlihat pada Lampiran 12. Sedangkan pada gambar

dibawah ini, terlihat bahwa sebagian peserta FGD (Ketua Gapokta, PMT dan fasilitator) sedang mendengar dan memperhatikan masukan dari peserta FGD lain.

Gambar 2. Peserta FGD di Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang



Sumber : Dokumentasi pelaksanaan FGD, 2010.

Beberapa variabel yang disepakati peserta FGD yang merupakan pengembangan dari indikator keberfungsian LKM-A dalam mengelola dana PUAP yang ada di panduan, dijabarkan sebagai berikut:

1. Dari segi prosedur penyaluran dan penghimpunan dana dari anggota, indikator yang dirumuskan dan disepakati oleh peserta FGD adalah proses dan prosedur yang mudah, penyaluran dana tepat janji, dalam artian bahwa penyaluran dana harus: 1) tepat waktu, 2) persiapan dana harus ada apabila ada permohonan peminjaman maupun penarikan simpanan. Kemudian adanya koordinasi antara pengelola LKM-A (manajer umum) dengan ketua Gapoktan terhadap permohonan dan pencairan dana yang akan dilakukan oleh LKM-A.
2. Dari segi pengelolaan bantuan modal, terutama pengelolaan dana program BLM-PUAP. Berdasarkan panduan FGD yang telah diberikan, ada 5 poin penting yang menjadi acuan bagi LKM-A dalam mengelola bantuan modal, yaitu 1) mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran (*acceptable*); 2) dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); 3) memberikan bantuan modal yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); 4) hasilnya dapat dilestarikan oleh

masyarakat sendiri (*sustainable*); dan 5) pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*). Dari hasil FGD dinyatakan bahwa bagi LKM-A Suri Indah pengelolaan dana program BLM-PUAP saat ini lebih diutamakan pada poin kedua, yaitu dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), hal ini diwujudkan dengan pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana tersebut secara transparan dan harus dibuat sesuai kenyataan. Menurut PMT yang membina LKM-A Suri Indah, penilaian keberfungsian LKM-A saat ini lebih diutamakan kepada bagaimana manajemen sebuah LKM-A tersebut dilaksanakan, baik manajemen pembukuan, kelembagaan dan manajemen pelayanan kepada anggota. Peserta FGD merumuskan hal tersebut diatas dengan beberapa indikator, yakni: 1) kinerja manajemen LKM-A; 2) kepuasan anggota terhadap pelayanan LKM-A; 3) penyebaran informasi kepada anggota secara cepat dan menyeluruh, koordinasi yang baik diantara seluruh unsur yang terkait dalam pengelolaan LKM-A; 4) pembinaan terhadap anggota; 5) sosialisasi produk dan usaha oleh pengelola LKM-A; dan 6) perputaran modal yang dikelola LKM-A.

Selain indikator-indikator yang telah dirumuskan diatas, upaya merumuskan indikator keberfungsian LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar secara partisipatif juga diperoleh dari masukan-masukan dari pengelola LKM-A, pengurus Gapoktan Sinamar dan PMT, bahwa pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah juga memperhatikan indikator-indikator berikut ini:

1. Kontribusi PMT dan PPL dalam membina dan pendampingan LKM-A Suri Indah dalam berbagai aspek, baik aspek manajemen keuangan, organisasi, maupun sebagai penghubung bagi LKM-A Suri Indah ke Tim Teknis tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. BPTP Sumatera Barat (2009) dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PUAP di Sumatera Barat menjelaskan bahwa PMT dan Penyuluh Pendamping mempunyai hubungan yang sangat krusial terhadap pengelolaan dana PUAP di LKM-A dan Gapoktan, terutama terkait dalam hal: 1) Melatih dan

membantu Gapoktan dalam membangun jejaring dengan *stakeholders* dalam pengembangan unit usaha otonomnya; 2) Melakukan *crosscheck* data dan informasi tentang usaha-usaha pembiayaan PUAP yang dikelola oleh LKM-A; 3) PMT, Penyuluh Pendamping, pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A melakukan kunjungan dan koordinasi dalam rangka pemecahan yang dihadapi oleh Gapoktan maupun LKM-A; dan 4) Membantu LKM-A dan Gapoktan dalam membangun dan memantau jejaring usaha yang dibiayai dengan dana PUAP.

Selanjutnya, PMT dan Penyuluh Pendamping merupakan tenaga konsultan dan penghubung antara Gapoktan/LKM-A dengan Tim Teknis PUAP, mulai dari tingkat kabupaten/kota sampai kepada Tim PUAP Pusat. Pelaksanaan tugas PMT dan PPL inilah yang menjadi pemacu bagi LKM-A Suri Indah dalam melakukan pengelolaan dana PUAP, yang tercermin dari hasil pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Komitmen antara pengelola LKM-A dengan pengurus Gapoktan dalam menekan kredit macet melalui pembinaan anggota, yang diwujudkan dengan membentuk BPK (Badan Penyelamat Keuangan) di tingkat Gapoktan. Insentif dan sanksi harus dapat dilakukan secara konsisten oleh pengelola LKM-A kepada anggota yang melakukan transaksi pinjaman, supaya tidak terjadi distorsi dalam implementasi kebijakan yang pada akhirnya juga berdampak terhadap LKM-A (Kementerian Pertanian, 2010).
3. Sanksi yang diberikan kepada anggota tidak memermalukan, tapi bersifat membina, terutama dalam membina usaha yang sedang dijalankan anggota. Kementerian Pertanian (2010) menjelaskan bahwa mekanisme insentif dan sanksi merupakan metode pembinaan karakter, sehingga anggota yang meminjam dapat mengembalikan pinjaman secara teratur dan disiplin. Disamping itu diharapkan juga dapat terjalin hubungan yang baik antara pengelola LKM-A dan anggota.
4. Adanya Studi Kelayakan Usaha anggota calon peminjam, bukan hanya sekedar analisa kelayakan usaha, termasuk didalam studi kelayakan

usaha tersebut karakteristik anggota yang merupakan prinsip utama bagi LKM-A dalam menyalurkan pembiayaan, yaitu sistem kejujuran, karena LKM-A Suri Indah tidak mensyaratkan agunan kepada anggota dalam mengajukan permohonan pinjaman modal usaha.

Kementerian Pertanian (2010) dalam Petunjuk Teknis Pemingkatan (*rating*) Gapoktan Menuju LKM-A menjelaskan bahwa analisa kelayakan usaha anggota sebelum diberikan pembiayaan ditujukan untuk: a) memperkecil risiko pembiayaan; b) memastikan ketepatan sasaran pembiayaan; dan c) menjaga kelangsungan hidup usaha LKM-A. Studi terhadap kelayakan usaha anggota dilakukan oleh pengurus LKM-A dengan memperhatikan aspek-aspek: a) peluang pasar; b) tingkat keuntungan; c) kebutuhan modal riil yang perlu dicukupi dari pembiayaan LKM-A; d) kemampuan membayar kembali; dan e) watak/karakter anggota calon peminjam. Pertimbangan-pertimbangan ini dapat saja ditambahkan oleh pengurus LKM-A sesuai kebutuhan lokal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

4.5. Analisa Fungsi (Kinerja) LKM-A Suri Indah dalam Mengelola Dana BLM-PUAP

Penilaian Kinerja (internal manajemen) LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP dilakukan dengan alat ukur pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi (Permeneg KUKM Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008), yang meliputi:

- a. Permodalan
- b. Kualitas aktiva produktif
- c. Manajemen
- d. Efisiensi
- e. Likuiditas
- f. Kamandirian dan pertumbuhan
- g. Jatidiri koperasi/LKM

Berdasarkan Neraca (Lampiran 9), laporan laba/rugi (Lampiran 13) dan laporan posisi kekayaan/modal bersih (Lampiran 14) LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009 yang dilaporkan Pengurus Gapoktan saat Rapat Anggota

Tahunan (RAT) tutup buku tahun 2009, dan dipandu dengan pedoman penghitungan kinerja (Lampiran 16 sampai dengan Lampiran 24), penilaian kinerja LKM-A Suri Indah dalam menjalankan kegiatannya menurut 7 aspek tersebut adalah sebagaimana dalam sub-sub bab berikut ini:

4.5.1. Permodalan

Penilaian terhadap kinerja permodalan LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar berdasarkan beberapa aspek, yakni modal sendiri, total aset, modal tertimbang, aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dan pinjaman yang diberikan beresiko. Modal sendiri adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, dan 50% modal saham. Modal tertimbang adalah hasil kali komponen modal dengan persentase bobot pengakuan risiko. ATMR adalah hasil kali komponen aktiva dengan bobot pengakuan risiko yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian kinerja. Dalam menilai permodalan hal yang dilihat adalah rasio modal sendiri terhadap total aset kemudian rasio modal sendiri terhadap pinjaman berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri.

a) Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

Tabel 13. Komponen dan Jumlah Modal Sendiri

No	Komponen Modal	Jumlah
1.	Simpanan pokok	Rp 1.080.000,00
2.	Simpanan wajib	Rp 12.054.000,00
3.	Hibah PUAP	Rp 99.400.000,00
4.	Modal Saham	Rp 550.000,00
	Jumlah modal sendiri	Rp 113.084.000,00

Sumber: Neraca LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009

Total aset terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas, bank dan pembiayaan anggota. Sedangkan aktiva tetap terdiri dari inventaris. Jumlah masing-masing pos dapat dilihat pada Neraca LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009 (Lampiran 9). Maka perbandingan antara modal sendiri dan total aset adalah:

$$\text{RasioMSTTA} = \frac{\text{Rp}113.084.000,-}{\text{Rp}118.097.091,-} \times 100\% = 95,75\%$$

Nilai 95,75 % melebihi kapasitas rasio modal sendiri terhadap aset (berada pada kisaran angka antara 90 hingga 100), maka nilainya adalah 100, dan skor untuk rasio modal sendiri terhadap total aset adalah 6 (Tabel 1 Lampiran 17). Modal sendiri yang dimiliki LKM-A Suri Indah meningkat drastis karena adanya dana hibah berupa dana PUAP sebesar Rp 100.000.000,00. Dana PUAP tersebut mengakibatkan rasio pada aspek permodalan memperoleh skor tertinggi yaitu 6, yang artinya rasio permodalan yang dikelola oleh LKM-A Suri Indah sampai dengan tutup buku tahun 2009 adalah sangat baik.

b) Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan Beresiko

Jumlah modal sendiri dapat dilihat pada Tabel 13. Jumlah pinjaman yang diberikan beresiko sebesar Rp 231.900.000,-. Pinjaman diberikan beresiko adalah dana yang dipinjamkan oleh koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai tanggungan yang memadai dan atau jaminan dari avalis atau penjamin yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. Anggota yang meminjam pada LKM-A Suri Indah tidak memakai tanggungan, maka semua pinjaman yang diberikan kepada anggota penulis golongan kepada pinjaman yang berisiko. Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Rp}113.084.000,-}{\text{Rp}231.900.000,-} \times 100\% = 48,76\%$$

Nilai 48,76% berada pada kisaran rasio modal 40% hingga 50% dengan nilai 50, karena untuk setiap kenaikan rasio modal 1% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum nilai 100. Kemudian nilai 50 dikalikan dengan bobot 6%. Sehingga diperoleh skor rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang diberikan berisiko adalah 3 (Tabel 1 Lampiran 17). Skor ini diperoleh karena jumlah modal sendiri yang ada jauh lebih kecil dari pinjaman yang telah diberikan oleh LKM-A Suri Indah selama tahun 2009. Apabila modal sendiri lebih besar dari jumlah pinjaman berisiko, maka LKM-A akan mempunyai kesempatan untuk memberikan pinjaman kepada anggota lain, sehingga dapat memberikan keuntungan lebih baik dibandingkan modal sendiri yang lebih kecil.

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri Terhadap ATMR

Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Tertimbang dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. Untuk membantu penghitungan ATMR dan Modal Tertimbang dibuatlah tabel perhitungan sebagaimana dalam Tabel 14 berikut:

Tabel 14. Perhitungan Modal Tertimbang

No.	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan resiko	Modal Tertimbang (Rp.)
1.	a. Modal Anggota			
	1. Simpanan Pokok	1.080.000,-	100%	1.080.000,-
	2. Simpanan Wajib	12.054.000,-	100%	12.054.000,-
	b. Modal Saham	1.100.000,-	50%	550.000,-
	c. Modal Hibah (PUAP)	99.400.000,-	100%	99.400.000,-
	d. Cadangan umum	669.463,65	100%	669.463,65
	e. SHU belum dibagi	4.463.091,-	50%	2.231.545,5,-
	JUMLAH			115.985.009,20

Tabel 15. Perhitungan ATMR

No.	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot pengakuan resiko	Modal Tertimbang (Rp.)
1.	Kas/Bank	6.886.600,-	0%	0
2.	Pinjaman yang diberikan kepada anggota	109.250.000,-	100%	109.250.000,-
3.	Dana Titipan	334.491,-	100%	334.491,-
4.	Aktiva Tetap	1.626.000,-	70%	1.138.200,-
	JUMLAH			110.722.691,-

Berdasarkan perhitungan Modal tertimbang dan ATMR diatas, maka penghitungan terhadap aspek rasio kecukupan modal sendiri diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Rp}115.985.009,2,-}{\text{Rp}110.722.691,-} \times 100\% = 104,75\%$$

Dari hasil perhitungan diatas, diperoleh nilai rasio kecukupan modal sendiri sebesar 104,75%, lebih dari 8%. Dengan demikian diperoleh nilai 100

dengan skor 3 (Tabel 2 Lampiran 17). Skor 3 merupakan skor tertinggi untuk rasio kecukupan modal sendiri, dengan demikian, kecukupan modal sendiri setelah dihitung dengan bobot pengakuan resiko, kecukupan modal sendiri LKM-A Suri Indah adalah baik, karena nilai ini jauh melebihi standar nilai yang ada dalam panduan penghitungan rasio kecukupan modal sendiri. Aspek negatifnya adalah jumlah aktiva yang ada pada neraca LKM-A Suri Indah masih rendah, terutama jumlah pinjaman yang diberikan dan aktiva tetap yang ada saat ini.

4.5.2. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif adalah kekayaan LKM-A yang mendatangkan penghasilan bagi LKM-A yang bersangkutan. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan atas 4 rasio, yaitu rasio antara volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan, rasio antara resiko pinjaman yang bermasalah dengan pinjaman yang diberikan, rasio antara cadangan resiko dengan pinjaman yang bermasalah, dan BMPP terhadap calon anggota, lembaga keuangan lain dan anggotanya. Selanjutnya, penghitungan terhadap 4 rasio tersebut dibahas secara terperinci sebagai berikut:

- a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman yang Diberikan.

LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar menyalurkan kredit hanya bagi anggota saja. Maka rasio nya adalah:
$$\frac{Rp231.900.000,-}{Rp231.900.000,-} \times 100\% = 100\%$$

Untuk rasio besar atau sama dengan 75 % di beri nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot 10 %, maka menghasilkan nilai skor 10 (Tabel 1 Lampiran 18). Skor ini merupakan skor tertinggi dalam penghitungan volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman yang diberikan. Jumlah kedua aspek yang dibagi tersebut sama karena saat ini LKM-A Suri Indah hanya memberikan pinjaman kepada anggota yang sudah terdaftar di LKM-A Suri Indah saja.

b. Rasio Resiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

$$50 \% \times \text{jumlah pinjaman yang kurang lancar} = 0$$

$$75 \% \times \text{jumlah pinjaman yang diragukan} = 0$$

$$100 \% \times \text{jumlah pinjaman macet} = 0$$

$$\text{Jumlah} = \text{Rp } 0,00$$

$$\text{Rasionya adalah } \frac{\text{Rp}0,00}{\text{Rp}.231.900.000,-} \times 100\% = 0\%$$

Nilai 0 % mempunyai nilai kredit 100, karena setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 2 dengan maksimal nilai 100. Nilai 100 dikalikan dengan bobot 5 % menghasilkan bobot 5 (Tabel 2 Lampiran 18). Bobot 5 merupakan bobot yang paling tinggi untuk menilai rasio antara resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. Penilaian terhadap rasio ini bergantung kepada tingkat pinjaman bermasalah, baik kredit macet, diragukan maupun kurang lancar. Berhubung di LKM-A Suri Indah pada saat penelitian tidak ada pinjaman yang bermasalah, maka nilainya adalah 0 (nol). Sehingga nilai ini membuat nilai rasio volume pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman yang diberikan adalah baik.

c. Rasio Cadangan Resiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

$$\text{Rasionya adalah } = \frac{\text{Rp}0,00}{\text{Rp}0,00} \times 100\% = \approx \%$$

Nilai tak hingga persen ini merupakan akibat dari tidak adanya pinjaman yang bermasalah dan cadangan risiko yang ada pada LKM-A Suri Indah. Sehingga nilai kredit rasio cadangan resiko terhadap pinjaman bermasalah adalah 100. kredit 100 dikalikan dengan bobot 5 sehingga menghasilkan skor 5 (Tabel 3 Lampiran 18). Skor 5 adalah skor tertinggi, sehingga rasio cadangan resiko terhadap resiko pinjaman bermasalah adalah baik.

d. BMPP kepada Calon Anggota, Lembaga Keuangan Lain dan Anggotanya

BMPP (Batas Maksimum Pemberian Pinjaman) kepada calon anggota adalah 25% dari total dana yang siap dipinjamkan. Namun di LKM-A Suri Indah, pemberian pinjaman hanya boleh diberikan kepada pemohon yang telah resmi

menjadi anggota Gapoktan Sinamar dan mengajukan permohonan untuk menjadi anggota LKM-A Suri Indah. Jadi, dalam penghitungan rasio BMPP ini, adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio BMPP} = \frac{Rp0,00}{Rp.231.900.000,-} \times 100\% = 0\%$$

Nilai 0 disini bukan dalam artian bahwa BMPP di LKM-A Suri Indah telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas yaitu 25%, namun disebabkan oleh pinjaman tidak diberikan kepada bukan anggota Gapoktan Sinamar, maka apabila rasio BMPP diperoleh kecil atau sama dengan 25%, dinilai dengan 100 dan dikalikan dengan bobot 5%, sehingga diperoleh skor 5 (Tabel 4 Lampiran 18).

4.5.3. Manajemen

Penilaian manajemen meliputi beberapa komponen yaitu, manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :

- a) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0.25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Tabel 1 Lampiran 19).
- b) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0.5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Tabel 2 Lampiran 19).
- c) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Tabel 3 Lampiran 19).
- d) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0.3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Tabel 4 Lampiran 19).
- e) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (Tabel 5 Lampiran 19).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap aspek manajemen dengan cara wawancara langsung dengan pengurus Gapoktan dan pengelola LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar, dan dengan bantuan daftar pertanyaan aspek

manajemen (Tabel 6 Lampiran 19), maka diperoleh hasil untuk masing-masing komponen sebagaimana pada tabel 16 berikut:

Tabel 16 : Hasil penilaian aspek manajemen

No.	Aspek Manajemen	Skor
1.	Manajemen Umum	2,50
2.	Manajemen Kelembagaan	3,00
3.	Manajemen Permodalan	1,20
4.	Manajemen Aktiva	1,50
5.	Manajemen Likuiditas	2,40
	JUMLAH	10,60

4.5.4. Penilaian Efisiensi

Penilaian terhadap efisiensi LKM-A Suri Indah didasarkan kepada 3 (tiga) rasio, yaitu:

- a. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
- b. Rasio aktiva tetap terhadap total aset
- c. Rasio efisiensi pelayanan

Rasio-rasio diatas menggambarkan sampai seberapa besar LKM-A Suri Indah mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimiliki. Berdasarkan cara penghitungan masing-masing rasio yang telah dipaparkan pada metode penelitian, maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

a. Rasio Biaya Operasional Terhadap Partisipasi Bruto

$$Rasionya = \frac{Rp19.699.400,-}{Rp.24.162.491,-} \times 100\% = 81,52\%$$

Nilai rasio yang diperoleh adalah 81,52%, berada pada rentang rasio antara 70 hingga 85 (Tabel 1 Lampiran 20) maka nilainya 75 dengan skor 3. Skor ini menggambarkan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan oleh LKM-A Suri Indah masih sebanding dan dapat dipenuhi oleh partisipasi atau pendapatan yang diperoleh LKM-A dari anggotanya.

b. Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Rp}1.626.000,-}{\text{Rp}118.097.091,-} \times 100\% = 1,37\%$$

Rasio 1,37% berada dalam rentang antara 0 hingga 25 (Tabel 2 Lampiran 20), sehingga nilainya adalah 100 dengan skor 4. Aktiva tetap (inventaris) yang saat ini dimiliki oleh LKM-A Suri Indah masih sedikit, sehingga jika dibandingkan dengan total aset yang dimiliki, dan dilihat kepada standar yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah aktiva tetap, maka skor yang diperoleh akan semakin kecil. Ini berarti bahwa nilai baik apabila aktiva tetap nilainya lebih kecil dari total aset yang dimiliki.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Rp}7.850.000,-}{\text{Rp}231.900.000,-} \times 100\% = 3,38\%$$

Rasio efisiensi pelayanan adalah 3,38%, berada pada rentang rasio kecil atau sama dengan 5, diperoleh nilai 100 dengan skor 2 (Tabel 3 Lampiran 20). Melihat skor yang diperoleh LKM-A Suri Indah tentang rasio efisiensi pelayanan, maka nilai ini menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh LKM-A Suri Indah sudah sangat efisien. Biaya pelayanan yang diberikan hanya 3,38% jika dibandingkan dengan total pinjaman (pelayanan) yang diberikan kepada anggota. Apabila nilai biaya pelayanan (Biaya Gaji dan Honorarium Karyawan) semakin besar dan jumlah pinjaman tetap atau semakin kecil, maka berarti pelayanan tersebut semakin tidak efisien.

4.5.5. Likuiditas

Analisa rasio likuiditas adalah alat analisis yang dilakukan terhadap kemampuan bank atau lembaga keuangan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Hal-hal yang menjadi penilaian adalah rasio kas dan rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima oleh LKM-A Suri Indah selama tahun 2009. Berdasarkan neraca LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009 dan laporan Rugi/Laba, maka diperoleh hasil perhitungan sebagaimana berikut:

a. Rasio Kas

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Rp}6.886.600,-}{\text{Rp}0,-} \times 100\% \approx \%$$

Dalam neraca per 31 Desember 2009, LKM-A Suri Indah belum mempunyai kewajiban lancar (simpanan, simpanan berjangka), sehingga nilainya 0. Penghitungan terhadap rasio kas diatas menghasilkan nilai $\approx 0\%$. Karena skor untuk rasio $\approx 0\%$ tidak ada, maka untuk kepentingan penghitungan ini rasio kas diberi skor 0 (Tabel 1 Lampiran 21). Untuk meningkatkan nilai rasio ini, maka yang harus dilakukan oleh LKM-A Suri Indah adalah menggiatkan usaha simpanan yang telah direncanakan.

b. Rasio Pinjaman Terhadap Dana yang Diterima

Untuk membantu penghitungan rasio pinjaman terhadap dana yang diterima, maka aspek dan jumlah dana yang diterima oleh LKM-A Suri Indah sebagaimana dalam tabel 17 berikut:

Tabel 17. Dana yang Diterima

No.	Aspek	Jumlah
1.	Modal sendiri	Rp 14.234.000,-
2.	Modal penyertaan (PUAP)	Rp 99.400.000,-
3.	Simpanan anggota	Rp -
	Jumlah	Rp 113.634.000,-

Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Suri Indah, 2010.

Sedangkan selama tahun 2009, pinjaman yang telah diberikan kepada anggota adalah Rp. 231.900.000,-, sehingga perhitungannya adalah:

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Rp}231.900.000,-}{\text{Rp}113.634.000,-} \times 100\% = 204,07\%$$

Rasio pinjaman terhadap dana yang diterima diperoleh sebesar 204,07%, berada pada rentang rasio antara 200 hingga 300 (Tabel 2 Lampiran 21), dengan nilai 75 dan skornya adalah 3,75. Dari data diatas dapat dilihat bahwa semakin meningkat pinjaman yang dapat diberikan oleh LKM-A, maka nilai rasio yang

diperoleh akan meningkat. Jadi, peningkatan volume pinjaman ini juga meningkatkan nilai kinerja LKM-A Suri Indah nantinya.

4.5.6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan LKM-A, didasarkan pada 3 rasio, yaitu:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya sebagaimana berikut:

$$Rasionya = \frac{Rp4.463.091,-}{Rp.118.097.091,-} \times 100\% = 3,78\%$$

Besaran rasio rentabilitas aset yang diperoleh sebesar 3,78% berada pada rentang kurang dari 5%, mendapat nilai 25, dengan skor 0,75 (Tabel 1 Lampiran 22). Skor yang diperoleh untuk rasio rentabilitas aset ini sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh pada tahun yang bersangkutan, LKM-A Suri Indah baru bisa menghasilkan SHU sebesar Rp. 4.463.091,-. Peningkatan nilai SHU, sangat berpengaruh terhadap penghitungan kinerja LKM-A dalam melihat kemandirian dan pertumbuhannya.

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Berdasarkan ketentuan dan neraca LKM-A Suri Indah, maka perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri (Ekuitas) adalah sebagai berikut:

$$Rasionya = \frac{Rp446.309,1,-}{Rp.113.634.000,-} \times 100\% = 0,39\%$$

SHU bagian anggota dalam perhitungan diatas merupakan SHU yang telah disisihkan sebesar 10% dari total SHU selama tahun 2009. SHU bagian anggota ini masih berupa tabungan, yang nantinya akan dibagikan menurut persentase simpanan masing-masing anggota. Dari penghitngan terhadap rasio rentabilitas modal sendiri diatas, diperoleh rasio sebesar 0,39%, berada pada rentang rasio kurang dari 5%, mendapat nilai 25, dengan skor 0,75 (Tabel 2 Lampiran 22). Penghitungan rasio ini sama kondisinya dengan penghitungan rasio rentabilitas

aset, sangat dipengaruhi oleh jumlah SHU yang dihasilkan oleh LKM-A Suri Indah pada tahun yang bersangkutan, sehingga nilai/skor yang diperoleh sangat rendah.

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu SHU yang dibandingkan dengan biaya beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian/LKM-A, perhitungannya adalah:

$$\text{Rasionya} = \frac{\text{Rp}4.463.091,-}{\text{Rp}19.699.400,-} \times 100\% = 22,65\%$$

Rasio kemandirian operasional diperoleh sebesar 22,65%, berada pada rentang rasio kurang dari 100%, mendapat nilai 0, dengan skor 0 (Tabel 3 Lampiran 22). Skor ini diperoleh karena terlalu kecilnya perbandingan antara SHU kotor dengan beban usaha selama tahun 2009 yang ditanggung oleh LKM-A Suri Indah. Jika dilihat dari lapangan, kemandirian dalam operasional lapangan ini memang belum bisa dicapai oleh LKM-A Suri Indah, karena dalam perjalannya dalam mengelola dana PUAP perlu mendapat bantuan dari pihak lain terutama modal. Dengan modal ini tentunya akan berimbas kepada usaha-usaha yang dijalankan oleh LKM-A Suri Indah, sehingga juga akan meningkatkan perolehan SHU.

4.5.7. Jati Diri LKM-A Suri Indah

Penilaian aspek jati diri LKM-A ini dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan LKM-A dalam mencapai tujuannya. Aspek penilaian jati diri ini menggunakan 2 rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Partisipasi bruto merupakan akumulasi dari pendapatan yang diterima oleh LKM-A Suri Indah yang berasal dari usaha-usaha yang dijalankannya selama tahun 2009. Pendapatan-pendapatan tersebut berupa pendapatan biaya administrasi yang dibayarkan anggota, jasa usaha pembiayaan dan pendapatan dari bunga bank. Berdasarkan laporan rugi/laba LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009, jumlah pendapatan bruto adalah Rp. 24.162.491,-. Sedangkan

volume pinjaman selama tahun 2009 adalah Rp. 231.900.000,-, sehingga penghitungannya adalah:

$$Rasionya = \frac{Rp24.162.491,-}{Rp.231.900.000,-} \times 100\% = 10,4\%$$

Rasio yang diperoleh dari perhitungan diatas adalah 10,4% berada pada rentang kecil dari 25%, sehingga nilainya 0 dan skornya juga 0 (Tabel 1 Lampiran 23). Perbandingan partisipasi bruto (pendapatan) yang diperoleh oleh LKM-A Suri Indah pada tahun 2009 ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan volume pinjaman yang diberikan. Hal ini disebabkan oleh pendapatan dari anggota masih sangat rendah, maka rasio ini menghasilkan nilai yang sangat rendah.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Dalam penghitungan rasio promosi ekonomi anggota, MEP3 (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) diasumsikan besarnya Rp. 750.000,-. Jumlah ini merupakan standar nilai yang ditetapkan dalam pedoman penilaian kesehatan koperasi yang menjadi acuan bagi penulis. Sehingga penghitungannya adalah:

$$RasioPEA = \frac{Rp750.000,- + 446.309,1}{Rp.1.080.000,- + 12.054.000,-} \times 100\% = 9,1\%$$

Rasio PEA yang diperoleh ini berada pada rentang 7.5% hingga 10%, mendapat nilai 75, dengan skor 2,25 (Tabel 2 Lampiran 23). Rasio ini memperoleh skor yang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh masing-masing aspek yang menjadi pembandingan masih sebanding. Namun untuk meningkatkan nilainya, maka LKM-A harus meningkatkan SHU yang diperolehnya.

4.5.8. Tingkat Kesehatan (Kinerja) LKM-A Suri Indah

Berdasarkan aspek-aspek penilaian kesehatan LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar yang mempedomani tatacara penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam (KSP) atau usaha simpan pinjam (USP) yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka akumulasi dari semua aspek tersebutlah yang menjadi dasar penetapan tingkat kesehatan (kinerja) LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana anggota terutama dana program PUAP.

Jumlah skor keseluruhan aspek diatas selanjutnya dibandingkan dengan predikat tingkat kesehatan LKM-A (Lampiran 24) yang dibagi ke dalam 5 penggolongan, yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat.

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 7 komponen diatas, diperoleh skor secara keseluruhan sebagaimana pada tabel 18 berikut:

Tabel 18. Hasil Penilaian Kesehatan LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar Menurut Pedoman Permeneg KUKM 2008

No	Aspek Penilaian	Skor	Standar
1	2	3	4
1.	Permodalan :		
	a. Rasio Modal sendiri terhadap total Modal	6,00	6,00
	b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan beresiko	3,00	6,00
	c. Rasio Modal Sendiri thdp ATMR	3,00	6,00
	Jumlah	12,00	15,00
2.	Kualitas aktiva Produktif :		
	a. Rasio vol. pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman	10,00	10,00
	b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap vol. pinjaman	5,00	5,00
	c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah	5,00	5,00
	d. Rasio BMPP kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volume pinjaman	5,00	5,00
	Jumlah	25,00	25,00
3.	Manajemen :		
	a. Manajemen Umum	2,50	3,00
	b. Manajemen Kelembagaan	3,00	3,00
	c. Manajemen Permodalan	1,20	3,00
	d. Manajemen Aktiva	1,50	3,00
	e. Manajemen Likuiditas	2,40	3,00
	Jumlah	10,60	15,00
4.	Efisiensi		
	a. Rasio Biaya Opeasional terhadap partisipasi bruto	3,00	4,00
	b. Rasio aktiva tetap terhadap total asset	4,00	4,00
	c. Rasio efesiensi pelayanan	2,00	2,00
	Jumlah	9,00	10,00
5.	Likuiditas :		
	a. Rasio Kas	0,00	10,00
	b. Rasio Pemberian pinjaman terhadap dana yang diterima	3,75	5,00
	Jumlah	3,75	15,00

Tabel 18. (Lanjutan)

1	2	3	4
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan :		
	a. Rentabilitas asset	0,75	3,00
	b. Rentabilitas modal sendiri	0,75	3,00
	c. Kemandirian Operasional	0,00	3,00
	Jumlah	1,50	10,00
7.	Jatidiri LKM-A		
	a. Rasio Partisipasi Bruto	0,00	7,00
	b. Rasio PEA	2,25	3,00
	Jumlah	2,25	10,00
	TOTAL	64,10	100

Berdasarkan hasil penilaian kinerja LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar dalam Tabel 18 diatas, terlihat bahwa ada tiga aspek yang memperoleh nilai rendah, yaitu aspek likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jatidiri LKM-A. Skor 0 (nol) pada rasio kas dalam aspek likuiditas yang diperoleh tersebut terjadi karena pada tahun 2009 LKM-A Suri Indah belum mempunyai kewajiban lancar, hal ini dapat dilihat pada neraca LKM-A Suri Indah per 31 Desember 2009 (Lampiran 9). Sedangkan rendahnya skor yang diperoleh pada aspek kemandirian dan pertumbuhan disebabkan oleh sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh LKM-A Suri Indah pada tahun 2009 (Lampiran 15), masih rendah dibandingkan dengan beban usaha yang harus dibayarkan oleh LKM-A Suri Indah pada tahun tersebut (Lampiran 13).

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang menjadi acuan penulis dalam melakukan analisis kinerja LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar, maka diperoleh hasil penilaian kinerja LKM-A ini adalah **cukup sehat**, yaitu dengan skor 64,10 yang berada diantara rentang skor 60 hingga 80 (Lihat Lampiran 24). Hal ini menunjukkan walaupun LKM-A Suri Indah masih baru dan memprioritaskan petani kecil dengan skala usaha mikro, namun telah mampu menjalankan fungsi LKM-A sebagai pengelola dana anggota dan masyarakat dengan baik. Namun, pengelola LKM-A Suri Indah maupun

pengurus Gapoktan Sinamar harus memperhatikan kekurangan-kekurangan yang ada selama ini, sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

Kekurangan-kekurangan yang penulis maksud disini adalah beberapa aspek krusial yang bisa membuat rendahnya penilaian pihak lain terhadap kinerja LKM-A Suri Indah. Diantaranya adalah rendahnya rasio SHU sebelum pajak terhadap total aset sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh SHU yang dihasilkan oleh LKM-A Suri Indah selama tahun 2009 masih kecil dibandingkan aset yang dimiliki. Hal ini dapat dimaklumi oleh semua pihak karena LKM-A Suri Indah baru mulai beroperasi pada bulan Pebruari 2009. Kemudian anggota LKM-A Suri Indah adalah khusus petani dengan kriteria miskin. Dalam pengajuan kredit pun anggota tidak dibebankan anggunan, sehingga kalau dilihat pada awalnya, LKM-A ini sulit untuk mempertahankan kinerjanya dalam melayani anggota.

Lembaga keuangan mikro yang berfungsi sebagai perantara uang (*intermediaries*) antara penabung atau penyimpan dengan peminjam, harus dikelola secara hati-hati dan memenuhi norma-norma kesehatan lembaga keuangan. Adanya kecerobohan dalam pengelolaan lembaga keuangan mikro yang potensial dapat berdampak terhadap kerugian yang meluas. Kerugian LKM dapat berakibat kepada ketidakmampuan LKM mengembalikan dana yang disimpan anggota atau nasabah pada LKM tersebut, sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan terhadap masyarakat penabungnya. Dampak lebih lanjut adalah citra buruk LKM, sehingga menghambat atau mengganggu operasi dan pengembangan LKM secara keseluruhan. Karena itu, LKM perlu dimonitor atau diawasi secara lebih ketat karena pada satu sisi kelangsungan usaha simpan pinjam sangat tergantung pada citra baik dan kepercayaan masyarakat, dan pada sisi yang lain berpotensi merugikan masyarakat luas, yaitu penabung (Atmadja Prijadi, 2003).

Sehat tidaknya suatu lembaga keuangan sangat penting untuk menumbuhkan kepercayaan ditingkat petani sebagai anggota dan masyarakat pada umumnya. Karena lembaga keuangan tidak hanya menyalurkan dana dari masyarakat, namun juga menghimpun dana dari masyarakat. Dalam menghimpun dana dari masyarakat inilah sangat diperlukan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat itu sendiri. Tingkat kesehatan (kinerja) yang baik ini sangat

meningkatkan citra lembaga keuangan mikro (LKM) dikalangan perbankan, sehingga kepercayaan perbankan pada lembaga keuangan mikro akan semakin baik.

Secara umum tujuan dari penilaian kesehatan (kinerja) suatu lembaga keuangan mikro adalah untuk memastikan keadaan informasi data yang disajikan oleh LKM-A itu sendiri, untuk mengetahui ketaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk mengetahui sistem pengamanan harta/kekayaan/aset LKM-A yang bersangkutan, dan untuk memberikan rekomendasi perbaikan bidang-bidang yang mengandung kelemahan.

Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (2008), tujuan dari pelaksanaan penilaian kesehatan terhadap suatu KSP/USP adalah agar KSP/USP tersebut dapat melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, penuh kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Jika dikaitkan dengan penilaian kinerja LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar, penilaian ini juga dapat menghasilkan suatu kriteria yang tepat bagi LKM-A Suri Indah, apakah sesuai dengan predikat yang diperolehnya pada tahun 2009 ini, yaitu LKM-A dengan pengelolaan dana PUAP terbaik di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Disamping itu, hasil penilaian ini juga dapat memperlihatkan aspek-aspek apa saja yang menjadi kelemahan dari LKM-A Suri Indah, sehingga dapat dijadikan acuan dalam peningkatan kinerja pada masa selanjutnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP oleh LKM-A Suri Indah, secara umum telah merujuk kepada petunjuk-petunjuk yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian untuk pembinaan dan pendampingan pengelola LKM-A Suri Indah dalam melaksanakan tugasnya, mereka dibantu oleh tenaga penyuluh pendamping (PPL) dan Penyelia Mitra Tani (PMT). Kontribusi dari PMT, PPL, Pengurus Gapoktan, komitmen pengelola bersama pengurus Gapoktan, koordinasi dan komunikasi yang baik, merupakan kunci pelaksanaan pengelolaan LKM-A Suri Indah. Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan sebuah LKM-A tidak selalu harus mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Pedum, Juknis, Juklak, ataupun panduan-panduan lainnya. Hal ini bisa terjadi karena salah satu karakteristik LKM-A adalah mengakar di masyarakat, dimana ada inisiasi, dimiliki dan dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga tumbuh rasa memiliki dan tanggungjawab, untuk itu LKM-A diperbolehkan menerapkan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tersendiri hasil kesepakatan antara pengurus, pengelola dan anggota LKM-A itu sendiri. Aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan tersebut tentunya tidak bertentangan dengan aturan baku yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian melalui Tim Teknis PUAP.

Kemudian, dalam pelaksanaan pengelolaan dana program BLM-PUAP tersebut, terdapat perbedaan antara rencana dan realisasi, baik pencairan maupun penggunaan dana. Hal ini disebabkan beberapa hal, yakni: keterlambatan pencairan dana dari pusat ke rekening Gapoktan, pertimbangan pengelola terhadap usaha yang diusulkan anggota, dan pertimbangan watak/karakter calon peminjam.

2. Pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) menghasilkan beberapa indikator yang menjadi perhatian utama peserta FGD terkait dengan keberfungsian LKM-A tersebut. Tidak semua panduan yang penulis jadikan sebagai *guideline* disetujui oleh peserta. Karena menurut mereka belum bisa diterapkan di LKM-A Suri Indah, contohnya: memasukkan peningkatan pendapatan dalam menilai keberfungsian LKM-A Suri Indah. Peserta FGD merumuskan bahwa pengelolaan bantuan modal yang baik untuk saat ini, terutama di LKM-A Suri Indah, cukup dengan indikator bahwa pengelola menyalurkan modal yang memadai dan mendidik anggota untuk mengelola usahanya secara ekonomis. Selain dari itu, peserta FGD menyepakati 5 point penting dalam pengelolaan bantuan modal dan bisa diterapkan di LKM-A Suri Indah secara umum, yaitu: 1) mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran (*acceptable*); 2) dikelola oleh masyarakat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*); 3) memberikan bantuan modal yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (*profitable*); 4) hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat sendiri (*sustainable*); dan 5) pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat desa dalam lingkup yang lebih luas (*replicable*). Indikator-indikator diatas, penulis rujuk dari tulisan Sumodiningrat *et al.* 2003. Hal inti dari poin-poin tersebut diatas yang telah menjadi komitmen pengelola LKM-A Suri Indah, pengurus Gapoktan, dan PMT adalah pengelolaan yang *accountable* (transparan dan dapat dipertanggungjawabkan). Poin inilah yang menjadi nilai plus bagi LKM-A Suri Indah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana anggota dan masyarakat nantinya.
3. Selanjutnya, dalam penilaian kinerja (internal manajemen) LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP dengan alat ukur pedoman penilaian kesehatan KSP/USP yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, diperoleh hasil penilaian bahwa LKM-A Suri Indah tingkat kesehatan atau kinerjanya **cukup sehat**. Ini berarti bahwa LKM-A Suri Indah

selama ini bersungguh-sungguh dalam mencapai tujuan bersama yang digariskan dalam AD/ART LKM-A Suri Indah. Selama tahun 2009, SHU yang diperoleh memang belum bisa dikatakan banyak atau sedikit, karena LKM-A Suri Indah baru mulai beroperasi sejak bulan Pebruari 2009, dimana selama 11 bulan pelaksanaan kegiatan usaha-usahanya, LKM-A Suri Indah telah mampu memperoleh SHU sebesar Rp. 4.463.091,- (lampiran 16). Tingkat kesehatan yang cukup baik ini juga diperoleh karena faktor tidak adanya istilah kredit macet bagi LKM-A Suri Indah. Karena untuk menekan dan mencegah terjadinya kredit macet tersebut, pengelola bersama pengurus Gapoktan melakukan pendekatan yang cukup baik kepada anggotanya. Salah satu bentuk kesungguhan itu adalah dibentuknya BPK (Badan Penyelamat Keuangan) di tingkat Gapoktan. Badan ini difungsikan untuk membina anggota termasuk usaha-usahanya agar tidak mengalami kendala dalam membayar angsuran pinjaman kepada LKM-A Suri Indah. Jikalau ada, maka Gapoktan-lah yang menanggulangi angsuran anggota yang belum mampu membayar. Kemudian Gapoktan (BPK) akan melakukan pembinaan kepada anggota tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan pokok kesimpulan diatas, dan terkait dengan tujuan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis merumuskan beberapa saran kepada LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar secara umum dan kepada pihak-pihak terkait sebagaimana berikut:

- 1) LKM-A Suri Indah hendaknya memperluas wilayah kerja, tidak hanya di Kenagarian Sungai Rimbang saja, tapi diperluas ke tingkat kecamatan atau bahkan sampai ke tingkat kabupaten dalam waktu pendek. Sedangkan dalam waktu panjang, LKM-A Suri Indah harus siap menjadi Bank Pertanian yang mampu melayani masyarakat yang lebih luas.
- 2) Agar pengelolaan LKM-A Suri Indah lebih baik dari saat ini, disarankan kepada pengelola lebih banyak lagi melakukan kerjasama dan mau belajar kepada

lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk memperoleh pengetahuan tentang pengelolaan dan pengembangan LKM-A Suri Indah kedepannya. Khususnya dalam pengembangan usaha dan produk simpanan, dan manajemen perbankan atau perkoperasian lainnya. Selanjutnya, penulis juga menyarankan kepada Pengelola LKM-A Suri Indah, untuk tahap selanjutnya lebih dipertimbangkan aspek *profitable* (memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik anggota untuk mengelola kegiatan usahatani secara ekonomis), bukan hanya berpatokan kepada hasil FGD saja (*accountable*).

- 3) Merujuk hasil penilaian kinerja (internal manajemen) LKM-A Suri Indah yang telah penulis lakukan, maka penulis menyarankan kepada pengelola LKM-A Suri Indah agar memperhatikan peningkatan partisipasi yang dapat diperoleh untuk periode selanjutnya. Hasil penilaian kinerja menunjukkan nilai rasio partisipasi bruto adalah 0 (nol), sebagai akibat rendahnya pendapatan-pendapatan yang diterima oleh LKM-A Suri Indah pada tahun 2009 ini. Maka, untuk kedepannya, agar kinerja LKM-A Suri Indah menjadi lebih baik, perlu adanya peningkatan pendapatan bruto, manajemen permodalan dan pelaksanaan usaha simpanan-simpanan yang telah direncanakan.
- 4) Keberadaan LKM-A Suri Indah sangat berpotensi. Oleh sebab itu diperlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta. Dukungan yang saat ini sangat mendesak bagi LKM-A Suri Indah adalah penambahan modal untuk usaha-usahanya, terutama dalam hal pembiayaan. Sehingga keluhan-keluhan petani anggota tentang ketidaktepatan waktu dan ketersediaan dana di LKM-A Suri Indah dapat teratasi.
- 5) Perlu pengawasan yang tidak konvensional terhadap pengelolaan bantuan modal di tingkat petani. Gapoktan Sinamar telah melakukan hal tersebut, yang mampu keluar dari aturan kebiasaan. Pembentukan BPK di Gapoktan Sinamar untuk menekan dan mencegah kredit macet patut dijadikan rujukan bagi Gapoktan-Gapoktan lain. Diharapkan pemerintah mau menangkap ide-ide membangun dari petani (*bottom-Up*), bukan hanya berpatokan kepada aturan-aturan baku

yang telah turun temurun dijadikan panduan dalam menyalurkan dana program pemerintah, baik dana hibah maupun kredit lunak.

- 6) Terkait dengan terlambatnya realisasi pencairan dana kepada rekening Gapoktan, yang berakibat terlambatnya realisasi pencairan dana kepada anggota/petani penerima dana PUAP, maka disarankan kepada pembuat kebijakan untuk memperpendek jalur birokrasi dalam pencairan dana bantuan kepada masyarakat, sehingga rencana yang telah dibuat oleh berbagai pihak dapat terrealisasi sesuai harapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Widodo. 2009. *Dana Rp. 100 Juta untuk PUAP*. http://www.magelangkab.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=279%3Adana-rp-100-juta-untuk-puap&catid=208%3Aberita-pertanian&Itemid=221. [11/03/2010].
- Asful, Ferdinal. 2007. *Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. [Diklat]. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Padang
- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya*. Analisis Kebijakan Pertanian 4 (2): 146-164.
- Ashari. 2009. *Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia*. Analisis Kebijakan Pertanian 7 (1): 21-42.
- Atmadja, Prijadi. 2003. *Model Pemeringkatan Koperasi: Instrumen Penilaian Hasil dan Deteksi Keperluan Pemberdayaan Koperasi*. http://www.smeccda.com/deputi7/file_Infokop/EDISI%2024/prijadi.htm [15/08/10]
- [BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, 2009. *Lima Puluh Kota dalam Angkat Tahun 2008*. BPS dan Pemda Kab. Lima Puluh Kota, Sarilamak.
- [BPTP] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. 2008. *Petunjuk Pelaksanaan Program PUAP di Sumatera Barat*. Padang. BPTP dan Pemda Sumatera Barat. 30 hal.
- [BPTP] Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Barat. 2009. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PUAP di Sumatera Barat*. Padang. BPTP dan Pemda Sumatera Barat. 47 hal.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2005. *Pedoman Umum Pemberdayaan Kelompok Tani Penerima Penguatan Modal Usaha Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A)*: Jakarta.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2007. *Pedoman Umum Pemberdayaan Masyarakat Pertanian Melalui Penguatan Modal Usaha Kelompok Tahun 2007*. Jakarta. Sekretariat Jendral Departemen Pertanian.
- [Deptan] Departemen Pertanian. 2008. *Petunjuk Teknis Penyuluh Pendamping PUAP*. Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian.

- [Deptan] Departemen Pertanian. 2008. *Petunjuk Teknis Penyelia Mitra Tani PUAP*. Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian.
- [Deptan] Departemen Pertanian, 2009. *Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta. Departemen Pertanian. 27 hal.
- [Deptan] Departemen Pertanian, 2009. *Petunjuk Teknis Verifikasi Dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)*. Jakarta. Departemen Pertanian. 36 hal.
- Gapoktan Sinamar, 2009. *Laporan Tahunan LKM-A Suri Indah*. Sungai Rimbang,
- Gapoktan Sinamar, 2008. *Profil Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang Kecamatan Suliki*. Sungai Rimbang.
- Hendayana, R dan Bustamam, S. 2008. *Fenomena Lembaga Keuangan Mikro dana Perspektif Pembangunan Ekonomi Perdesaan*. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/semnas4Des07_MP_A_Rachmat.pdf. [18/02/2010].
- Iqbal, Muhammad dan Darwis, Valeriana. 2006. *Kebijakan Pengembangan Sistem Pembiayaan Pertanian dengan Pola Badan Layanan Umum (BLU)*. Analisis Kebijakan Pertanian 4 (4): 268-280.
- Ismawan, Bambang. 2003. *Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah*. Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel - Th. II - No. 1. http://www.ekonomirakyat.org/edisi_13/artikel_1.htm. [18/02/2010].
- Kementerian Pertanian, 2010. *Modul Pengembangan LKM-A*. Kementerian Pertanian, Jakarta. 30 hal.
- Kementerian Pertanian, 2010. *Petunjuk Teknis Pemeringkatan (rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A*. Kementerian Pertanian, Jakarta. 25 hal.
- Lingkar Survey Indonesia. 2006. *Panduan Menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD)* <http://www.lsi.co.id/artikel.php?id=197>. [09/05/2010]
- Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2008. *Pedoman Penilaian Kesehatan KSP/USP*. Permeneg KUKM. Jakarta. 45 hal.
- Mayrowani, Henny. 2008. *Evaluasi Kebijakan Subsidi Benih Jagung (Kasus Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan)*. Analisis Kebijakan Pertanian 6 (3): 256-271.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

- Silalahi, Herlina Erawati. 2008. *Analisis Fungsi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Usaha Tani Anggota (Studi Kasus : KSU LKM-A Sukma Karsa Jorong Sariak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*. [Skripsi]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 138 hal.
- Sinarya, J.F dan Agustin, N.K. 2009. *PUAP untuk Kesejahteraan Rakyat*. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian 31 (6): 17-18
- Soebiyanto, F.X. 1998. *Peranan Kelompok dalam Mengembangkan Kemandirian Petani dan Ketangguhan Berusahatani*. [Diktat]. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Pertanian Bogor. 39 hal.
- Suib Abu, 2007. *Analisis Kinerja Usaha Koperasi Unit Desa (KUD) "Murni Nan XX" Betung Tebal Lubuk Begalung Padang*. [Proposal Penelitian]. Padang. Fakultas Pertanian Universitas Andalas. 47 hal.
- Sumodiningrat, G. 2003. *Optimalisasi Unit Pengelola Keuangan dalam Perguliran Dana sebagai Modal Usaha*. <http://suniscome.50webs.com/data/download/006%20Optimalisasi%20UPKD.pdf>. [18/02/2010].
- Suyatno, Thomas *et al.* 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suyatno, Thomas *et al.* 2007. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama. 126 hal.
- Wijono, W.W. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro sebagai Sakah satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. Kajian Ekonomi dan Keuangan, edisi Khusus. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cwiloejo-1.pdf>. [18/02/2010]

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuota Lokasi Penerima PUAP Menurut Propinsi tahun 2008

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kuota Desa
1	NAD	19	600
2	Sumatera Utara	19	475
3	Sumatera Barat	12	208
4	Riau	10	182
5	Jambi	9	208
6	Bengkulu	9	292
7	Sumatera Selatan	12	369
8	Lampung	9	269
9	Bangka Belitung	6	63
10	Kepulauan Riau	4	54
11	DKI Jakarta	4	15
12	Jawa Barat	19	529
13	Jawa tengah	30	987
14	D.I. Yogyakarta	4	127
15	Jawa Timur	30	987
16	Banten	5	138
17	Bali	9	137
18	NTB	8	220
19	NTT	18	522
20	Kalimantan Barat	11	244
21	Kalimantan Tengah	13	225
22	Kalimantan Timur	10	239
23	Kalimantan Selatan	11	355
24	Sulawesi Utara	9	214
25	Sulawesi Selatan	20	417
26	Sulawesi Tenggara	10	315
27	Sulawesi Barat	4	110
28	Gorontalo	5	134
29	Maluku	7	195
30	Maluku Utara	6	145
31	Papua Barat	8	230
32	Papua	20	505
33	Sulawesi Tengah	9	290

Sumber: (Kebijakan Teknis Program PUAP. 2008)

Lampiran 2. Sebaran Lokasi Penerima Dana BLM-PUAP tahun 2008
Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah	
		Kecamatan	Desa/Nagari
1	Kabupaten Agam	5	11
2	Kabupaten Dharmasraya	4	10
3	Kabupaten Kepulauan Mentawai	3	15
4	Kabupaten Lima Puluh Kota	12	30
5	Kabupaten Padang Pariaman	15	22
6	Kabupaten Pasaman	8	12
7	Kabupaten Pasaman Barat	5	10
8	Kabupaten Pesisir Selatan	12	30
9	Kabupaten Sijunjung	8	27
10	Kabupaten Solok	7	17
11	Kabupaten Solok Selatan	5	11
12	Kabupaten Tanah Datar	5	13
		89	208

Sumber: Sekretariat PUAP Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 3. Jumlah LKM-A dan Realisasi Penyaluran dana PUAP
Provinsi Sumatera Barat per 30 Juli 2009

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah LKM-A	Realisasi Penyaluran Dana (%)	Target Dana (Rp. 000)
1	Kabupaten Agam	10	60.00	1,000,000
2	Kabupaten Dharmasraya	10	59.00	1,000,000
3	Kabupaten Lima Puluh Kota	42	72.10	4,200,000
4	Kabupaten Padang Pariaman	22	50.00	2,200,000
5	Kabupaten Pasaman	12	56.67	1,200,000
6	Kabupaten Pasaman Barat	10	79.00	1,000,000
7	Kabupaten Pesisir Selatan	30	27.73	3,000,000
8	Kabupaten Sijunjung	27	40.00	2,700,000
9	Kabupaten Solok	17	111.82	1,700,000
10	Kabupaten Solok Selatan	11	75.00	1,100,000
11	Kabupaten Tanah Datar	13	84.02	1,300,000
	JUMLAH	204		20,400,000

Sumber: Sekretariat PUAP Provinsi Sumatera Barat

Lampiran 4. Daftar Nama dan Jumlah Anggota Kelompok Tani yang Tergabung dalam Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang

No.	Nama Poktan	Jumlah Anggota
1.	Karya Bersama	18 orang
2.	Semoga Jaya	36 orang
3.	Sinar Gosan	21 orang
4.	Ingin Maju	34 orang
5.	Usaha Karya	11 orang
6.	Mitra Usaha	17 orang
7.	Dagang Saiyo	36 orang
8.	Telaga Biru	17 orang
9.	Ateh Saiyo	32 orang
10.	Mitra Tani	47 orang
11.	Sepakat Bersama	22 orang
12.	Maju Bersama	23 orang
	JUMLAH	314 orang

Sumber: Berita Acara Pembentukan Gapoktan Sinamar

Lampiran 5. Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP

FORMULIR 2
RENCANA USAHA BERSAMA (RUB)

1. Nama Gapoktan : SINAMAR
2. Alamat Gapoktan : Desa : Sungai Rimbang
Kecamatan : Suliki
Kabupaten : Lima Puluh Kota
Propinsi : Sumatera Barat
3. Tanggal Pendirian Gapoktan : 7 Juli 2008 (SK Bupati)
4. Pengurus Gapoktan Ketua : Hafrizal Har
Sekretaris : Nelvayoni
Bendahara : Hj. Yarnita
5. Nomor Rekening Gapoktan : 0256-01-024426-50-6
6. Nama Bank : BRI Cabang Payakumbuh
7. Alamat Bank : Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Payakumbuh

No.	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor, RT, dll)	Nilai (Rp. 000)
I	Budidaya (On-Farm)		
	1.1. Tanaman Pangan	20,5 Ha	13.000
	1.2. Hortikultura	5 Ha	28.500
	1.3. Peternakan	1.200 Ekor	38.500
	1.4. Perkebunan	6,5 Ha	8.500
II	Non Budidaya (Of-Farm)		
	2.1. Industri Rumah Tangga Pertanian	10 RT	2.000
	2.2. Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan, dll)	2 RT	9.500
	TOTAL		100.000

Sumber: Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang

Lampiran 6. Perkembangan Dana PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang dari bulan Pebruari 2009 s/d Januari 2010.

No.	Bulan	Jumlah Dana (Rp.)	Keterangan
1.	Pebruari 2009	37.500.000	-
2.	Maret	62.500.000	Naik 66,67%
3.	April	95.500.000	Naik 48%
4.	Mei	108.500.000	Naik 13,61%
5.	Juni	118.000.000	Naik 8,76%
6.	Juli	127.500.000	Naik 8,05%
7.	Agustus	152.500.000	Naik 19,61%
8.	September	165.500.000	Naik 8,52%
9.	Oktober	200.100.000	Naik 20,91%
10.	November	219.100.000	Naik 9,49%
11.	Desember	231.900.000	Naik 5,84%
12.	Januari 2010	257.700.000	Naik 11,13%

Sumber: Laporan Bulanan Akumulasi Gapoktan Sinamar

Lampiran 7. Daftar Hadir Peserta *Focus Group Discussion* (FGD)**DAFTAR HADIR PESERTA FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)**

"Analisis Fungsi LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, Dalam Mengelola Dana Program BLM-PUAP"

Hari/Tanggal : Rabu / 26 Juni 2010
 Tempat : Gapoktan Sinamar
 Pukul : 14.00 WIB S/d Selesai

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1.	Saitul Madi.	PMT 50 km	Muncah Tengah	1. Saitul
2.	Heni Kormila	- - -	DKK	2. Heni
3.	Hafizah. Han	Ket. Gapoktan	SLK.	3. Hafizah
4.	Grami	Ket. KLP	ASAMPANJANG	4. Grami
5.	Titi DEFI JENI	manajer KUD	Atas koto	5. Titi
6.	wilid daniars	manajer LKM-A	Atas koto	6. Wilid
7.	ASRIL	Sek KLP USAHA KARYA	BATER BAKUR.	7. Asril
8.	PERAWATI	Bendahara PW UT	Atas koto.	8. Perawati
9.	NURHAYATI	Tk KUN.	JANAH TIMOLAH	9. Nurhayati
10.	Syahrul Wadi	Facilitator	Payakumbuh	10. Syahrul
11.	Endila rusbira	Notulen	Padang	11. Endila
12.				12.

Sungai Rimbang 23/6.2010

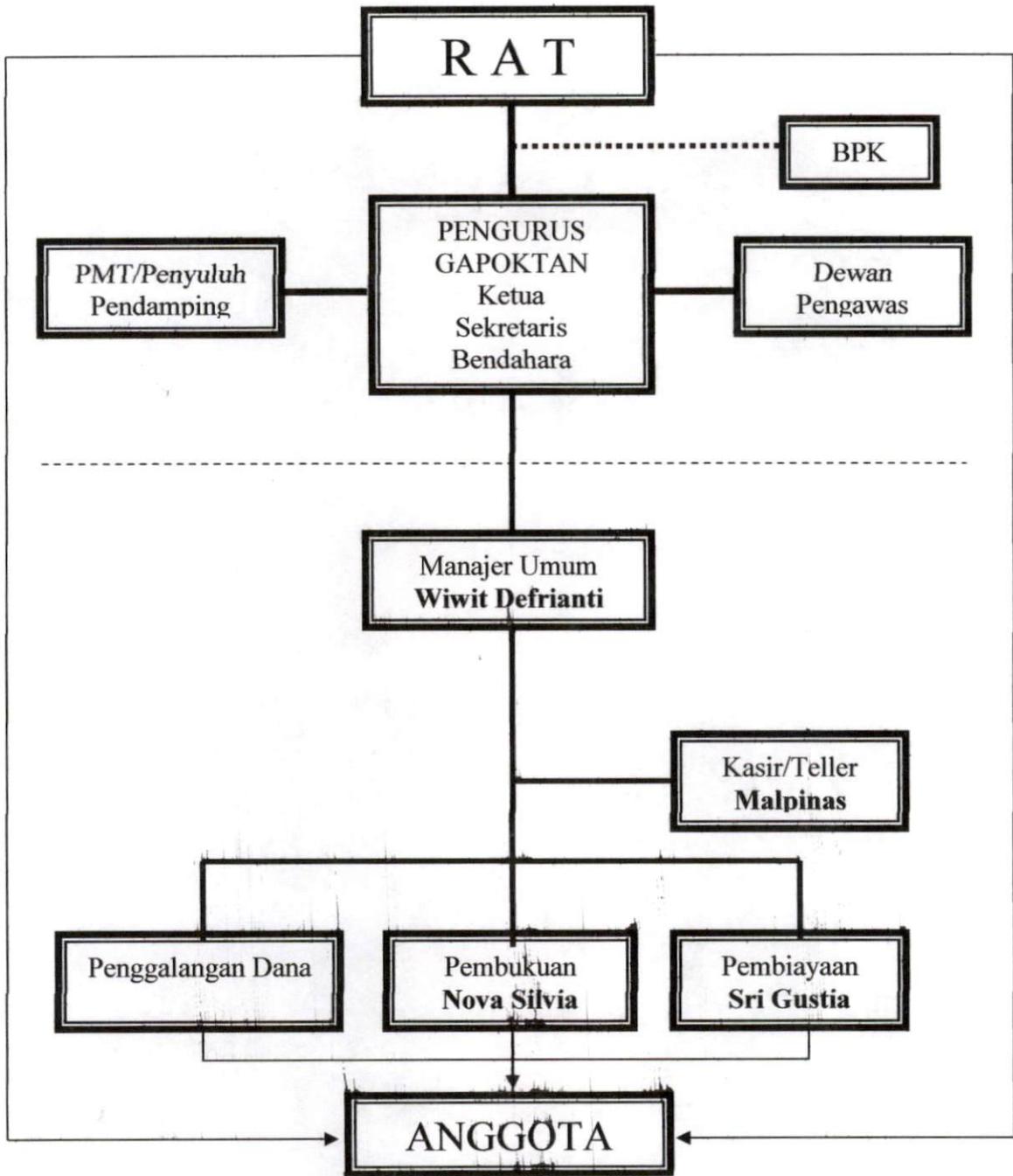
Mengetahui,
 Ketua Gapoktan Sinamar Sungai Rimbang

Syahrul Wadi
 Peneliti



Hafizal Har

Lampiran 8. Struktur Organisasi LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar



Sumber: Profil Gapoktan Sinamar, 2009

NERACA
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Suri Indah
Nagari Sungai Rimbang Kec.Suliki Kab.Lima Puluh Kota
Periode 31 Desember 2009

HARTA / AKTIVA			HUTANG DAN MODAL / KEKAYAAN BERSIH		
Harta / Aktiva Lancar			Hutang /Kewajiban Lancar		
	Kas	Rp 6,886,600.00	Hutang		
	Dana Titipan	Rp 334,491.00			
	Pembiayaan	Rp 109.250,000.00	Rp		
		Rp 116,471,091.00	Modal / Kekayaan		
Jumlah Aktiva Lancar			Modal Saham	Rp 1.100,000.00	} Modal Ganda
Harta /Aktiva Tetap			Simpanan pokok	Rp 1.080,000.00	
Komputer	Rp2.450.000.00		Simpanan wajib	Rp 12.054,000.00	
Akm Peny Komputer	Rp 824,000.00	✓	Simpanan Sukarela	Rp -	
		Rp 1,626,000.00	Simpanan	Rp -	
Jumlah Aktiva Tetap			Modal deptan	Rp 99.400,000.00	
JUMLAH AKTIVA		Rp 118,097,091.00	Jumlah Modal		Rp 113,634,000.00
			Rugi/Laba		Rp 4,463,091.00
			JUMLAH FASIVA		Rp 118,097,091.00

Diketahui Oleh
 Manager LKM-A

 WIWID DEFRIANTI

Sungai Rimbang, 31 Desember 2009
 Dibuat Oleh
 Bagian Adm & Pembukuan

TELAH DITERIMA
 LKM-A SURI INDAH
 NAGARI SUNGAI RIMBANG
 ADM/KEUANGAN
 GUSTIA

Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Suri Indah, 2010.

Lampiran 10. Rincian Rencana dan Realisasi Pencairan dan Penggunaan dana PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar.

Tabel 1. Rencana Pencairan dan Penggunaan dana PUAP

No.	Rencana Penggunaan (Jenis Usaha)	Rencana Pencairan		
		Penerima (orang)	Nilai (Rp.)	Jadwal (bulan)
1.	Tanaman Pangan	9	15.000.000,-	Oktober 2008
		1	2.000.000,-	November 2008
2.	Hortikultura	1	2.000.000,-	Agustus 2008
		1	2.000.000,-	September 2008
		11	18.500.000,-	Oktober 2008
		1	2.000.000,-	November 2008
3.	Peternakan	1	2.000.000,-	September 2008
		25	36.500.000,-	Oktober 2008
4.	Perkebunan	6	8.500.000,-	Oktober 2008
5.	Industri Rumah Tangga	1	2.000.000,-	Oktober 2008
6.	Pemasaran	7	9.500.000,-	Oktober 2008
	JUMLAH	64	100.000.000,-	

Tabel 2. Realisasi Pencairan dan Penggunaan dana PUAP

No.	Realisasi Penggunaan (Jenis Usaha)	Realisasi Pencairan		
		Penerima (orang)	Nilai (Rp.)	Jadwal (bulan)
1.	Tanaman Pangan	10	15.500.000,-	Pebruari s/d Desember 2009
2.	Hortikultura	33	61.500.000,-	Pebruari s/d Desember 2009
3.	Peternakan	27	47.800.000,-	Pebruari s/d Desember 2009
4.	Pemasaran	46	107.100.000,-	Pebruari s/d Desember 2009
	JUMLAH	113	231.900.000,-	

Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Suri Indah, 2010

Lampiran 11. Panduan (*guideline*) *Focus Group Discussion* (FGD) untuk Penelitian

“Analisis Fungsi LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar, dalam Mengelola Dana Program BLM-PUAP Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota”

Identitas Peserta FGD

Nomor Responden :.....(*diisi oleh peneliti*)

Nama :.....

Jenis Kelamin :.....

Umur :.....

Pendidikan :.....

Pekerjaan :.....

Jabatan :.....

Alamat :.....
.....

Panduan pertanyaan (*Guideline*) FGD

1. Bagaimana penyaluran dana PUAP yang dilakukan oleh LKM-A Suri Indah yang sesuai dengan kebutuhan lokal?
 - a. Prosedurnya dan persyaratannya sebaiknya bagaimana??
 - b. Proses pencairan dananya apakah sudah sesuai keinginan semua pihak?
 - c. Apakah penetapan jasa pinjaman sesuai dengan kemampuan anggota?
 - d. Sanksi yang bagaimana sebaiknya diberikan kepada anggota yang menunggak?
2. Bagaimana pelaksanaan penghimpunan modal/dana dari masyarakat yang dilakukan oleh LKM-A Suri Indah?
 - a. Bagaimana pelayanan yang sebaiknya dilakukan oleh LKM-A Suri Indah?

- b. Apa saja variasi tabungan yang sebaiknya dibuat oleh LKM-A Suri Indah
 - c. Bagaimana prosedur dan persyaratan yang sebaiknya dipenuhi oleh peminjam?
 - d. Dimana lokasi LKM-A yang sesuai menurut Bapak/ibu?
3. Kriteria apa saja menurut Bapak/Ibu yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis keberfungsian LKM-A Suri Indah? Apakah :
- a. Kepuasan anggota
 - b. Penyebaran informasi kepada anggota
 - c. Koordinasi yang baik
 - d. Partisipasi dan motivasi anggota
 - e. Komunikasi dalam kelompok
 - f. Klarifikasi kepada anggota
 - g. Kriteria-kriteria lainnya yang menurut Bapak/Ibu perlu dijadikan dasar menilai keberfungsian LKM-A Suri Indah.
4. Pengelolaan bantuan modal yang baik menurut Bapak/Ibu bagaimana?
- a. Mudah diterima dan didayagunakan oleh anggota
 - b. Dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan
 - c. Memberikan pendapatan yang memadai dan mendidik anggota untuk mengelola usaha secara ekonomis
 - d. Dapat dilestarikan oleh anggota sendiri
 - e. Mudah digulirkan dan dikembangkan
 - f. Kriteria-kriteria lain yang menurut Bapak/Ibu dapat dijadikan acuan dalam mengelola bantuan modal.

Lampiran 12. Proses pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD)

No	Uraian Kegiatan	Tujuan	Pelaksana	Kendala/Solusi
1	2	3	4	5
1.	Penentuan Topik FGD	Untuk menentukan target hasil FGD	Penulis bersama dosen pembimbing	-
2.	Penentuan Target peserta FGD beserta criteria-kriteria yang terkait dengan topic FGD	Agar peserta FGD mencerminkan keterwakilan unsur yang diharapkan	Penulis	-
3.	Identifikasi peserta yang mewakili masing-masing kelompok peserta	Agar peserta yang diundang merupakan wakil kelompok yang dapat memberikan masukan/pendapat yang diharapkan.	Penulis, Ketua Gapoktan, Pengelola LKM-A	-
4.	Penjadwalan waktu pelaksanaan FGD	Pelaksanaan FGD dapat dilaksanakan dan dihadiri oleh peserta yang akan diundang, dan tidak mengganggu aktifitas peserta.	Penulis, Ketua Gapoktan, Pengelola LKM-A dan beberapa calon peserta yang dihubungi melalui telpon	Beragamnya pekerjaan dan aktifitas calon peserta, menyebabkan penjadwalan harus dilakukan dengan menghubungi hampir semua calon peserta, sehingga disepakati hari, tanggal dan jam yang sesuai dan disepakati oleh semua calon peserta.

Lampiran 12. (Lanjutan)

1	2	3	4	5
5.	Pelaksanaan FGD dengan topik menemukan indikator keberfungsian LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar secara partisipatif	Pelaksanaan FGD ditujukan untuk merumuskan faktor0faktor yang dapat mempengaruhi keberfungsian LKM-A Suri Indah, terutama dalam mengelola dana program BLM-PUAP.	FGD dihadiri oleh 11 orang peserta, 9 orang undangan, penulis sebagai fasilitator dan 1 orang notulen.	Hambatan utama dalam pelaksanaan FGD ini adalah membatasi peserta dalam memaparkan pendapatnya, karena pada umumnya peserta adalah tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian, alat perekam yang semula dipersiapkan untuk merekam pelaksanaan FGD tidak berfungsi dengan semestinya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat direkam, selebihnya didokumentasikan lewat photo saja.

Lampiran 13. Laporan Rugi/Laba LKM-A Suri Indah tahun 2009

Laporan Rugi Laba
 Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis Suri Indah
 Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota
 Periode..Desember..2009

I Pendapatan			
i	Pendapatan Bunga Bank	Rp.....	84.491.....
ii	Pendapatan Penjualan Saham	Rp.....	45.000.....
iii	Pendapatan Pembiayaan	Rp.20.	690.000.....
iv	Pendapatam ADM	Rp. 2.	189.000.....
v	Pendapatan Operasional	Rp. 1.	014.000.....
vi	Pendapatan ADM Saham	Rp.....
vii	Pendapatan ADM Anggota Keluar	Rp.....	40.000..... +
	Jumlah Pendapatan		Rp.24.162.491.....
II Bebaa-beban			
i	Beban Gaji Pengelola	Rp...7.	850.000.....
ii	Beban Tranportasi	Rp.....	550.500.....
iii	Beban Listrik	Rp.....	140.000.....
iv	Beban Perlengkapan	Rp. 3.	680.000.....
v	Beban Sneck	Rp. 1.	244.800.....
vi	Beban Penyusutan Komputer	Rp.....	824.000.....
vii	Beban ATK	Rp...3.	153.100.....
viii	Beban Gapoktan	Rp. 1.	261.000.....
ix	Beban Pelatihan	Rp.....	500.000.....
x	Beban Sosial	Rp.....	161.000..... +
xi	Beban Komputer	Rp. 285.	000.....
xii	Beban Sewa gedung	Rp. 50.	000.....
	Rugi / Laba.....	4.463.091.....	Rp.19.699.400..... -
			Rp. 4.463.091.....

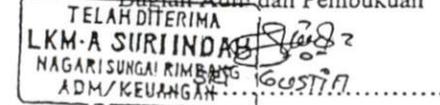


Sumber Laporan Tahunan LKM-A Suri Indah, 2010.

31 Desember 2009

Dibuat oleh

Bagian Adm dan Pembukuan



Lampiran 14. Posisi Kekayaan/Modal Bersih LKM-A Suri Indah keadaan 31 Desember 2009

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Suri Indah
Jorong Tanah Tingkah Nagari Sungai Rimbang Kec. Suliki Kab. Lima Puluh Kota
Posisi Kekayaan / Modal Bersih
Per 31 Desember 2009

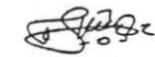
Saldo Kekayaan Awal Bulan	Rp. 120.049.991
Ditambah (+)	
Berasal dari :	
Simpanan Pokok Khusus	Rp.
Simpanan Pokok	Rp. 40.000
Simpanan Wajib	Rp. (140.000)
Sisa Hasil Usaha	Rp. (1.852.900) + Rp. (1.952.900)
Dikurangi (-)	
Simpanan Pokok (Anggota Keluar)	Rp.
Korreksi Cadangan	Rp. _____ - +
	Rp.
Saldo Kekayaan Bersih Akhir Bulan	Rp. 118.097.091

Diketahui
 Manager LKM- A



.....

Sungai Rimbang , 31 Desember 2009
 Dibuat Oleh
 Bagian Adm. dan Pembukuan



.....
 SRI GUSTIA

Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Suri Indah, 2010.

Lampiran 15. Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU) LKM-A Suri Indah tahun 2009

Laporan Sisa Hasil Usaha (SHU)
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Suri Indah
Nagari Sungai Rimbang
Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2009

Sisa Hasil Usaha	Rp 4.463.091 ✓
1. 5 % Saham	Rp 223.154,55
2. 10 % Gapoktan	Rp 446.309,4
3. 40 % Pengelola	Rp 1.785.236,1
4. 10 % Tabungan	Rp 446.309,1
5. 15 % Cadangan	Rp 669.463,65 ✓
6. 2 % Nagari	Rp 89.261,82
7. 16 % Operasional	Rp 714.094,56
8. 2 % PPL / PMT	Rp 89.261,82



Sungai Rimbang, 31 Desember 2009
Dibuat oleh Adm pembukuan



Sumber: Laporan Tahunan LKM-A Suri Indah



Lampiran 16. Panduan perhitungan kinerja LKM-A berdasarkan Aspek, komponen dan bobot penilaian

I. Bobot Penilaian Aspek Dan Komponen

1. Dalam melakukan penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi, maka terhadap aspek yang dinilai diberikan bobot penilaian sesuai dengan besarnya pengaruh terhadap kesehatan koperasi tersebut.
2. Penilaian aspek dilakukan dengan menggunakan nilai yang dinyatakan dalam angka 0 sampai dengan 100.

II. Cara Penilaian untuk Memperoleh Angka Skor

2.1. Permodalan

- a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan 0
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan (lihat tabel 1 lampiran 17).

- b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman diberikan yang beresiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan (lihat tabel 1 lampiran 17).

- c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri terhadap ATMR
1. Rasio kecukupan modal sendiri yaitu perbandingan antara Modal Tertimbang dengan aktiva Tertimbang menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100%. (lihat tabel 2 lampiran 17).
 2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal LKM-A yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
 3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan resiko.
 4. Menghitung Nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot resiko masing-masing komponen aktiva
 5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

2.2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

- a. Rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap volume pinjaman diberikan
- b. Rasio antara rasio pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan
- c. Rasio antara cadangan resiko dengan Pinjaman Bermasalah
- d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

Pinjaman bermasalah terdiri dari:

- a) Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

Pengembalian pinjaman dengan angsuran, yaitu :

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - a. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan
 - b. Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulan atau 3 bulan.
 - c. Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih.
- 2) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut:
 - a. Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan
 - b. Melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.

Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :

- a. Pinjaman belum jatuh tempo. Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
- b. Pinjaman telah jatuh tempo. Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

2.2.1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan. Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai mana terlihat pada tabel 1 lampiran 18).

2.2.2. Rasio resiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman diberikan Untuk memperoleh rasio antara resiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Menghitung perkiraan besarnya resiko pinjaman bermasalah (RPM) dengan:
 - a. 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL)
 - b. 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR)
 - c. 100% dari pinjaman diberikan yang macet (Pm)
- 2) Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan dengan rumus :

$$\frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100 \times Pm)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

- 3) Perhitungan penilaian :
 1. Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0
 2. Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100
 3. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor lihat tabel 2 lampiran 18).

2.2.3. Rasio Cadangan resiko terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah dihitung dengan cara sebagai berikut :

1. Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0
2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor lihat tabel 3 lampiran 18).

2.2.4. BMPP kepada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya BMPP (Batas Maksimum Pembelian Pinjaman) kepada calon anggota adalah 25 % dari total dana yang siap dipinjamkan dengan ketentuan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4 lampiran 18.

2.3. Penilaian Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSP dan USP Koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut;

- a. Manajemen umum
- b. Kelembagaan
- c. Manajemen permodalan
- d. Manajemen aktiva
- e. Manajemen likuiditas

Perhitungan nilai didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut : (pertanyaan dapat dilihat pada Tabel 6 Lampiran 19).

1. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0.25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (lihat tabel 1 lampiran 19)
2. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0.5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (lihat tabel 2 lampiran 19)
3. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (lihat tabel 3 lampiran 19)
4. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0.3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (lihat tabel 4 lampiran 19)
5. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0.6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”) (lihat tabel 5 lampiran 19)

2.4. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi LKM-A didasarkan pada (tiga) rasio yaitu:

1. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto
2. Rasio aktiva tetap terhadap total asset
3. Rasio efisiensi pelayanan

Rasio – rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar LKM-A mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

2.4.1. Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto

Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio sama dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 85% hingga lebih kecil dari 100 diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 15% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian (lihat tabel 1 lampiran 20).

2.4.2. Rasio aktiva tetap terhadap total asset

Rasio aktiva tetap terhadap total modal ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio antara 75% hingga 100% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2 lampiran 20.

2.4.5. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio lebih dari 15 persen diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10 persen hingga 15 persen diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1 persen nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor pelayanan (lihat tabel 3 lampiran 20)

2.5. Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas LKM-A dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio kas
2. Rasio volume pinjaman terhadap dana yang diterima

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lain.

Kewajiban lancar terdiri atas:

1. Simpanan
2. Simpanan berjangka

Pinjaman terdiri atas:

1. Pinjaman produktif
2. Pinjaman konsumtif
3. Pinjaman lain

Dana yang diterima terdiri atas:

1. Simpanan
2. Simpanan berjangka

2.5.1. Pengukuran Rasio kas ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kas lebih kecil dari 100% diberi nilai 0, untuk rasio antara 100% sampai dengan 125% diberi nilai 50, untuk rasio antara 25% hingga 150% diberi nilai 100 sedangkan untuk rasio lebih dari 150% diberi nilai 0
2. Nilai dikalikan dengan bobot 0% diperoleh skor penilaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel 1 lampiran 21.

2.5.2. Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio pinjaman lebih kecil sama dengan dari 100% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 100% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian. (lihat tabel 2 lampiran 21).

2.6. Kemandirian Dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

2.6.1. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2.5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian (lihat tabel 1 lampiran 22).

2.6.2. Rasio Rentabilitas Modal sendiri

Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2.5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian (lihat tabel 2 lampiran 22).

2.6.3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu Sisa Hasil Usaha dibandingkan dengan biaya beban usaha ditambah dengan beban perkoperasian, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100
2. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian (lihat tabel 3 lampiran 22).

2.7. Jati Diri LKM-A

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 (dua) rasio, yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto.
2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA).

2.7.1. Rasio Partisipasi Bruto

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100
2. Nilai dikalikan dengan bobot 7% diperoleh skor penilaian (lihat tabel 1 lampiran 23)

2.7.2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7.5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2.5%, nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
2. Nilai dikalikan dengan bobot 3%, diperoleh skor penilaian (lihat tabel 2 lampiran 23).

III. Penempatan Kesehatan LKM-A

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen sebagaimana dimaksud pada angka 2.1 s/d 2.7, diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan prediket tingkat kesehatan LKM-A yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat dan sangat tidak sehat (lihat lampiran 24). Tabel rekapitulasi sebagaimana dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Rumus penghitungan kinerja.

No	Aspek yg dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	2	3	4	
1		Permodalan		15
		a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang beresiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	6	
2		Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{volume pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Volume Pinjaman $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$	5	
		d. BMPP terhadap calon anggota, koperasi lain dan anggotanya terhadap volume pinjaman $\frac{\text{BMPP}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	5	
3		Manajemen:		15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen Permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	

Tabel 1. (Lanjutan).

1	2	3	4
4.	Efisiensi		10
	a. Rasio Biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto $\frac{\text{Biaya Operasional pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$	4	
	b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset $\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	4	
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan $\frac{\text{Biaya Gaji dan Honorarium Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	2	
5	Likuiditas		15
	a. Rasio Kas $\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
	b. Rasio Volume pinjaman terhadap dana yang diterima $\frac{\text{Volume Pinjaman}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan		10
	a. Rentabilitas Asset $\frac{\text{SHU sebelum bunga dan pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3	
	b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan $\frac{\text{SHU Kotor}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban perkopersian}} \times 100\%$	3	
7	Jatidiri Koperasi/LKM		10
	a. Rasio Partisipasi Bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Volume Pinjman}} \times 100\%$	7	
	b. Rasio Promosi ekonomi Anggota (PEA) $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$ PEA = MEPPP + SHU Bagian Anggota	3	
	TOTAL		100

Sumber: Permeneg KUKM, 2008

Lampiran 17. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Permodalan

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset dan Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko.

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
≤ 0	0	6	0
$0 < X < 10$	10	6	0.6
$10 < X < 20$	20	6	1.2
$20 < X < 30$	30	6	1.8
$30 < X < 40$	40	6	2.4
$40 < X < 50$	50	6	3.0
$50 < X < 60$	60	6	3.6
$60 < X < 70$	70	6	4.2
$70 < X < 80$	80	6	4.8
$80 < X < 90$	90	6	5.4
$90 < X < 100$	100	6	6.0

Tabel 2. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan modal sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0.00
$4 < X \leq 6$	50	3	1.50
$6 < X \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber: Permeneg KUKM, 2008

Lampiran 18. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Aktiva Produktif

Tabel 1. Standar Perhitungan Skor Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0.00
$25 < X \leq 50$	50	10	5.00
$50 < X \leq 75$	75	10	7.50
> 75	100	10	10.00

Tabel 2. Standar Perhitungan RPM

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < X \leq 45$	10	5	0.5
$30 < X \leq 45$	20	5	1.0
$20 < X \leq 30$	40	5	2.0
$10 < X \leq 20$	60	5	3.0
$0 < X \leq 10$	80	5	4.0
$= 0$	100	5	5.0

Tabel 3. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Resiko terhadap Resiko Pinjaman Bermasalah

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
$0 < X \leq 10$	10	5	0.5
$10 < X \leq 20$	20	5	1.0
$20 < X \leq 30$	30	5	1.5
$30 < X \leq 40$	40	5	2.0
$40 < X \leq 50$	50	5	2.5
$50 < X \leq 60$	60	5	3.0
$60 < X \leq 70$	70	5	3.5
$70 < X \leq 80$	80	5	4.0
$80 < X \leq 90$	90	5	4.5
$90 < X \leq 100$	100	5	5.0

Tabel 4. Standar Perhitungan BMPP

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	100	5	5
> 25	0	5	0

Sumber: Permeneg KUKM, 2008

Lampiran 19. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Manajemen

Tabel 1. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.25
2	0.50
3	0.75
4	1.00
5	1.25
6	1.50
7	1.75
8	2.00
9	2.25
10	2.50
11	2.75
12	3.00

Tabel 2. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.50
2	1.00
3	1.50
4	2.00
5	2.50
6	3.00

Tabel 3. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Tabel 4. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.30
2	0.60
3	0.90
4	1.20
5	1.50
6	1.80
7	2.10
8	2.40
9	2.70
10	3.30

Tabel 5. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0.60
2	1.20
3	1.80
4	2.40
5	3.00

Sumber: Permeneq KUKM, 2008

Tabel 6 . Daftar pertanyaan aspek manajemen

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
1.1	Apakah LKM-A memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	1	Ya
1.2	Apakah LKM-A telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan LKM-A dalam menjalankan usahanya (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	2	Tidak
1.3	Apakah LKM-A memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	3	Tidak
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis)	4	Ya
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan. (dengan cara pengecekan silang)	5	Ya
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independent (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas).	6	Ya

Tabel 6. (Lanjutan)

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
1.7	Pengurus dan atau pengelola LKM-A memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan	7	Ya
1.8	LKM-A memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja)	8	Ya
1.9	Pengurus LKM-A yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan LKM-A (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas)	9	Ya
1.10	Anggota LKM-A sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan LKM-A sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota)	10	Ya
1.11	Pengrus, Pengawas, dan Pengelola LKM-A di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan LKM-A (konfirmasi dengan mitra kerja)	11	Ya
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas)	12	Ya

Tabel 6. (Lanjutan)

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
2	KELEMBAGAAN		
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan LKM-A dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan job description)	13	Ya
2.2	LKM-A memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya. (yang dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis tentang job specification)	14	Ya
2.3	Di dalam struktur kelembagaan LKM-A terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas. (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi)	15	Ya
2.4	LKM-A terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP LKM-A)	16	Ya
2.5	LKM-A telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP LKM-A. (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya)	17	Ya
2.6	LKM-A mempunyai system pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. (dibuktikan dengan adanya system pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpananya)	18	Ya

Tabel 6. (Lanjutan)

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
3	PERMODALAN		
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset. (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)	19	Tidak
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya. (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca)	20	Ya
3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan	21	Tidak
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya	22	Tidak
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri. (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana)	23	Ya
4	AKTIVA		
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan. (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman)	24	Ya
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah. (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunannya)	25	Tidak
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan. (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pinjaman dan cadangan penghapusan pinjaman)	26	Tidak

Tabel 6. (Lanjutan)

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya. (dibuktikan dengan laporan penagihan pinjaman macet tahunan)	27	Tidak
4.5	LKM-A menerapkan prosedur pinjaman dilaksanakan dengan efektif. (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pinjaman dengan SOP-nya)	28	Ya
4.6	Memiliki kebijakan cadangan penghapusan pinjaman bermasalah. (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan)	29	Tidak
4.7	Dalam memberikan pinjaman LKM-A mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pinjaman)	30	Ya
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite. (dibuktikan dengan risalah rapat komite).	31	Ya
4.9	Setelah pinjaman diberikan LKM-A melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya. (dibuktikan dengan laporan monitoring)	32	Ya
4.10	LKM-A melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya. (dibuktikan dengan dokumen pengikatan dan atau penyerahan agunan).	33	Tidak

Tabel 6. (Lanjutan)

No	Aspek	Nomor Urut Pertanyaan	Ya / Tidak
5	LIKUIDITAS		
5.1	Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai pengendalian likuiditas. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha)	34	Ya
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya. (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya).	35	Tidak
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo. (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai skedul penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman)	36	Ya
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan LKM-A. (dibuktikan dengan kebijakan tertulis).	37	Ya
5.5	Memiliki system informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas. (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa system pelaporan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).	38	Ya

Lampiran 20. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Efisiensi

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional atas Partisipasi Bruto

Rasio Biaya Operasional terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$85 \leq X < 100$	50	4	2
$70 \leq X < 85$	75	4	3
$0 \leq X < 70$	100	4	4

Tabel 2. Standar Perhitungan Rasio aktiva terhadap Total Asset

Rasio aktiva tetap terhadap total asset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$75 \leq X < 100$	25	4	1
$50 \leq X < 75$	50	4	2
$25 \leq X < 50$	75	4	3
$0 \leq X < 25$	100	4	4

Tabel 3. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	100	2	2.0
$5 < X \leq 10$	75	2	1.5
$10 < X \leq 15$	50	2	1.0
> 15	0	2	0.0

Sumber: Permeneq KUKM, 2008

Lampiran 21. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Likuiditas

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Kas

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	10	0
$100 < X \leq 125$	50	10	5
$125 < X \leq 150$	100	10	10
> 150	0	10	10

Tabel 2. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman terhadap dana yang diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$X \leq 100$	25	5	1.25
$100 < X \leq 200$	50	5	2.50
$200 < X \leq 300$	75	5	3.75
> 300	100	5	5

Sumber: Permeneq KUKM, 2008

Lampiran 22. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Tabel 1. Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Rentabilitas Aset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0.75
$5 < X \leq 7.5$	50	3	1.50
$7.5 < X \leq 10$	75	3	2.25
> 10	100	3	3.00

Tabel 2. Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri/Ekuitas.

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$\leq 5\%$	25	3	0.75
$5 < X \leq 7.5$	50	3	1.50
$7.5 < X \leq 10$	75	3	2.25
> 10	100	3	3.00

Tabel 3. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	0	0
> 100	100	4	4

Sumber: Permeneg KUKM, 2008

Lampiran 23. Standar Perhitungan Penilaian Kinerja LKM-A berdasarkan Aspek Jatidiri LKM-A

Tabel 1. Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	7	0.00
$25 \leq X < 50$	50	7	3.50
$50 \leq X < 75$	75	7	5.25
≥ 75	100	7	7

Tabel 2. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	0	3	0.00
$5 < X \leq 7.5$	50	3	1.50
$7.5 < X \leq 10$	75	3	2.25
> 10	100	3	3

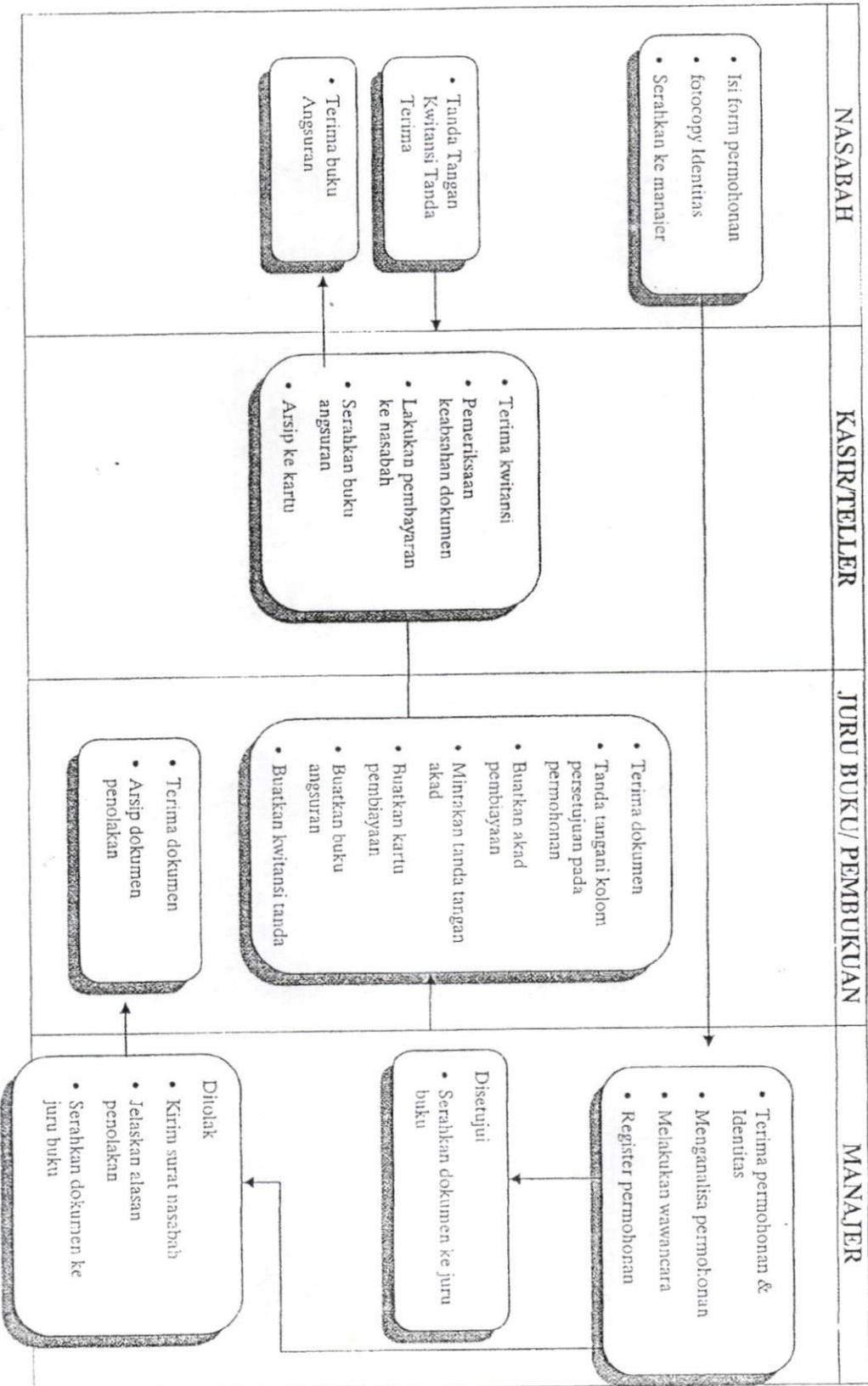
Sumber: Permeneg KUKM, 2008.

Lampiran 24. Penggolongan Tingkat Kesehatan LKM-A

SKOR	PREDIKAT
$80 < X \leq 100$	SEHAT
$60 < X \leq 80$	CUKUP SEHAT
$40 < X \leq 60$	KURANG SEHAT
$20 < X \leq 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber: Permeneg KUKM, 2008

Lampiran 25 : Prosedur permohonan dan pencairan dana pinjaman di LKM-A



Sumber : Modul pengembangan LKM-A, (Kementan, 2010).

Lampiran 26. Matriks Data Set Penelitian

Tujuan	Variabel/topik data	Indikator	Data dan Sumber data	Alat Ukur	Analisis data	Teknik pengumpulan data
1	2	3	4	5	6	7
1. Mendeskripsikan pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah Gapoktan Sinamar	1. Profil LKM-A Suri Indah	<ul style="list-style-type: none"> a. Gambaran Umum Wilayah kerja LKM-A Suri Indah b. Sejarah dan Tujuan Berdiri c. Organisasi d. Permodalan e. Keanggotaan f. Usaha, produk dan perkembangannya. 	Data primer dan Sekunder dari Gapoktan Sinamar dan LKM-A Suri Indah.		Deskriptif kualitatif	Wawancara dengan key informan, studi kepustakaan (laporan buku profil dll)
	2. Pelaksanaan Pengelolaan dana program BLM-PUAP di LKM-A Suri Indah	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana dan realisasi pencairan dana kepada anggota b. Rencana dan realisasi penggunaan dana oleh anggota penerima c. Pencatatan dan pelaporan d. Perguliran dana 	Data primer dan Sekunder dari Gapoktan Sinamar dan LKM-A Suri Indh.		Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	Wawancara dan data laporan perkembangan dana PUAP LKM-A Suri Indah

Lampiran 26. (lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberfungsian LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP	1.Fungsi LKM-A Suri Indah dalam menyalurkan dana program BLM PUAP kepada anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan prosedur dan persyaratan • Proses pencairan dan pemanfaatan dana • Penetapan jasa pinjaman • Penetapan sistem pengembalian pinjaman • Sanksi bagi anggota 	Data Primer, bersumber dari peserta FGD.	Hasil <i>Focus Group Discussion</i> (FGD)	Deskriptif kualitatif	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
	2.Fungsi LKM-A Suri Indah dalam menghimpun modal/dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan LKM-A Suri Indah • Penyediaan variasi jenis tabungan • Penetapan prosedur dan persyaratan • Lokasi LKM-A Suri Indah 	Data Primer, bersumber dari peserta FGD	Hasil FGD	Deskriptif kualitatif	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)
	3.Kriteria menganalisis fungsi tugas kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> • Kepuasan anggota • Penyebaran informasi • Koordinasi • Partisipasi dan motivasi • Komunikasi • Klarifikasi 	Data Primer bersumber dari peserta FGD	Hasil FGD	Deskriptif kualitatif	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD)

Lampiran 26. (Lanjutan)

1	2	3	4	5	6	7
3. Menganalisa Kinerja yang dijalankan LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana PUAP.	4. Pengelolaan bantuan modal 1. Menganalisa kinerja LKM-A Suri Indah dalam mengelola dana program BLM-PUAP	<ul style="list-style-type: none"> • Acceptable • Accountable • Profitable • Sustainable • Replicable <p>a. Permodalan b. Kualitas produktif c. Manajemen d. Efisiensi e. Likuiditas f. Kamandirian pertumbuhan g. Jatidiri LKM-A</p> <p style="text-align: center;">aktiva dan</p>	Data Primer bersumber dari peserta FGD Data primer dan data sekunder. Data bersumber dari LKM-A Suri Indah dan Gapoktan Sinamar	Hasil FGD Pedoman penilaian kesehatan koperasi (Permeneg KUKM Nomor 20/Per/M.KU KM/XI/2008.	Deskriptif kualitatif Deskriptif kualitatif dan kuantitatif	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Wawancara dengan <i>key informan</i> , studi kepustakaan.